



**PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2019**

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR BANTEN NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2019**

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Raya Palima –Pakupatan, Curug - Kota Serang, Banten**



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 telah disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan penyesuaian terhadap evaluasi hasil RKPD sampai dengan Triwulan II, keuangan ekonomi dan keuangan daerah serta Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 343 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Banten dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 21 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Juli 2019

GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


AGUS MINTONO, SH. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19680805 199803 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	10
1.3. Hubungan Antar Dokumen	11
1.4. Maksud dan Tujuan	12
1.5. Sistematika Dokumen	13
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD	14
2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah	46
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	120
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	120
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019	142
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	147
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	147
4.2 Prioritas Pembangunan	158
4.3 Tema Pembangunan Tahun 2019	
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	317
5.1 Rencana Kerja	317
BAB VI PENUTUP	329

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 21 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
BANTEN TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Banten telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya RPJMD menjadi acuan perencanaan periode tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sebagai Penjabaran dari RPJMD 2017-2022, Penyusunan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 diarahkan untuk mencapai Visi *“Banten Yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera, Dan Berakhlaqul Karimah”* yang ditempuh melalui misi sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Lebih lanjut dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat RKPD merupakan penjabaran RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN serta penerapan SPM yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan prioritas pembangunan nasional yang disepakati pada koordinasi teknis nasional.

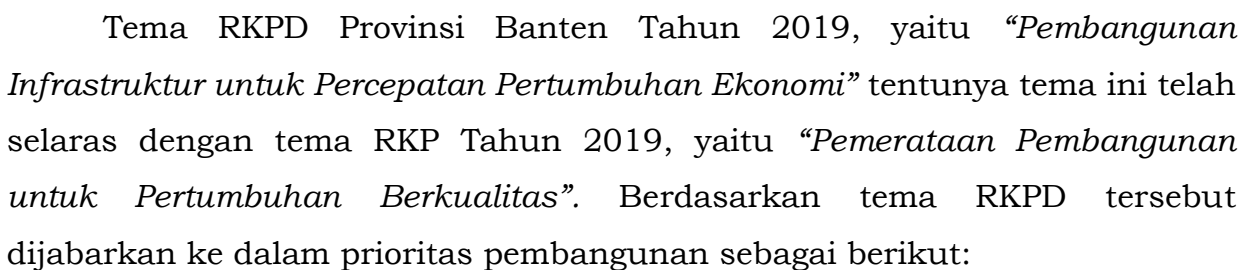
Sesuai Permendagri tersebut diatas, untuk tahapan penyusunan RKPD diawali dengan penyusunan Rancangan Awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD, RKP, program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD yang mencakup:

1. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
3. Analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
4. Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
5. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6. Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
7. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
8. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
10. Perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
11. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Dalam Rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD yang disampaikan secara tertulis kepada BAPPEDA.

Diagram alir proses penyusunan RKPD sampai dengan penyusunan APBD disajikan dalam Gambar berikut ini:

Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD Provinsi Banten
Sampai dengan Penyusunan APBD



- 7-

- Membuka Interkoneksi antar Wilayah;
 - c. Pembangunan Sport Centre (Multiyears);
 - d. Penataan Kawasan Kesultanan Banten;
 - e. Pemenuhan Elektrifikasi (listrik desa);
 - f. Pembangunan/Normalisasi Sungai dan Waduk;
 - g. Pembangunan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi;
 - h. Pembangunan TPST Regional;
 - i. Penataan Kawasan Kumuh;
 - j. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU);
 - k. Pembangunan dan Pemeliharaan PJU; dan
 - l. Pengadaan dan Pemeliharaan Kelengkapan jalan.
3. Pembangunan Pendidikan, melalui :
- a. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Unit Sekolah Baru (USB) SMA, SMK DAN Sekolah Khusus;
 - b. Rehabilitasi sekolah dengan kondisi rusak berat;
 - c. Penyediaan Biaya Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA);
 - d. Peningkatan mutu pendidikan SMA, SMK dan Sekolah Khusus; dan
 - e. Peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Pembangunan Kesehatan, melalui:
- a. Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
 - b. Pembangunan Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat;
 - c. Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan;
 - d. Rekrutmen dokter/dokter gigi dan Tenaga kesehatan strategis lainnya;
 - e. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan buffer stock Provinsi;
 - f. Pengendalian penyakit menular;
 - g. Pengendalian peredaran obat dan makanan;
 - h. Pengembangan Rumah Sakit Malingping;
 - i. Pengembangan RSUD Banten Sebagai RS. Rujukan regional.
5. Pembangunan Ekonomi, melalui:
- a. Peningkatan produksi pertanian;
 - b. Peningkatan produksi perikanan;
 - c. Penataan destinasi wisata;
 - d. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi;
 - e. Peningkatan akses modal dan pasar untuk Koperasi, industri kecil dan ekonomi kreatif;

- f. Peningkatan Pelayanan perijinan bagi investor;
- g. Peningkatan sarana prasarana Balai Latihan Kerja;
- h. Pengawasan dan Penempatan Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil Hasil Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD/APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2019 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan kondisi yang ada, sebagaimana dalam Pasal 343 Ayat (1) dimungkinkan terjadi perubahan dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perlu menjadi sebuah pertimbangan juga dengan adanya perubahan kebijakan pemerintah sesuai asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang.

Dalam rangka penyesuaian tersebut perlu dilakukan Perubahan RKPD sehingga seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro berimplikasi pada stuktur APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

Perubahan RKPD Tahun 2019 dan Perubahan Renja OPD Tahun 2019 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Perubahan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2019 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2019.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RKPD ini adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019
 - j. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
 - k. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030;
 - m. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 70);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Perubahan RKPD adalah dokumen pembangunan tahunan yang disusun dalam rangka menjamin konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Perubahan, yang terdiri dari RKPD Perubahan, KUA-PPAS Perubahan, dan rencana kerja anggaran RKA Perubahan Perangkat Daerah. Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Selanjutnya Dokumen Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 akan menjadi acuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.

1.4 Maksud dan Tujuan

Perubahan RKPD Tahun 2019 dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2019 antara Gubernur dan Pimpinan DPRD yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah dan SKPKD Tahun Anggaran 2019 sebagai bahan penyusunan Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Banten yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan RPJMD yang antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah Tahun 2019 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan daerah dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan daerah Tahun 2019;
4. Sebagai acuan semua Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Provinsi Banten dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Banten;
5. Sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD).

1.5 Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

BAB II KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun (n)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pelaksanaan Pembangunan Provinsi Banten 2017 mengacu kepada Visi dan Misi RPJMD 2012-2017. Keberhasilan pelaksanaan RKPD 2017 ditunjukkan oleh kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Banten.

2.1.1 Capaian Kinerja RPJMD

Pelaksanaan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2017 merupakan salah satu bagian dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017, dimana keberhasilan pembangunan pada Tahun tersebut dapat ditunjukkan oleh realisasi indikator kinerja dalam menjawab target-target yang sudah ditentukan. Realisasi indikator kinerja ditunjukan oleh tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Provinsi Banten 2017

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Pelayanan Dasar, Bukan Pelayanan Dasar, Pilihan, dan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan	100	100	100	42 Perangkat Daerah
		Rasio ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100	100	100	42 Perangkat Daerah
2	Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur	Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Adm. Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan	100	100	100	43 Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan ke Luar Daerah	100	100	100	43 Perangkat Daerah
		Rasio Pembangunan, Pengadaan,	100	100	100	42 Perangkat Daerah
		Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur				
		Rasio pembinaan dan peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian	100	100	100	43 Perangkat Daerah
Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
Bidang Pendidikan						
4	Pendidikan Menengah Wajib Belajar 12 Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/SMA-LB/MA/Paket C	65,92	75,89	115,12	Disdikbud
		APM Jenjang SD/SDLB/MI/Paket A	99,95	97,56	97,61	Disdikbud
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/Paket B/Wustho	100	91,14	91,14	Disdikbud
5	Peningkatan Mutu Tata Kelola dan Pencitraan Pendidikan	Rata -rata Lama Sekolah (tahun)	9,65	8,43	87,36	Disdikbud
		Ketersediaan Sarana Prasarana SMAN CMBBS (%)	10	9,50	95	Disdikbud
Bidang Kesehatan						
7	Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) (%)	86	72,05	83,78	Dinkes
		Persentase Ibu bersalin yg ditolong oleh Nakes terlatih (Cakupan PN) (%)	92	82	89,13	Dinkes
		Cakupan Kunjungan Neonatal pertama (KN1) (%)	92,50	77	83,24	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
9	Pembinaan Upaya Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) (%)	77	75	97,40	Dinkes
		Persentase RSUD dan Swasta yang melayani pasien penduduk miskin	100	100	100	Dinkes
		Persentase RS yg melaksanakan PONEK (%)	100	100	100	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Provinsi & Labkesda Provinsi Banten (%)	100	100	100	Dinkes
		Persentase Puskesmas Rawat Inap Yang Mampu PONED	100	100	100	Dinkes
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Medis RSUD Banten (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Barang Non Medis RSUD Banten (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Pasien yang dilayani dan ditangani sesuai dengan indikasi dan kemampuan (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Waktu keberlangsungan pelayanan terpenuhi di semua bagian (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Pasien yang mendapatkan asuhan keperawatan (%)	100	100	100	RSUD Banten
		Tenaga perawat yang mendapat pembinaan dan pengembangan (%)	70	70	100	RSUD Banten

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
11	Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan	Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	100	80,10	80,10	Dinkes
		Prevalensi HIV (%)	<0,5	0,03	100	Dinkes
		Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	92	84	91,30	Dinkes
		Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	100	Dinkes
		Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	60	100	166,67	Dinkes
		Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	79	76,50	96,84	Dinkes
8	Kefarmasian Dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat buffer di Provinsi Banten (%)	100	93,74	93,74	Dinkes
		Persentase Sarana Kesehatan, Produksi dan Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan yang berkualitas (%)	80	80	100	Dinkes
10	Pengembangan dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Prosentase Institusi Pendidikan Kesehatan binaan yang terakreditasi (%)	100	96,97	96,97	Dinkes
		Terlaksananya Puskesmas yg melaksanakan SIKDA (Unit)	222 Unit	222 Unit	100	Dinkes
		Puskesmas Yang Melaksanakan Upaya Kesehatan Kerja (Unit)	60 Unit	161 Unit	268,33	Dinkes

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Prosentase Sarana dan prasarana Balai Kesehatan Jiwa Masyarakat Provinsi Banten (%)	100	0	0	Dinkes
		Persentase Pembinaan Dinas Kesehatan dan RS yang melayani pasien penduduk	100	100	100	Dinkes
		miskin peserta program Jamkesmas (%)				
		Jumlah Tenaga Kesehatan RS Malingping yang ditingkatkan kemampuannya (orang)	27 Orang	28 Orang	103,70	RSUD Malingping
12	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah industri formal dan informal yang mendapatkan promosi kesehatan kerja	200 Industri	332 Industri	166	Dinkes
		Prosentase pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pekerja (%)	80	80	100	Dinkes
		Ketersediaan Obat, Bahan dan Alat Penunjang RSUD Malingping (%)	100	100	100	RSUD Malingping
		Jumlah Pasien Mendapat Layanan Kesehatan Gratis	200 Orang	1.200 Orang	600	RSUD Malingping
		Lengkapnya pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Tersedianya data dan informasi sesuai kebutuhan dan kemampuan (%)	90	90	100	RSUD Banten
		Terselenggaranya kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan BLUD	100	100	100	RSUD Banten
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
13	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap (%)	100	84,28	84,28	DPUPR
		Prosentase panjang jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	96	83	86,46	DPUPR
15	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi (%)	12,11	11,80	97,44	DPUPR
		Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Teknis (ha)	5.151,1 Ha	4.734 Ha	91,90	DPUPR
14	Penataan Ruang Wilayah dan Kawasan	Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota (paket)	1 Paket	1 Paket	100	DPUPR
		Rasio Rencana Kawasan Strategis yang Tersusun (%)	2,50	2,50	100	DPUPR
		Cakupan ketersediaan regulasi dan dokumen rencana tata ruang wilayah (dok)	3 Dokumen	3 Dokumen	100	BAPPEDA
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
17	Pengembangan dan Revitalisasi Infrastruktur Permukiman	Tingkat ketersediaan air bersih dan sanitasi (m ³)	1.983,75 m ³	734,40 m ³	37,02	DPRKP
		Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman desa/kel (lokasi)	113 Lokasi	71 Lokasi	62,83	DPRKP
		Penyelesaian Gedung KP3B	1 Gedung	1 Gedung	100	DPRKP
		Pembangunan Gedung Kantor sebanyak 15 gedung	3 Gedung	3 Gedung	100	DPRKP
16	Pembinaan dan Penataan Perumahan	Rasio Pembinaan dan Penataan Perumahan (%)	20	6,40	32	DPRKP
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
23	Pembinaan, kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan Pembinaan lembaga yang sadar politik	363 Lembaga	363 Lembaga	100	Badan Kesbangpol
		Cakupan Pembinaan Lembaga Yang Terbina Sadar Kerukunan	426 Lembaga	426 Lembaga	100	Badan Kesbangpol
		Cakupan Kegiatan Pemeliharaan Stabilitas Daerah	100	100	100	Badan Kesbangpol
24	Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Rasio Pengamanan, Pengawasan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris daerah	100	100	100	Satpol PP
		Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan	100	98,18	98,18	Satpol PP
		Rasio Pendataan dan Tindaklanjut Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan	100	100	100	Satpol PP
		Rasio Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	Satpol PP
25	Penanggulangan Bencana	Rasio Mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (%)	100	100	100	BPBD
		Rasio Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Pos Bencana dan Tanggap Darurat Bencana. (%)	100	100	100	BPBD
		Rasio Bantuan dan Rehabilitasi Pemulihan Kondisi Pasca Bencana (%)	100	100	100	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	100	100	100	BPBD
		Rasio Ketersediaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana	100	100	100	BPBD
		Rasio Pelaksanaan Monitoring Rekontruksi Fisik di Kab. Lebak	100	60	60	BPBD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Bidang Sosial						
27	Penanganan Kemiskinan	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial	1.420 KK	1.420 KK	100	Dinsos
		Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diberdayakan	1.370 KK	1.370 KK	100	Dinsos
29	Rehabilitasi Sosial	Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi	3.500 Orang	3.500 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi	2.210 Orang	2.210 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Penyandang Disabilitas yang direhabilitasi	530 Orang	530 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Lembaga sosial anak yang dibina	40 Lembaga a	40 Lembaga	100	Dinsos
		Jumlah tuna sosial yang direhabilitasi	680 Orang	680 Orang	100	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh pelayanan, perlindungan dan bimbingan lanjut Balai Perlindungan Sosial (BPS)	307 Orang	307 Orang	100	Dinsos
		Jumlah PMKS yang memperoleh bimbingan sosial dan keterampilan dan bimbingan lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (BP2S)	550 Orang	550 Orang	100	Dinsos
28	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Korban Tindak Kekerasan/Pekerja Migran yang dilindungi (Orang)	366 Orang	366 Orang	100	Dinsos
		Jumlah bantuan untuk korban bencana (Orang)	6.300 Orang	6.300 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih (Orang)	1.452 Orang	1.452 Orang	100	Dinsos

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Masyarakat yang mendapat jaminan Sosial (Orang)	366 Orang	366 Orang	100	Dinsos
26	Pemberdayaan Sosial	Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS)	400 Orang	400 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina	604 Orang	604 Orang	100	Dinsos
		Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan	640 Orang	640 Orang	100	Dinsos
		Cakupan Kegiatan peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	100	Biro Kesra
		Cakupan kelembagaan kelompok/badan/Lembaga/ Organisasi keagamaan yang terfasilitasi	600 Lembaga	600 Lembaga	100	Biro Kesra
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						
Bidang Ketenagakerjaan						
30	Pengembangan kelembagaan, Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja	Tingkat Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja (%)	5,17	5,10	98,57	Disnakertrans
31	Peningkatan Produktivitas, Perluasan, Kesempatan Kerja dan Berusaha	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka 0,5% setiap Tahunannya (%)	10,06	10,06	100	Disnakertrans
32	Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja	Cakupan Kegiatan peningkatan Keterampilan dan Kesempatan Tenaga Kerja	688 Orang	1.812 Orang	263,37	Disnakertrans
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
34	Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pengembangan Kota Layak Anak Kab/Kota (Forum Kader, POKJANAL)	1 Kab/Kota	2 Kab/Kota	200	DP3AKKB
		Rasio Pembinaan dan Pengembangan Jaringan kerja Lembaga masyarakat (TP. PKK Prov, Kab/Kota, Kec, HARGANAS) (%)	100	100	100	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Lembaga lainnya (%)	20	20	100	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kapasitas kelembagaan PUG TKP3, PSW (AP,PPRG) (%)	100	100	100	DP3AKKB
		Rasio Pembinaan Oranganisasi Wanita (BKOW dan lainnya) (%)	100	100	100	DP3AKKB
		Rasio Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan(P2WKSS ,GSI,APE) (%)	100	100	100	DP3AKKB
		Prosentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan (Dalam dan Luar Provinsi) (%)	100	100	100	DP3AKKB
Bidang Pangan						
35	Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan yang cukup, aman dan merata	3 Dokumen	3 Dokumen	100	Dinas Ketapang
		Ketersediaan dokumen kebijakan infrastruktur dan pemberdayaan pangan	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Dinas Ketapang
		Jumlah daerah rawan pangan yang tertangani (Kecamatan)	11 Kecamatan	11 Kecamatan	100	Dinas Ketapang

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Ketersediaan dokumen pasokan dan harga pangan lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Dinas Ketapang
		Jumlah cadangan pangan pemerintah (CPP)	200 Ton	125,67 Ton	62,84	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan fasilitasi program bantuan Raskin/Rastra	100	100	100	Dinas Ketapang
		Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat (CPP dan CPM)	807 Ton	780,10 Ton	96,67	Dinas Ketapang
		Jumlah Lembaga cadangan pangan masyarakat (Lembaga)	82 Lembaga	112 Lembaga	136,59	Dinas Ketapang
		Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat (Skor PPH)	96	85,70	89,27	Dinas Ketapang
		Cakupan layanan penyuluh pada daerah sentra produksi (%)	80	80	100	Dinas Pertanian
Bidang Lingkungan Hidup						
36	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Persentase kualitas air yang terpantau dan terinformasikan menurut SPM (%)	20	20	100	DLHK
		Rasio tindak lanjut terhadap jumlah pengaduan masyarakat akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan hidup (%)	20	20	100	DLHK
38	Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas area rehabilitasi hutan dan lahan (ha)	8.000 Ha	5.236 Ha	65,45	DLHK
		Persentase peningkatan fungsi hutan dan kawasan lindung (%)	20	20	100	DLHK
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
44	Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Perdesaan	Rasio Desa/Kel Yang Mengalami peningkatan kapasitas kelembagaan	100	100	100	DPMD
		masyarakat desa/kelurahan				
		Rasio Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan desa/kel (%)	13	13	100	DPMD
		Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna	2 Posyantek	10 Posyantek	500	DPMD
		Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa BUMDes) (%)	100	100	100	DPMD
		Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	5	5	100	DPMD
		Rasio pembinaan dan pengembangan Ekonomi masyarakat (BKM, peralihan pengelolaan PNPM) (%)	6,38	6,38	100	DPMD
		Cakupan Pembinaan Pemerintah Desa/Kel (pemerintah desa dan BPD)	6 Desa/Kel	5 Desa/Kel	80,81	DPMD
		Cakupan pengembangan Pemerintahan Desa	1.261 Desa	1.238 Desa	98,18	DPMD
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
33	Kependudukan dan Keluarga Berencana	Cakupan Peningkatan integrasi pengelolaan layanan Keluarga Berencana	890	890	100	DP3AKKB
		(orang)				
		Cakupan Peningkatan Tata Kelola Administrasi Kependudukan (%)	100	57,78	57,78	DP3AKKB
Bidang Perhubungan						
45	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat, Laut, Udara dan Perkeretaapian	Rasio Pengembangan dan Peningkatan Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan menjadi 100% tahun 2017	48,91	48,91	100	Dinas Perhubungan
		Tingkat pembinaan dan pemantauan angkutan darat laut dan udara sejumlah 100% tahun 2017	60,63	59,30	97,81	Dinas Perhubungan
Bidang Komunikasi dan Informatika						
46	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Telematika	Meningkatnya penyelenggaraan dan pelayanan aksesibilitas serta kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika sejumlah 100% tahun 2017. (%)	100	98,52	98,52	Diskominfo SP
		Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan Lembaga Penyiaran (%)	75	75	100	Diskominfo SP
		Cakupan Pemantauan Isi Siaran Radio dan Televisi (%)	75	75	100	Diskominfo SP

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan Penyelenggaraan Perizinan Penyiaran (%)	100	100	100	Diskominfo SP
Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
48	Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan K-UMKM	Persentase Koperasi dan UMKM yang terakses sumber-sumber permodalan (%)	18,28	18,28	100	Dinkop UKM
		Tingkat pertumbuhan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan (%)	18,28	18,28	100	Dinkop UKM
47	Pengembangan Produk dan Pemasaran K-UMKM	Tingkat layanan teknologi, inovasi, daya saing, dan mutu produk koperasi dan UMKM (%)	29	29	100	Dinkop UKM
		Tingkat layanan akses akses pasar dan pemasaran bagi produk koperasi dan UMKM (%)	29	29	100	Dinkop UKM
49	Peningkatan Daya Saing, Kapasitas kelembagaan dan SDM K-UMKM	Pesentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan produktivitas Koperasi dan UMKM (%)	20,66	20,66	100	Dinkop UKM
		Persentase peningkatan kompetensi pelaku usaha KUMKM (%)	20,66	20,66	100	Dinkop UKM
Bidang Penanaman Modal						
50	Peningkatan Iklim Investasi	Cakupan layanan regulasi perijinan bidang Penanaman Modal (%)	15	15	100	DPMPTSP
51	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Realisasi Investasi PMA (Rp)	10,34 Triliyun	40,68 Triliyun	393	DPMPTSP
		Nilai Realisasi Investasi PMDN (Rp)	4,47 Triliyun	15,14 Triliyun	339	DPMPTSP
Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
52	Kepemudaan dan Kepramukaan	Jumlah Organisasi pramuka yang mendapatkan pelayanan Kepramukaan (Kwartir)	9 Kwartir	9 Kwartir	100	Dispora
		Jumlah Kelompok/ Organisasi Kepemudaan yang berperan dalam kewirausahaan (kel)	10 Kelomp ok	25 Kelompok	250	Dispora
53	Pembinaan, Pembudayaan dan Pengembangan Olahraga	Rasio Cabang Olahraga Berprestasi terhadap jumlah kejuaraan tingkat nasional/regional (Event)	20 cabor/ 18 event	19 cabor/ 17 event	94,72	Dispora
		Tingkat pemenuhan prasarana dan sarana olahraga (Unit)	1 unit	1 unit	100	Dispora
Bidang Statistik						
3	Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan	40 Paket	40 Paket	100	40 Perangkat Daerah
Bidang Kebudayaan						
6	Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya	Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan (%)	20	18	90	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat (%)	15	14	93,33	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal (%)	20	18	90	Disdikbud
		Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar budaya, museum dan kesejarahan (%)	20,37	19	93,27	Disdikbud
		Meningkatnya Jumlah Pengunjung Museum	20	18	90	Disdikbud
Bidang Perpustakaan						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
61	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Tingkat kunjungan perpustakaan per hari (%)	500 (100%)	500 (100%)	100	Dinas Perpustakaan dan
		Meningkatnya kunjungan ke website BPAD (%)	125 (100%)	125 (100%)	100	Dinas Perpustakaan dan
60	Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan	Peningkatan Jumlah Perpustakaan sesuai standar (%)	42 (100%)	42 (100%)	100	Dinas Perpustakaan dan
Bidang Kearsipan						
59	Pembinaan Kearsipan Daerah	Persentase SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan (%)	41 (100%)	41 (100%)	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase cakupan koneksi Jaringan Informasi Kearsipan Provinsi (JIKP) dengan seluruh SKPD, Kab/Kota (%)	41 (100%)	41 (100%)	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pilihan						
Bidang Kelautan dan Perikanan						
42	Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Luas Areal Konservasi Laut (Ha)	1 Ha	1 Ha	100	DKP
		Jumlah Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Diselesaikan (Kasus)	12 Kasus	13 Kasus	108,33	DKP
Bidang Pariwisata						
68	Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata (%)	20	20	100	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata (%)	23,08	23,08	100	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata (%)	20	20	100	Dinas Pariwisata
		Meningkatnya promosi wisata dalam negeri dan luar negeri (%)	20,11	20,11	100	Dinas Pariwisata

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
69	Pengembangan Kemitraan Kepariwisata	Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan Lembaga/instansi pemerintah (%)	20	20	100	Dinas Pariwisata
		Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata (%)	19,67	19,67	100	Dinas Pariwisata
		Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan instansi lainnya (%)	18,75	18,75	100	Dinas Pariwisata
Bidang Pertanian						
43	Peningkatan Produksi, Produktivitas Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Peningkatan Produksi Padi (GKG) (ton)	2.396.699 Ton	2.405.501 Ton	100,37	Dinas Pertanian
		Surplus Beras (ton)	88.270 Ton	102.314 Ton	115,91	Dinas Pertanian
		Penyediaan Benih Sumber Padi (ha)	34.000 Ha	90.205 Ha	265,31	Dinas Pertanian
		Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Padi (ha)	100.000 Ha	128.600 Ha	128,60	Dinas Pertanian
		Produksi Hortikultura (Durian, Manggis, Melon, Cabe Besar) (ton)	28.263 Ton	44.209 Ton	156,42	Dinas Pertanian
		Produksi Daging (sapi dan kerbau) (ton)	37.069,66 Ton	55.729,84 Ton	150,34	Dinas Pertanian
		Cakupan peningkatan upaya-upaya rehabilitasi, diversifikasi, intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (ha)	500 Ha			DLHK
		Cakupan ketersediaan sumber benih tanaman perkebunan (Unit)	3 Unit	3 Unit	100	DLHK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Unit usaha perkebunan terpadu (agrowisata) (Unit)	1 Unit			DLHK
		cakupan ketersediaan sarana dan prasarana	3 Unit			DLHK
		pendukung pengembangan perkebunan (Unit)				
		Cakupan ketersediaan benih tanaman perkebunan yang berkualitas (batang)	107.000 Batang	200.000 Batang	186,92	DLHK
		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	70.050 Ton	56.222 Ton	80,26	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	>100	106,77	106	DKP
		Jumlah Produksi Benih Ikan (Milyar Ekor)	1,7 Milyar	6 Milyar	342	DKP
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	190.000 Ton	105.426 Ton	55,49	DKP
41	Peningkatan Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Nilai Tukar Petani (NTP)	106	99,73	94,98	Dinas Pertanian
		Cakupan Penerapan Good Agricultural Practice (GAP) / Standar Operational Procedure (SOP) Hortikultura (Unit)	3 Unit	4 Unit	133,33	Dinas Pertanian
		Cakupan kemitraan Kelompok Tani dan Dunia Usaha (Unit)	11 Unit	11 Unit	100	Dinas Pertanian
		Tingkat perkembangan jumlah aneka usaha kehutanan dan perkebunan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100	DLHK
		Cakupan tingkat kemantapan tata usaha dan pembinaan industri kehutanan dan perkebunan (Unit)	250 Unit	250 Unit	100	DLHK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	0,85	0,53	62,35	DKP
		Jumlah Ekspor Perikanan (Ton)	5.000 Ton	4.122 Ton	82,44	DKP
		Tingkat Kosumsi Ikan (Kg/Kapita)	30 Kg/Kapita	33 Kg/Kapita	110	DKP
39	Pemberdayaan kelembagaan dan Sumberdaya Peternakan, Perikanan, Pertanian dan Perkebunan	Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan kelembagaan Pertanian (Unit)	5 Unit	5 Unit	100	Dinas Pertanian
		Cakupan Peningkatan Akses Kelompok tani terhadap Perbankan (Unit)	30 Unit	30 Unit	100	Dinas Pertanian
		Cakupan tingkat pemanfaatan teknologi terapan bidang kehutanan dan perkebunan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100	Dinas Pertanian
		Peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri (Unit)	30 Unit	26 Unit	86,67	Dinas Pertanian
40	Peningkatan Daya Dukung Sumberdaya Pertanian	Cakupan ketersediaan Traktor (Unit)	200 Unit	228 Unit	114	Dinas Pertanian
		Cakupan ketersediaan Rice Milling Unit (RMU) (Unit)	5 Unit	11 Unit	220	Dinas Pertanian
		Cakupan Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)	4.000 Ha	1.500 Ha	37,50	Dinas Pertanian
Bidang Kehutanan						
37	Peningkatan Daya Dukung Sumber Daya Hutan dan Lahan	Cakupan pengendalian penggunaan kawasan hutan (Unit)	6 Unit	6 Unit	100	DLHK
		Peningkatan jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan (kelompok)	10 Kelompok	15 Kelompok	150	DLHK

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						
63	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Tingkat penambahan jumlah Instalasi dan	7.045 SS	6.903 SS	97,98	Dinas ESDM
		Sambungan Rumah Terpasang (SS)				
		Tingkat penambahan jumlah Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor dari Energi Terbarukan (Unit)	2 Unit	2 Unit	100	Dinas ESDM
		Persentase tingkat pemenuhan Kebutuhan Jaringan Listrik di KP3B (%)	100	100	100	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan Dokumen Perencanaan, Pengembangan dan Sumber Data Energi (Dokumen)	18 Dokum en	18 Dokumen	100	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraanny a Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Energi (Laporan)	17 Lapora n	17 Laporan	100	Dinas ESDM
62	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	Cakupan ketersediaan Laporan Pemetaan, Penelitian, Pengembangan dan Sumber Data Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi (Dokumen)	13 Dokum en	13 Dokumen	100	Dinas ESDM
		Cakupan ketersediaan sarana pengendalian dan konservasi air tanah (Unit)	31 Unit	31 Unit	100	Dinas ESDM

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Cakupan ketersediaan sarana penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah sulit air bersih (lokasi)	5 Lokasi	5 Lokasi	100	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaranya Sosialisasi, Pembinaan dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral, Batubara, Panas Bumi, Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi	7 Laporan	7 Laporan	100	Dinas ESDM
64	Pengembangan, Pengusahaan Potensi dan Produk Pertambangan dan Energi	Cakupan layanan Penerbitan Dokumen Perijinan yang menjadi Kewenangan Provinsi (ijin)	193 Ijin	193 Ijin	100	Dinas ESDM
		Cakupan layanan Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertambangan dan Energi (Dokumen)	1 Dokumen	1 Dokumen	100	Dinas ESDM
		Cakuman layanan informasi data bidang pertambangan dan energi yang siap dipublikasikan (Paket)	1 Paket	1 Paket	100	Dinas ESDM
		Cakupan keterfasilitasinya Pameran untuk Promosi Produk dan Potensi Pertambangan dan Energi (Kegiatan)	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100	Dinas ESDM
		Cakupan keterselenggaraanny a Sosialisasi dan Pembinaan Pengusahaan Pertambangan dan Energi (Laporan)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100	Dinas ESDM
Bidang Perdagangan						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
65	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan	Cakupan Peningkatan Prasarana dan Sarana Kelancaran Distribusi Perdagangan/Pasar tradisional (%)	20	20	100	Disperindag
		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa (%)	20	20	100	Disperindag
Bidang Industri						
66	Peningkatan Daya Saing Industri	Cakupan Penataan Kawasan dan Penguatan Struktur industri (%)	20	20	100	Disperindag
		Cakupan Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Baru Bidang Industri (%)	20	20	100	Disperindag
		Cakupan Peningkatan Mutu/Daya Saing, Stadarisasi dan Sertifikasi Produk (%)	20	20	100	Disperindag
		Cakupan Kemitraan Usaha dan Pengembangan klaster industri (%)	20	20	100	Disperindag
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang						
Bidang Administrasi Pemerintahan						
55	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang Terakomodir dalam Rencana Pembangunan Daerah	100	98,88	98,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan dan Penetapan RAPERDA Serta Keputusan DPRD	100	63,72	63,72	Sekretariat DPRD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Jumlah Dukungan Layanan Komunikasi, Informasi, Publikasi Alat Kelengkapan DPRD dan Sosialisasi Produk Hukum DPRD	100	88,88	88,88	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pembahasan Rapat-rapat DPRD	100	99,77	99,77	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Oleh DPRD Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	100	80,11	80,11	Sekretariat DPRD
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme dan Ketersediaan Tenaga Ahli pendukung AKD	100	100	100	Sekretariat DPRD
		Rasio Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum (%)	100	95,83	95,83	Biro Pemerintahan , Biro ARTP, Biro Umum
		Rasio Fasilitasi Administrasi Pertanahan (%)	100	100	100	Biro BISDA
22	Pembinaan, Pemantapan Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa	2 Dokumen	2 Dokumen	100	Biro Adpem
		terserenggara layanan barang dan jasa secara terpusat	100	100	100	Biro Adpem
		rasio ketersediaan dokumen ketatausahaan Biro	100	100	100	Biro Adpem
		Rasio Kegiatan Fasilitasi LPSE Provinsi Banten (%)	100	100	100	Diskominfo SP
		Koordinasi Pengendalian Inflasi daerah (%)	100			Biro Bina Perekonomian

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Pengembangan dan Peningkatan Lembaga Keuangan daerah	15 Unit			Biro Bina Perekonomian
		Penyusunan Bahan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	10 Dokumen	5 Dokumen	50	Biro Bina Perekonomian
		Pengembangan Pelayanan Publikasi, Kerjasama Jaringan Media dan Informasi	100	100	100	Badan Penghubung
		Peningkatan Pengelolaan Informasi Komunikasi dan Dokumentasi	100	100	100	Badan Penghubung
		Pengelolaan Sistem layanan Informasi Promosi	100	100	100	Badan Penghubung
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas kebijakan bidang kesejahteraan rakyat	16 Dokumen	16 Dokumen	100	Biro Kesra
58	Peningkatan Kesadaran dan Pengembangan Produk Hukum dan HAM	Rasio ketersediaan Dokumen Produk Hukum (%)	20	20	100	Biro Hukum
		Cakupan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (%)	100	100	100	Biro Hukum
56	Penataan kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Rasio ketersediaan Dokumen penataan kelembagaan Perangkat Daerah, Lembaga lain bagian perangkat daerah, Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah. (%)	100	95	95	Biro Organisasi
Bidang Pengawasan						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
70	Pembinaan, Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur.(%)	100	95	95	INSPEKTORAT
Bidang Perencanaan						
19	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	Cakupan ketersediaan Dokumen perencanaan dan	100	100	100	BAPPEDA
		penganggaran pembangunan (%)				
18	Pengendalian Pembangunan Daerah	Cakupan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan (%)	100	100	100	BAPPEDA
		Rasio Pelaporan Pengendalian Pelaksanaan APBD (%)	100	100	100	Biro Adpem
21	Kerjasama Pembangunan Daerah	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah	3 dokumen	3 dokumen	100	BAPPEDA, Biro Pemerintahan
		Koordinasi dan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah dan Luar Negeri	100	83,33	83,33	Biro Pemerintahan
Bidang Keuangan						
54	Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (Rp.)	4.431 T	5.695 T	129	BAPENDA
		Ketersediaan jumlah sistem/data/Dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah (Unit)	2 Unit	2 Unit	100	BAPENDA, BPKAD
		Ketersediaan Sistem/Data/Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Unit)	3 Unit	3 Unit	100	BAPENDA, BPKAD

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
		Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	BAPENDA, BPKAD
		Cakupan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi (%)	100	100	100	BAPENDA, BPKAD
57	Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah	Rasio fasilitasi pengelolaan perlengkapan dan aset daerah (%)	100	31,66	31,66	Biro Umum
		Persentase Pengelolaan Perlengkapan Asset	100	100	100	BPKAD
		Jumlah Kekayaan Daerah (Rp)	7.256 T			BPKAD
Bidang Kepegawaian						
71	Pembinaan Karier dan Layanan Administrasi Kepegawaian Daerah	Rasio Pembinaan dan Kesejahteraan PNS Provinsi Banten .(%)	100	100	100	BKD
		Rasio Pelayanan Administrasi Kepegawaian .(%)	100	95	95	BKD
		Rasio Pengembangan Sumber Daya Aparatur. (%)	100	95	95	BKD
Bidang Pendidikan dan Pelatihan						
67	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Rasio Penyelenggaraan Diklat dan Bimtek Aparatur .(%)	100	96,29	96,29	BPSDM
		Rasio Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur .(%)	100	100	100	BPSDM
Bidang Penelitian dan Pengembangan						

No	Program	Indikator Kinerja	Tahun 2017			Perangkat Daerah
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
20	Penelitian, Pengembangan Kebijakan Strategis, Inovasi Daerah, dan IPTEK	Ketersediaan Dokumen kebijakan hasil Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (%)	100	100	100	BAPPEDA
71 Program		254 Indikator	Rata-rata (%)		108,30	43 PD

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah diatas secara umum pelaksanaan kinerja program sudah berjalan baik, namun masih terdapat 15 indikator kinerja program yang belum tercapai, kondisi tersebut karena beberapa permasalahan yang akan dijelaskan pada sub bab 2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai Tahun Berjalan

Tabel 2.2
Rekapitulasi Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2018

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi TW I TA 2018	
			Fisik	Keuangan
1	Badan Kependidikan Daerah	26.846.714.000	14.08	11.39
2	Badan Kesbangpol	23.656.362.000	13.76	12.92
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.641.985.500	18.12	13.03
4	Badan Pendapatan Daerah	262.910.514.000	15.87	13.60
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.946.759.806.528	2.47	2.47
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	67.890.963.000	13.84	9.97

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi TW I TA 2018	
			Fisik	Keuangan
7	Badan Penghubung	10.302.880.000	26.50	20.36
8	Badan Perencanaan Pembangunan	62.154.400.000	14.79	11.57
9	Biro Administrasi Pembangunan	8.945.000.000	16.66	14.76
10	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan	41.422.852.000	13.88	5.51
11	Biro Infrastruktur	2.384.210.000	14.71	14.24
12	Biro Perekonomian	3.880.000.000	16.32	9.48
13	Biro Hukum	4.247.257.000	25.84	20.11
14	Biro Kesra	5.947.186.000	15.70	9.61
15	Biro Organisasi	2.719.438.000	12.52	5.07
16	Biro Pemerintahan	2.816.260.000	21.46	7.19
17	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	49.746.832.000	11.64	10.58
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.776.220.200	12.24	11.45
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.599.800.000	13.32	5.88
20	Dinas Kesehatan RSUD Banten RSUD Malingping	203.747.378.000 263.581.241.931 77.534.174.069	2.12 11.10 13.61	2.29 6.61 6.90
21	Dinas Ketahanan Pangan	23.519.207.000	22.47	15.18
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.800.074.800	20.24	10.22
23	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	52.995.396.500	15.51	6.42
24	Dinas Koperasi dan UMKM	27.650.973.200	2.60	2.60
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	66.501.100.000	15.96	14.95

No	Perangkat Daerah	Pagu	Realisasi TW I TA 2018	
			Fisik	Keuangan
26	Dinas Pariwisata	31.261.920.000	13.05	12.69
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	29.038.400.000	11.36	9.69
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana	40.613.841.000	9.11	8.59
29	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.685.775.000	11.46	4.20
30	Dinas Pendidikan	1.898.308.177.909	14.05	10.31
31	Dinas Perhubungan	77.077.000.000	14.56	7.08
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	117.371.093.080	6.34	3.63
33	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	31.133.270.000	21.65	12.17
34	Dinas Pertanian	83.392.038.000	19.50	12.26
35	Dinas Sosial	49.295.680.000	12.16	11.22
36	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	482.357.545.000	4.21	1.03
37	Inspektorat	51.892.076.000	14.67	12.05
38	Satpol PP	28.358.400.000	16.44	15.71
39	Sekretariat DPRD	733.578.000.000	18.20	17.23
40	Biro Umum	143.719.959.000	17.01	16.56
41	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.399.559.844.000	1.595	0.707

Berdasarkan tabel diatas Dinas Pekerjaan Umum realisasi fisik dan keuangan yang paling rendah yaitu 1.59% dan 0.707%, dan yang paling tinggi realisasinya yaitu Badan Penghubung dengan realisasi fisik 26.50% dan realisasi keuangan 20.36%.

Rencana Pembangunan di Provinsi Banten tidak hanya didanai

dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari APBN. Adapun perkembangan pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang dikelola oleh Perangkat Daerah Provinsi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Rekapitulasi Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Menurut Perangkat Daerah
Triwulan IV Tahun 2017

No	Perangkat Daerah	Pagu	Penyerapan (Rp)		Penyerapan (Fisik)	
1	BAPPEDA Provinsi Banten	583.546.000	100	92	100	95,50
2	Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Banten	429.052.000	100	56,60	100	60,10
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	2.048.111.000	100	87,14	100	90,64
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten	3.209.321.000	100	99,29	100	100
5	Dinas Kesehatan Provinsi Banten	32.956.499.000	100	86,18	100	89,68
6	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	24.750.180.000	100	99,83	100	100
7	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.293.519.000	100	99,15	100	100
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten	1.354.760.000	100	94,54	100	98,04
9	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	1.719.200.000	100	80,79	100	84,29
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	27.508.220.000	100	86,60	100	90,10
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.300.000.000	100	97,71	100	100

No	Perangkat Daerah	Pagu	Penyerapan (Rp)		Penyerapan (Fisik)	
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	300.000.000	100	94,54	100	98,04
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	17.078.445.000	100	94,89	100	98,39
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.756.129.000	100	96,55	100	100
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.166.191.000	100	94,10	100	97,60
16	Dinas Pertanian Provinsi Banten	26.465.940.000	100	97,89	100	100
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten	874.211.000	100	78,21	100	81,71
18	Dinas Sosial Provinsi Banten	16.971.858.000	100	98,43	100	100
19	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten	6.960.080.000	100	87,83	100	91,33
TOTAL		172.725.262.000	100	92,94	100	96,44

Dari tabel di atas realisasi dana dekonsentrasi sudah cukup baik, untuk realisasi keuangan sebesar 92.94% dan realisasi fisik sebesar 96.44%.

Berikut ini Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018:

Tabel 2.4
Rekapitulasi Alokasi Dekonsentrasi Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

Perangkat Daerah/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Dan Keluarga Berencana Provinsi Banten	2.200.000.000	-	-
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten	304.900.000	-	-
BAPPEDA Provinsi Banten	1.026.431.000	-	-

Perangkat Daerah/Kegiatan	Pagu	Realisasi	
		Rp	(%)
Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Banten	2.609.274.000	-	-
Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Banten	3.352.342.000	-	-
Dinas Kesehatan Provinsi Banten	28.056.802.000	156.195.000	0.56
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten	17.362.900.000	3.156.224.989	18.18
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten	3.510.232.000	-	-
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten	1.315.259.000	-	-
Dinas Pariwisata Provinsi Banten	2.369.665.000	-	-
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten	30.432.189.000	1.961.276.190	6.44
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten	953.008.000	-	-
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten	12.264.718.000	2.296.000	0.02
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten	2.866.565.000	-	-
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten	1.028.568.000	-	-
Dinas Pertanian Provinsi Banten	19.119.151.000	532.900.000	2.79
Dinas Sosial Provinsi Banten	18.889.672.000	-	-
Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Banten	5.453.463.000	-	-
Biro Pemerintahan Setda Provinsi Banten	223.940.000	-	-
Total	153.339.079.000	5.804.300.179	3.79

Dari tabel tersebut penyerapan Triwulan I TA 2018 masih rendah (3.79%) dari pagu Rp153.339.079.000 dengan realisasi sebesar Rp5.804.300.179.

Tabel 2.5
Rekapitulasi Alokasi APBN di Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018

No	Uraian	Pagu	Realisasi	
			Rp	(%)
1	DEKONSENTRASI	153.339.079.000	5.804.300.179	3,79

2	DESENTERALISASI	1.570.105.138.000	47.876.639.400	3,05
	- DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	629.188.785.000	-	-
	- DANA DESA	940.916.353.000	47.876.639.400	5,09
3	KANTOR DAERAH	7.598.890.960.000	533.500.811.386	7,02
4	KANTOR PUSAT	1.703.155.695.000	44.775.053.066	2,63
5	TUGAS PEMBANTUAN	213.851.276.000	1.390.458.297	0,65
Grand Total		11.239.342.148.000	633.347.262.328	5,64

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2017 telah melaksanakan 35 bidang urusan, yaitu 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, 7 Urusan Pilihan, dan 7 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Penyelenggaraan Urusan tersebut dilaksanakan melalui 71 program dan 1.109 kegiatan yang dilaksanakan oleh 43 Perangkat Daerah (PD) sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggaraan Urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, serta Daerah Kabupaten/Kota.

2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Wajib

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar melaksanakan 6 Urusan Bidang 22 program dan 307 kegiatan yang tersebar di 11 (sebelas) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Kesehatan; RSUD Malingping; RSUD Banten; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib

Pelayanan Dasar sebesar Rp2.355.073.727.839 dan realisasi sebesar Rp1.935.179.191.946 atau sebesar 82,17% dengan realisasi fisik sebesar 94,64%. Adapun Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.2.1.1 Urusan Wajib Bidang Pendidikan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan didukung oleh 4 program dan 50 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp592.449.296.232 dan realisasi sebesar Rp490.219.131.468 atau sebesar 82,74% dengan realisasi fisik sebesar 86,37%.

2.2.1.2 Urusan Wajib Bidang Kesehatan

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan didukung oleh 8 program dan 66 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten, RSUD Malingping, dan RSUD Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp394.646.517.690 dan realisasi sebesar Rp293.677.690.064 atau sebesar 74,42% dengan realisasi fisik sebesar 93,26%.

2.2.1.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 5 program dan 84 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.001.898.774.684 dan realisasi sebesar Rp903.624.178.223 atau sebesar 90,19% dengan realisasi fisik sebesar 94,32%.

2.2.1.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman didukung oleh 4 program dan 29 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp256.470.604.638 dan realisasi sebesar

Rp144.205.431.394 atau sebesar 56,23% dengan realisasi fisik sebesar 90,99%.

2.2.1.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat didukung oleh 5 program dan 47 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp62.912.608.000 dan realisasi sebesar Rp57.532.443.425 atau sebesar 91,45% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.2.1.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial didukung oleh 6 program dan 31 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp46.695.926.595 dan realisasi sebesar Rp45.920.317.372 atau sebesar 98,34% dengan realisasi fisik sebesar 99,85%.

2.2.2 Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar melaksanakan 15 Urusan Bidang 25 program dan 290 kegiatan yang tersebar di 40 (empat puluh) Perangkat Daerah, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya tidak melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar adalah : RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp361.175.238.217 dan realisasi sebesar Rp324.918.285.875 atau sebesar 89,96% dengan realisasi fisik sebesar 90,42%.

2.2.2.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan.

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan didukung oleh 5 program dan 25 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten. Alokasi

Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp63.628.690.600 dan realisasi sebesar Rp55.406.482.806 atau sebesar 87,08% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2222 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didukung oleh 3 program dan 13 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.194.733.600 dan realisasi sebesar Rp13.054.070.140 atau sebesar 91,96% dengan realisasi fisik sebesar 99,07%.

2223 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pangan didukung oleh 3 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp9.838.485.000 dan realisasi sebesar Rp9.143.252.523 atau sebesar 92,93% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2224 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan

Hidup didukung oleh 4 program dan 39 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp42.713.347.250 dan realisasi sebesar Rp39.625.790.500 atau sebesar 92,77% dengan realisasi fisik sebesar 99,36%.

2225 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp8.677.192.800 dan realisasi sebesar Rp7.391.717.850 atau sebesar

85,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,07%.

2.2.2.6 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung oleh 1 program dan 9 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.951.566.200 dan realisasi sebesar Rp2.243.011.264 atau sebesar 75,99% dengan realisasi fisik sebesar 87,45%.

2.2.2.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan didukung oleh 3 program dan 24 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp56.548.788.215 dan realisasi sebesar Rp53.259.341.889 atau sebesar 94,18% dengan realisasi fisik sebesar 98,41%.

2.2.2.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan
Informatika

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika didukung oleh 3 program dan 17 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp40.976.956.153 dan realisasi sebesar Rp36.373.395.158 atau sebesar 88,77% dengan realisasi fisik sebesar 98,40%.

2.2.2.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah didukung oleh 5 program dan 23 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.025.619.550 dan realisasi sebesar Rp14.802.718.871 atau

sebesar 86,94% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.2.2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal didukung oleh 4 program dan 18 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp20.855.061.750 dan realisasi sebesar Rp17.539.661.856 atau sebesar 84,10% dengan realisasi fisik sebesar 90,01%.

2.2.2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga didukung oleh 4 program dan 26 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp39.513.373.900 dan realisasi sebesar Rp36.953.791.234 atau sebesar 93,52% dengan realisasi fisik sebesar 97,81%.

2.2.2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik didukung oleh 1 program dan 41 kegiatan yang dilaksanakan pada 40 Perangkat Daerah Provinsi Banten, sedangkan 3 (tiga) Perangkat Daerah lainnya yang tidak melaksanakan Urusan di Bidang Statistik adalah RSUD Malingping dan RSUD Banten, dan Dinas Sosial Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.773.347.000 dan realisasi sebesar Rp14.384.550.378 atau sebesar 80,93% dengan realisasi fisik sebesar 97,42%.

2.2.2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan didukung oleh 1 program dan 5 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp7.029.378.049 dan realisasi sebesar Rp6.540.063.400 atau sebesar 93,04% dengan

realisasi fisik sebesar 96%.

2.2.2.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan didukung oleh 4 program dan 12 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.852.965.650 dan realisasi sebesar Rp14.773.785.006 atau sebesar 93,19% dengan realisasi fisik sebesar 98,87%.

2.2.2.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan

Pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.595.732.500 dan realisasi sebesar Rp3.426.653.000 atau sebesar 95,30% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2.3 Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 189 kegiatan yang tersebar di 6 (enam) Perangkat Daerah, yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pilihan sebesar Rp137.159.121.419 dan realisasi sebesar Rp125.288.963.312 atau sebesar 91,35% dengan realisasi fisik sebesar 97,88%.

2.2.3.1 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan didukung oleh 3 program dan 30 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.867.814.050 dan realisasi sebesar Rp12.886.214.027 atau sebesar 81,21% dengan realisasi fisik sebesar

94,25%.

2.2.3.2 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata didukung oleh 4 program dan 19 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp21.490.544.470 dan realisasi sebesar Rp19.608.547.122 atau sebesar 91,24% dengan realisasi fisik sebesar 95,25%.

2.2.3.3 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian didukung oleh 6 program dan 78 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.983.086.124 dan realisasi sebesar Rp47.263.987.082 atau sebesar 94,56% dengan realisasi fisik sebesar 98,32%.

2.2.3.4 Urusan Pilihan Bidang Kehutanan

Pada Urusan Pilihan Bidang Kehutanan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.016.000.000 dan realisasi sebesar Rp971.512.500 atau sebesar 95,62% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2.3.5 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral

Pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp30.256.976.000 dan realisasi sebesar Rp26.932.350.780 atau sebesar 89,01% dengan realisasi fisik sebesar 99,74%.

2.2.3.6 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan didukung oleh 1 program dan 11 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.801.070.950 dan realisasi sebesar Rp3.541.279.846 atau sebesar 93,17% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2.3.7 Urusan Pilihan Bidang Industri

Pada Urusan Pilihan Bidang Industri didukung oleh 3 program dan 21 kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp14.743.629.825 dan realisasi sebesar Rp14.085.071.955 atau sebesar 95,53% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

2.2.4 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang melaksanakan 7 Urusan Bidang 15 program dan 323 kegiatan yang tersebar di 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah, yaitu: Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penghubung, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Inspektorat Provinsi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Pemerintahan dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

Alokasi Anggaran Belanja Langsung pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang sebesar Rp718.349.233.721 dan realisasi sebesar Rp586.327.145.530 atau sebesar 81,62% dengan realisasi fisik sebesar 97,35%. Adapun Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017, sebagai berikut :

2.2.4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan didukung oleh 6 program dan 144 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung, Biro Pemerintahan, Biro

Umum, Biro Hukum, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, Biro Bina Perekonomian, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Sekretariat DPRD Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp393.291.522.074 dan realisasi sebesar Rp353.474.491.952 atau sebesar 89,88% dengan realisasi fisik sebesar 97,60%.

2.2.4.2 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp49.932.228.652 dan realisasi sebesar Rp46.308.207.555 atau sebesar 92,74% dengan realisasi fisik sebesar 98,96%.

2.2.4.3 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan didukung oleh 1 program dan 2 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp3.399.387.000 dan realisasi sebesar Rp2.039.748.000 atau sebesar 60% dengan realisasi fisik sebesar 87,32%.

2.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.3.1 Permasalahan Bidang Pendidikan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan khusus yang terjadi terkait pelaksanaan kegiatan dengan serapan rendah yaitu :

1. Pada Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran rendah disebabkan adanya efisiensi, meliputi : Efisiensi sisa kontrak atas pengadaan barang dan jasa, akomodasi sewa Kamar/Tempat Penginapan dan uang saku peserta, Belanja Listrik dan Belanja Jasa Tenaga Kerja Lepas, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan, belanja makan minum, Telepon/Faksimili/Internet, listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas, Belanja Jasa Tenaga Kerja Lapangan, dan adanya keterlambatan administrasi;
2. Program Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun pada Kegiatan yang serapannya rendah, meliputi:
 - Kegiatan Peningkatan Mutu dan Akses Sarana Prasarana SMK terdapat satu tolok ukur (pengadaan buku perpustakaan) tidak direalisasikan karena sudah tidak relevan dengan kurikulum terbaru;
 - Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pendidikan terkendala pada pengiriman peserta pelatihan bagi operator data GTK di SMK/SMA harus PNS;
 - Kegiatan Pengembangan SDM Pendidikan terdapat Efisiensi kontrak atas pengadaan Bahan US, Blanko Ijazah, dan SKHUS SD/MI, SDLB dan Paket A/ULA Tahun Pelajaran 2016/2017 dan efisiensi akomodasi;

Permasalahan secara umum pada pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:

1. Masih belum maksimalnya koordinasi dan sinkronisasi antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, sehingga sering terjadi miskomunikasi mengenai prioritas pendidikan yang harus dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota semenjak diberlakukannya otonomi daerah. Salah satu contoh masalah adalah belum optimalnya komunikasi antar Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menanggapi masalah-masalah pembangunan pendidikan di tiap Kabupaten/Kota.
2. Desentralisasi pendidikan membutuhkan pembiayaan dana yang tidak kecil sehingga pembangunan pendidikan harus berakar dari masyarakat dan tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada Pemerintah. Namun demikian, di Provinsi Banten masih banyak Kabupaten/Kota yang mengandalkan bantuan atau alokasi pembangunan pendidikan dari

Provinsi sehingga memperlambat upaya kemandirian daerah dalam pembangunan pendidikan;

3. Masih belum meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat khususnya di daerah pedesaan akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka sehingga penghargaan atas pendidikan sebagai investasi masa depan di kalangan sebagian masyarakat di Provinsi Banten masih sangat rendah sehingga himbauan Pemerintah untuk mensekolahkan anak didik ke jenjang yang lebih tinggi kurang mendapat respon positif dari masyarakat;
4. Jumlah siswa tidak sebanding dengan jumlah ruang kelas yang tersedia (kekurangan daya tampung siswa);
5. Penyediaan lahan untuk pembangunan sekolah baru tidak mudah untuk dapat dipenuhi, hal ini karena mahalnya harga lahan, terutama di daerah perkotaan dan industri;
6. Masih banyak anak usia sekolah yang belum seluruhnya dapat bersekolah baik pada jalur Informal maupun non formal;
7. Masih banyak anak usia sekolah yang berkebutuhan Khusus belum dapat bersekolah;
8. Rasio buku dan siswa belum sesuai dengan kebutuhan (1:1);
9. Nilai rata-rata ujian sekolah masih belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan dengan angka/jumlah lulusan yang belum mencapai 100% pada SMA dan SMK;
10. Masih banyaknya kualifikasi pendidikan guru yang belum sesuai kelayakan mengajar, terutama tingkat pendidikan dasar;
11. Lulusan sekolah kejuruan belum sepenuhnya sesuai dengan tuntutan dunia kerja (masih banyak lulusan sekolah kejuruan yang belum siap kerja) dan belum mampu menciptakan lulusan kejuruan yang siap untuk mandiri/menciptakan lapangan kerja sendiri (berjiwa entrepreneurship);
12. Sering berganti kebijakan pada penerapan kurikulum pendidikan. Kurikulum KTSP belum berjalan efektif, saat sudah berganti kembali ke Kurikulum tahun 2013 (K-13);
13. Masih rendahnya SMP/MTs walaupun adanya program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Wajar 12 Tahun;
14. Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah;
15. Kekurangan tenaga pengajar dan kualifikasi pendidikan belum memadai (mis match);

16. Belum baiknya sistem pengawasan pendidikan termasuk dalam menjamin kualitas pendidikan;
 17. Dukungan terhadap MBS/MPMBS dari pihak sekolah masih kurang;
 18. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan;
 19. Masih ada sekolah yang belum representatif sesuai dengan standar nasional;
 20. Tanah tidak sesuai dengan standar nasional, masih ada yang belum memiliki lapangan upacara dan lapangan olahraga dan perpustakaan;
 21. Dana bantuan DAK untuk tiap sekolah masih kurang dibandingkan dengan harga bahan bangunan pada saat ini.
- b. Solusi dari permasalahan umum tersebut diatas, antara lain :
1. Perlu penambahan daya tampung melalui pembangunan/penambahan ruang kelas baru;
 2. Perlu penyediaan dana yang lebih besar untuk pengadaan lahan UGB/USB baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
 3. Perlu dibangun unit sekolah baru, penambahan ruang kelas atau pembukaan kelas jauh, atau sekolah satu atap;
 4. Pada jalur non formal, perlu dikembangkan program kejar paket (A, B, dan C melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (KBM);
 5. Perlu adanya penambahan jumlah buku untuk rasio siswa/buku 1:1 melalui program BOS Buku dan pendampingan melalui APBD;
 6. Anggaran untuk pembangunan perpustakaan dan runag penunjang lainnya dan pemenuhan media/alat pendidikan perlu ditingkatkan, baik yang bersumber dari APBD dan APBN;
 7. Perlu ditingkatkan kualitas tenaga pendidik melalui program diklat/penataran/lokakarya dan peningkatan/penambahan sarana prasarana PBM/KBM (media pendidikan, alat pendidikan atau alat peraga pendidikan lainnya);
 8. Harus dilakukan upaya pemerataan guru, diimbangi dengan peningkatan sarana prasarana pendukungnya dan peningkatan kesejahteraan guru dan penyetaraan pendidikan guru ke lembaga LPTK yang telah diakui baik melalui sumber pendanaan Pemerintah Pusat dengan tugas belajar ataupun dengan swadana;
 9. Perlu dioptimalkan kembali pola pendidikan sistem ganda yang ada di sekolah kejuruan melalui optimalisasi kesepakatan (MoU) antara pihak

sekolah dengan dunia industri/kerja dan penyempurnaan kurikulum sekolah kejuruan yang lebih menekankan pada kebutuhan dan tuntutan *oriented life skill*;

10. Mengintensifkan kemitraan secara berkesinambungan melalui forum sosialisasi dengan membangun kapasitas stakeholders dan pembinaan manajemen pendidikan dalam berbagai diklat dengan meningkatkan tata kelola dan advokasi kelembagaan serta dengan melakukan pengadaan sarana prasarana penunjang dan pembinaan SDM yang membidangi secara intensif;
11. Dana bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan bagi pendidikan dasar (SD-SMP-SMA) diupayakan adanya penambahan jumlah alokasi anggaran mengingat masih banyaknya siswa SD-SMP yang tidak mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan alasan tidak mampu;
12. Bantuan pendidikan/beasiswa dari Dinas Pendidikan Provinsi dan bantuan khusus murid (BKM) bagi pendidikan menengah diupayakan

peruntukannya tidak hanya kegiatan belajar mengajar (KBM) akan tetapi dapat digunakan sebagai transport siswa, mengingat akses pendidikan menengah belum menjangkau di setiap kecamatan, sehingga siswa berpotensi putus sekolah dapat diselamatkan;

13. Perlunya kualifikasi pendidikan guru secara berkala, diklat guru mata pelajaran dan pengangkatan guru sesuai dengan kebutuhan;
14. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan melalui program terpadu monitoring dan evaluasi;
15. Meningkatkan kesiapan sekolah, kemampuan kepala sekolah dan guru, periodisasi SDM dan akreditasi lembaga dengan cara sertifikasi dan advokasi;
16. Meningkatkan peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan serta pengembangan networking dengan stakeholders pendidikan didanai oleh Pusat dan Provinsi;
17. Perlu perbaikan sarana dan prasarana sekolah yang memadai;
18. Perlu penambahan tanah atau dengan merelokasi ke tempat yang strategis dengan cara merevitalisasi gedung sekolah dasar yang lebih representatif.

2.3.2 Permasalahan Bidang Kesehatan

- a. Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten, adalah:
Permasalahan
 1. Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat terkait dengan Jumlah sasaran 982.242 bayi & balita, balita & bayi yang datang ke posyandu 707.661, Karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemantauan pertumbuhan di posyandu;
 2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak untuk indikator Kinerja persentase ibu bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih (cakupan PN) sebanyak 82% belum tercapai dari target 90%, yang belum tercapai 7,60% karena Penempatan Sumber Daya Kesehatan (Medis) tidak merata (tidak semua desa ditempati bidan) sehingga pertolongan persalinan masih ditolong oleh dukun dan Kurang terampilnya tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan persalinan belum adanya kesadaran ibu bersalin dan keluarganya untuk bersalin di tolong oleh nakes. Capaian

Kunjungan Neonatal pertama (KN1) sebanyak 88.4% belum tercapai dari target 90%, yang belum tercapai 1,60% karena masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun sehingga kunjungan Neonatal pertama tidak dilakukan;

3. Kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan terkendala masih adanya penolakan masyarakat terhadap pemberian imunisasi bagi bayi serta permasalahan pada mata rantai (cold chain) vaksin yang belum tercukupi mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Hingga Posyandu. Dari segi Tenaga Kesehatan, masih banyak SDM yang belum terlatih;
4. Kendala yang dihadapi pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan dimana masih banyaknya sarana air minum yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi syarat kesehatan, serta pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan air minum di masyarakat belum optimal yang diperburuk karena belum optimalnya/tidak berperannya Badan Pengelolaan sarana air minum dan sanitasi dikelompok masyarakat;
5. Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang terkendala masih adanya kasus malaria dapat diakibatkan karena masyarakat/suspek terkena *vector* nyamuk di daerah diluar Provinsi Banten tetapi terdeteksi pada Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten (*Malaria Import*);
6. Kegiatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pemenuhan obat Buffer stock diantaranya diakibatkan oleh sistem penyediaan barang/jasa „E- Katalog’. Pada pemesanan obat E-Katalog ada beberapa penyedia yang melakukan penolakan pemesanan dikarenakan kekosongan stok;
7. Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan Telah dilaksanakan 88,89%, diakibatkan adanya pekerjaan atau tolok ukur Penyusunan FS Pembangunan RS di Banten Selatan senilai Rp400.000.000 dikarenakan tidak cukup waktu pelaksanaan;
8. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin melalui tolok ukur bakti sosial operasi bibir sumbing dan operasi katarak, terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan permintaan dari

Kabupaten/Kota maupun pihak yang memerlukan kegiatan bakti sosial;

9. Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Pekerja dan Masyarakat di Lingkungan Kerja Pekerjaan Telah dilaksanakan 90%, adapun permasalahan diakibatkan adanya efisiensi pada anggaran belanja Obat, dikarenakan Ketersediaan obat di perusahaan penyedia obat tidak ada, obat yang dibutuhkan sudah tidak ada di pasaran, serta terdapat beberapa persyaratan untuk pengadaan obat belum terpenuhi;
10. Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Kantor Pekerjaan Telah dilaksanakan 73,26%, hal ini dikarenakan terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan terkait rekomendasi inspektorat tentang metode pelaksanaannya yaitu pada anggaran perubahan sudah dianggarkan pada pengadaan langsung, akan tetapi sesuai dengan tidak ada anggaran untuk pengawasan, anggaran yang tidak terserap pada kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor;
11. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah penyerapan anggaran sebesar 62,85% dikarenakan anggaran digunakan pada perjalanan dinas luar daerah yang direncanakan lebih besar dibandingkan dengan undangan/perjalan dinas yang ada pada Tahun 2017;
12. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sebesar 76,11%, terdapat perbedaan harga “harga lebih rendah dibandingkan harga satuan pada DPA (Pagu) yaitu pada belanja mesin kasir, kursi kerja dan alat kedokteran umum, selain hal tersebut terdapat penolakan pada E- katalog yaitu Alat Kedokteran Umum Minor Surgery, Film Viewer, Circumsisi pada salah satu items dan item Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Tempat Tidur Pasien, dan Partus Set;
13. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Kesehatan Kerja Masyarakat realisasi fisik sudah dilaksanakan sebesar 90,58%, adapun penyerapan yang rendah disebabkan oleh efisiensi anggaran pada Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional dan Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK);

14. Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat pada tolak ukur Penyediaan Jasa Perkantoran (Non PNS) sebesar 60,18%, Belum dilaksanakan penerimaan pegawai non PNS dikarenakan operasional BKKM belum dibuka 24 Jam sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Pada Belanja Jasa Listrik Tagihan tidak sesuai dengan rencana penambahan daya;
15. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebesar 42,04% dan realisasi fisik mencapai 51,25%, adapun permasalahan yaitu tidak ada kesesuaian pada belanja Pengiriman Kursus-kursus, Belanja kursus tidak bisa dilaksanakan oleh pegawai Non PNS sehingga penyerapan hanya pada pegawai PNS dengan Jumlah sebanyak 12 Orang pelaksana;
16. Kegiatan Koordinasi dan konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah pada Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Penyerapan anggaran sebesar 24,88%, rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan perjalanan luar daerah karena undangan dari Pusat terbatas sehingga dana dana perjalanan Dinas yang direncanakan tidak dapat direalisasikan, dana Perjalanan dinas untuk menunjang kapasitas aparatur tidak dapat direalisasikan sepenuhnya dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan lebih singkat dari yang direncanakan, mempedomani DOMLAK bahwa Perjalanan Dinas maksimal dilaksanakan 2 orang sedangkan direncanakan sebanyak 3 orang sehingga terdapat rasionalisasi petugas yang melaksanakan perjalanan dinas;
17. Persentase kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan data pada Tahun 2017 terhadap Kegiatan Pengendalian Penyakit Menular Langsung terdapat beberapa kasus yang selesai pengobatan namun tidak melakukan pemeriksaan Laboratorium untuk memastikan kesembuhan sehingga belum dapat dievaluasi, masih terdapat pasien TB yang gagal pengobatan dikarenakan ketidak patuhan dalam minum obat, pindah dan meninggal;
18. Permasalahan dalam hal peningkatan kesehatan jiwa diantaranya adalah Kesehatan jiwa belum menjadi program prioritas, Kompetensi tenaga kesehatan yang masih minim baik pada tatanan

pelayanan primer maupun sekunder, Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan jiwa masih rendah;

19. Kegiatan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Kebijakan kesehatan kerja dan kesehatan olahraga belum menjadi prioritas, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kesjaor dilapangan, Belum optimalnya sosialisasi dan advokasi kesehatan kerja bagi pekerja formal dan informal, Belum semua perusahaan menerapkan K3 dengan baik dan optimal, Belum terbentuknya tim kesehatan kerja di Tk. Provinsi, sehingga masing-masing sektor blm terpadu menjadi satu kesatuan, Pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan masih minim mengenai kesehatan kerja dan olahraga, Masih terbatasnya kemampuan SDM dalam kapasitas kesehatan kerja dan olahraga, Masih minimnya sarana prasarana penunjang kesehatan kerja dan olahraga.

Solusi

1. Solusi pada Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat agar diberikan penghargaan untuk Kader agar Lebih semangat Melakukan Pendampingan Pada Ibu Balita untuk datang Ke Posyandu, dan dilakukannya Peningkatan penyuluhan kepada masyarakat;
2. Solusi pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi dan Kegiatan Pelayanan kesehatan anak dilakukan dengan terbentuknya rumah tunggu kelahiran, Penempatan tenaga kesehatan yang merata, dan Fasilitas kesehatan yang memadai;
3. Solusi dari kegiatan Surveilans Epidemiologi, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan, antara lain:
 - Dilakukan Pelatihan imunisasi bagi petugas yang belum terlatih;
 - Sosialisasi dan Advokasi bagi masyarakat yang masih ragu/takut untuk pemberian imunisasi bagi bayi. (melalui tokoh masyarakat, PKK, dll;
 - Revitalisasi dan peningkatan kapasitas Tim Gerak cepat dalam respon KLB;
 - Pengembangan sistem dan penguatan jejaring Surveilans di level komunitas/masyarakat;
 - Penguatan kapasitas petugas SKDR berbasis algoritma penyakit potensial KLB.

4. Solusi dari permasalahan pada Kegiatan Penyehatan Lingkungan adalah dengan Meningkatkan peran serta masyarakat (Pemberdayaan) dalam perbaikan sarana, penyediaan teknologi tepat guna air minum dan pelatihan TTG ke masyarakat/badan BPSPAMS.
 5. Sebagai masukan/usulan dalam peningkatan upaya pengendalian Penyakit tidak menular yaitu diperlukannya pengembangan baik dari segi SDM maupun sarana dan prasarana untuk pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular terpadu, serta menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan langkah “CERDIK”.
- b. Permasalahan dan Solusi RSUD Malingping
1. Permasalahan Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyerapan anggaran sebesar 77% dikarenakan Tidak adanya dokter spesialis Residen pada kode rekening Non PNS yang bekerja di RSUD Malingping sehingga anggaran untuk pembayaran dokter tersebut tidak terserap. Selain hal tersebut Belanja yang tidak terserap yaitu: pemulasaran jenazah; sewa rumah/gedung/tempat kerja; sewa mobilitas; pemberian hadiah; dokumentasi/dekorasi/promosi publikasi;
 2. Pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin penyerapan Anggaran sebesar 50,68% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber pengobatan gratis dan rapat siang kinik;
 3. Pada Kegiatan Penatausahaan, Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan penyerapan Anggaran sebesar 69,75% dikarenakan Efisiensi dari belanja honorarium narumber sebanyak 5 kegiatan rapat pertemuan.
 4. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 79,74% hal ini disebabkan belanja yang digunakan sesuai dengan kebutuhan operasional pelayanan RSUD Malingping.

Solusi

Solusi yang harus dilakukan kedepan dalam penyusunan rencana anggaran kegiatan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan.

c. Permasalahan dan Solusi RSUD Banten Permasalahan

1. Pada Kegiatan Pelayanan kesehatan BLUD realisasi fisik 100% sesuai dengan target pendapatan BLUD. Pada belanja kegiatan yang bersumber dari pendapatannya sebesar 36,81% hal ini disebabkan Proses tahun pertama pola PPK BLUD terdapat beberapa aturan masih di susun, serta kehati-hatian pengelola dalam menyelenggarakan kegiatannya;
2. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor penyerapan Anggaran sebesar 57,31% dikarenakan pada belanja Suku cadang, alat dari vendor yang sesuai spesifikasi yang diinginkan terbatas (Pelayanan Mata dan Gigi) dan kebutuhan berbeda dengan pengajuan serta adanya sisa kontrak;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerah dan keluar daerah penyerapan Anggaran sebesar 79,32% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih besar dari yang direncanakan;
4. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) penyerapan Anggaran sebesar 66,2% dikarenakan terdapat dua pekerjaan Gagal lelang yaitu: Pengadaan IPAL dan Genset terkendala karena belum tersedianya rumah genset serta tidak cukup waktu pelaksanaanya;
5. Pada Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (DPA Kewajiban TA.2016) penyerapan Anggaran sebesar 43,55% dengan pekerjaan pembangunan gedung 9 lantai, hal tersebut dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI dan sesuai surat Inspektorat No.700/783.1-Inspektorat/2017 tanggal 06 Oktober 2017 bahwa nilai pagu kewajiban dibayarkan (terrealisasi) bila pembangunan gedung selesai di bangun namun pembangunan gedung tidak jadi dilaksanakan;
6. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RS (DAK) DPA Kewajiban penyerapan Anggaran sebesar 47,63% dikarenakan adanya rekomendasi BPK - RI bahwa pembayaran

pembangunan gedung rawat inap dibayarkan sesuai dengan kebutuhan;

7. Pada Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran penyerapan Anggaran sebesar 79,81% dikarenakan anggaran yang dibutuhkan lebih kecil dari rencana terutama di jasa Non PNS dan jasa kebersihan;
8. Pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, capaian 94% dikarenakan penyediaan peralatan jaringan SIM RS yang tidak cukup waktu untuk di lelang dan penyedia tidak bisa menyediakan alat sesuai dengan spesifikasi yang di pesan;
9. Pada Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, capaian 68,51% pada kegiatan pemeliharaan alat kesehatan suku cadang alat dari vendor yang sesuai spec terbatas dan kebutuhan berbeda dengan pengajuannya, dari sebelas (11) uraian kegiatan terlaksana 8 kegiatan, sedang 3 (tiga) uraian kegiatan terlaksana sesuai dengan kebutuhan;

Solusi

1. Dibutuhkan Evaluasi perencanaan RBA dan segera menyelesaikan aturan aturan administrasi pengelolaan BLUD nya;
2. Membuat perencanaan kegiatan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dan out put kegiatan yang diharapkan;
3. Membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan standar satuan harga yang sudah di tetapkan;
4. Untuk pengadaan IPAL dan Genset serta Rumah Genset pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan RSUD Banten (DAK) dianggarkan di DPA Tahun 2018;
5. Sinkronisasi yang baik dalam perencanaan kegiatan pada bidang dan bagian agar teranggarkan atau menghindari dobel pembiayaan;
6. Pelaksanaan lelang harus dipersiapkan matang dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga penyerapan anggaran dapat tercapai sesuai jadwal kegiatan dan target.

2.3.3 Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak mencapai target disebabkan terdapat kendaraan yang rusak berat dan akan dihapuskan;

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan tuisi ke PU- an;
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang terdapat efisiensi sisa kontrak;
4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada Balai Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Wilayah Pandeglang tidak tercapai disebabkan :
 - kelebihan anggaran dari premi asuransi barang milik daerah;
 - untuk jasa servis dan penggantian suku cadang sebagian kendaraan rusak berat dan tidak memungkinkan untuk diserap;
 - Terdapat kelebihan anggaran untuk pajak kendaraan bermotor;
 - Terdapat efisiensi sisa kontrak dari pemeliharaan bangunan gedung tempat kerja;
 - Terdapat Kendaraan roda tiga yang mengalami rusak berat.
5. Kegiatan Pembangunan Jembatan Terdapat perpanjangan waktu selama 50 hari untuk pekerjaan Penggantian Jembatan pada Ruas Jalan Saketi-Malingping (9 Jembatan);
6. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan tidak Tidak cukup waktu dalam melaksanakan kegiatan karena adanya penambahan paket pekerjaan (52 paket terealisasi sebanyak 26 Paket);
7. Penetapan SOTK baru pada tahun 2017 dan pelantikan Kepala OPD baru dilaksanakan pada bulan Januari minggu ketiga dan pelantikan PPTK pada minggu keempat. Hal ini turut menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Lelang yang direncanakan mulai bulan Januari, baru dapat diusulkan ke ULP pada bulan April 2017. Pengajuan lelang ke ULP menunggu penetapan surat keputusan pejabat pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada struktur organisasi baru yang terbit pada bulan Maret.
9. Beberapa paket pekerjaan di anggaran murni memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari 7 (tujuh) bulan, sehingga sisa waktu yang ada tidak cukup untuk melaksanakan lelang dan pekerjaan

kontruksi. Lelang yang direncanakan Januari agar terkontrak bulan Maret, lelang baru terlaksana bulan April.

10. Waktu pelaksanaan anggaran perubahan yang terbatas untuk melakukan lelang dan pelaksanaan konstruksi sehingga ada beberapa pekerjaan tidak terserap optimal dan ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan.
11. Permasalahan non teknis dilapangan terkait dengan masyarakat dan instansi terkait. Dalam pengadaan lahan kebinamargaan, warga menolak harga ganti rugi yang ditetapkan Tim appraisal. Dalam kegiatan pengamanan pantai, pemilik lahan tidak mengijinkan lahan digunakan akses jalan kendaraan proyek. Hal ini menyebabkan pekerjaan kontruksi tidak dapat dilanjutkan.
12. Aturan baru tentang pencairan GU dan TU pada domlak APBD. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan 2017 tentang UP dan TU yang mengharuskan revolving minimal 75% dari UP yang telah dipertanggungjawabkan.
13. Kegiatan Pengadaan Lahan Pengairan Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air yang dianggarkan di APBD Murni Tahun Anggaran 2017 ditunda pelaksanaannya dengan pertimbangan berikut:
 - a. Pelaksanaan persiapan pengadaan lahan pad APBD-P 2017 tidak dapat dilaksanakan karena belum ada izin lingkungan dari Bupati Pandeglang sehingga menghambat proses penyusunan dokumen perencanaan (dalam dokumen UKL/UPL dari Kegiatan Dinas SDAP TA.2016 hanya dikeluarkan rekomendasi dari Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang);
 - b. Pembebasan lahan di DI Cikadueun tidak dapat dilaksanakan karena dalam studi komprehensif/studi kelayakan, batasan lokasi yang akan dibebaskan hanya sampai pada saluran induk (primer) saja, dikhawatirkan pengelolaan kurang optimal. Pembebasan seharusnya sampai pada jaringan tersier sehingga penanganan DI menyeluruh sampai lahan petak pertanian (single managemen);
 - c. Bidang PJPA mulai tahun 2017 hingga tahun kedepan lebih berkonsentrasi untuk menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi daerah irigasi eksisting hingga mencapai kondisi baik 100% dan

- didukung oleh kegiatan pengendalian dan pemeliharaan pada setiap DI kewenangan Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh Balai PSDA Provinsi Banten;
- d. Setelah tercapai kondisi DI baik 100% dan setiap DI terpelihara dan terkendalikan dengan baik maka akan dilakukan pengembangan DI baru (DI Cikadueun, DI Cihara, DI Cipatujah, DI Ciseukeut, DI Cibama, DI Cibareno dan DI Cimadur).
14. Kegiatan Perencanaan Teknis Bidang PJSA tahun anggaran 2017 mempunyai anggaran pengadaan lahan Sungai Cilimer. Pekerjaan ini tidak dilaksanakan dan anggaran tidak terserap dengan pertimbangan berikut:
- a. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau disebutkan bahwa:
- Bab II pasal 6 huruf 3 Garis Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur
 - BAB IV Ketentuan Peralihan Pasal 26 huruf c bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai dan sempadan danau yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai dan sempadan danau.
- b. Hasil koordinasi dengan Kepala Bagian Penyusunan Perundang-Undang II Biro Hukum Sekjen Kementerian PUPR sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR 28/PRT/M/2015:
- Tanah sempadan yang diperoleh dengan benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan (yang sudah mempunyai sertifikat bisa diganti rugi)
 - Tanah yang belum jelas kepemilikannya (Tidak mempunyai sertifikat atau girik) *tidak boleh ada ganti rugi tanah sempadan*, yang diperbolehkan *ganti rugi kerohiman* untuk tegakan maupun bangunan yang berada di atasnya.
 - Perhitungan kerohiman harus melalui Penaksir Harga Apraisal

- Tanah sempadan sungai bisa disertifikasi atas nama Pemerintah.
 - c. Hasil koordinasi dengan Kasubag Evaluasi dan Pengawasan Produk HUKUM Kab/Kota Biro Hukum Provinsi Banten, sesuai dengan pasal 26 huruf c Permen PU 28/PRT/M/2015 yaitu untuk *sempadan sungai tidak perlu pembebasan lahan*.
15. Kegiatan Pengawasan Teknis Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air terdapat 3 paket pekerjaan konsultan pengawas tidak dilaksanakan karena pekerjaan fisik tidak dilaksanakan;
16. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi (DAK) tidak dilaksanakan pada pekerjaan Pembangunan DI Cihara. Adapun terkendala pengadaan lahan, yaitu:
- a. Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Bendung dan Bangunan Pengambilan Intake Daerah Irigasi Cihara yang dilaksanakan pada TA.2016 belum sepenuhnya diselesaikan dan fungsional sehingga pekerjaan saluran induk yang sudah dianggarkan pada TA 2017 tidak dapat dikerjakan.
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) Tujuan tertentu No 700/063-Inspektorat/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 disarankan:
 - Pekerjaan di Daerah Irigasi Cihara tidak dilanjutkan sementara karena dinilai Pekerjaan Pembangunan Bendung Daerah Irigasi Cihara tidak efektif dan efisien serta belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar;
 - Apabila pekerjaan dilanjutkan, pekerjaan harus dilakukan secara menyeluruh dengan kontrak multiyear;
 - Perlu didesain ulang secara komprehensif dari aspek ketersediaan air, jaringan irigasi dan pemanfaatannya.
 - c. Hasil konsultasi dengan Puslitbang Sumberdaya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat direkomendasikan untuk dilakukan stock opname serta dilengkapi analisa hidrologi, hidrolika dan geoteknik yang lebih mendalam terkait kejadian rubuhnya retaining wall;
 - d. Keterbatasan waktu yang tersisa dan tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran, sehingga Pekerjaan Pembangunan Saluran Induk DI Cihara (DAK) tidak dapat

dilaksanakan dan tidak dapat disarap anggaran pada tahun 2017.

17. Kegiatan pengadaan lahan kebinamargaan di beberapa lokasi masih belum terserap/terrealisasi sesuai yang direncanakan. Adapun kendala dalam pengadaan lahan yaitu:
 - a. Pengadaan Ruas Jalan Siliwangi (Pamulang):
 - Terdapat tanah PLN dengan status Barang Milik Negara (BMN). Perlu surat dari Direksi PLN mengenai rekomendasi pembongkaran/hibah lahan.
 - Terdapat 2 (dua) persil lahan yang belum jelas kepemilikannya.
 - b. Pengadaan Tanah pengganti yang diusulkan Pengadilan Agama tidak jelas status kepemilikannya sehingga perlu dicari usulan tanah yang lain.
 - c. Warga menolak hasil penilaian Tim appraisal terhadap lahan yang diusulkan untuk pengganti Kecamatan Kopo dan Desa Nanggung. Akibat penolakan ini proses pengadaan tanah tidak dapat terealisasi sesuai yang direncanakan.
 - d. Pengadaan Tanah di ruas Sempu-Dukuh Kawung:
 - Terdapat 4 tanah wakaf yang harus ruislag sesuai dengan Undang-Undang Wakaf dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Banten dan Kementerian Agama Pusat.
 - Ada tanah Aset Pemerintah yaitu Kepolisian
 - e. Pengadaan Tanah di Ruas Jalan Palima-Pakupatan
 - Terdapat tanah milik swasta Perumahan BMS yang belum jelas status lahan sebagai Fasum/Fasos atau bukan;
 - Ada tanah wakaf berupa masjid, dan terdapat salah satu tanah milik warga yang menolak hasil penilaian Tim Appraisal.
18. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Lebak terdapat Efisiensi dari sisa kontrak pengadaan *Excavator Long Arm, Wheel Excavator Mini, breaker*;
19. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Bahan-Bahan Kebinamargaan Wilayah Tangerang Terdapat Pembatalan Kontrak untuk pengadaan Compressor + Jack Hammer, karena barang yang dikirim tidak sesuai spesifikasi yang tercantum dalam kontrak;

20. Pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai progres fisik dan penyerapan anggaran kecil. Hal ini disebabkan karena tidak dapat diselesaikannya Pembangunan Pengaman Pantai Carita (Lanjutan). Dalam pelaksanaan pembangunan pengaman Pantai Carita (Lanjutan), pihak kontraktor tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah di Kawasan Lombok 2 Pantai Carita untuk menggunakan atau memanfaatkan lahan/tanah sebagai akses jalan kegiatan proyek;
21. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Ruang Terdapat kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan (Review dan Harmonisasi Master Plan Kawasan Banten Lama), karena terkendala waktu.

b. Solusi

Solusi yang dapat disampaikan dari permasalahan-permasalahan tersebut, meliputi :

1. Pemanfaatan belanja aparatur hendaknya diarahkan agar lebih efisien, efektif, realistis, dan proporsional;
2. Proses perencanaan harus dibuat lebih matang dan lebih baik lagi serta lebih terukur, sehingga dalam pelaksanaannya dilapangan tidak menimbulkan permasalahan;
3. Proses pembebasan lahan melibatkan banyak pihak (masyarakat pemilik lahan, BPN dan konsultan appraisal). Perlu peningkatan koordinasi antar pihak terkait sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan lebih cepat;
4. Penganggaran kegiatan pembebasan lahan dan pembangunan jalan untuk lokasi yang sama tidak dianggarkan pada tahun anggaran yang sama. Ketika ada kendala dalam pengadaan lahan tidak akan menghambat kegiatan pembangunan jalan;
5. Sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada PPTK dan staf administrasi yang menangani SPJ tentang perubahan aturan GU dan TU sehingga proses SPJ dapat berjalan lancar dan sesuai terget;
6. Berkaitan dengan pengadaan lahan PJSA, pada tahun anggaran 2018 Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air DPUPR Provinsi Banten akan mensosialisasikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor: 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau kepada Dinas terkait dan warga sekitar Sungai Cilemer. Selain perlu dibuatkan

Peraturan Daerah tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dengan Kajian Akademis oleh instansi yang berwenang.

7. Berkaitan dengan permasalahan pengadaan Lahan kebinamargaan solusi yang akan dilakukan yaitu:
 - a. Sosialisasi intensif kepada Pemilik Lahan. Dalam menyampaikan hasil taksiran harga, Tim Appraisal perlu menjelaskan lebih detail mengenai data dan Peraturan yang mendasarinya;
 - b. Mencari alternatif tanah pengganti dari usulan Pengadilan Agama dan tanah pengganti untuk tukar guling dengan tanah wakaf dan Kantor Kecamatan Kopo serta Desa Nanggung;
 - c. Membuat surat konsinyasi yaitu surat penitipan uang di pengadilan untuk ganti rugi tanah di Jl.Siliwangi (Pamulang) dan Jalan Palima-Pakupatan (Jembatan Bogeg);
 - d. Meminta surat rekomendasi/keterangan dari Pemerintah Kota Serang mengenai peruntukan lahan di Perumahan BMS. Jika peruntukan lahan untuk fasilitas umum/fasilitas social maka tidak perlu diberikan ganti rugi. Namun jika peruntukan lahan bukan untuk fasum/fasos, maka DPUPR Provinsi Banten akan memberikan ganti rugi.
8. Untuk mengurangi kendala non teknis dilapangan, dalam pelaksanaan pekerjaan kontruksi harus melibatkan semua stakeholder yang terkait sejak dalam proses perencanaan. (warga sekitar, pemilik tanah, pihak kelurahan, pihak kecamatan dll). Selain itu juga perlu dilakukan sosialisasi mengenai maksud, tujuan, manfaat dari suatu pekerjaan sehingga semua stakeholder mempunyai persepsi yang sama.
9. Penyiapan perencanaan atau pembuatan agenda kerja yang efektif disusun bersama dalam satu forum yang melibatkan stakeholders yang membahas perlu tidaknya dilakukan perubahan anggaran dengan mempertimbangkan constrain waktu pelaksanaan kegiatan tahun berjalan.
10. Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan di daerah harus secara intensif dilakukan dalam rangka mendapatkan pemahaman dan persepsi yang sama kepada para pengelola kegiatan untuk memudahkan dalam operasional kegiatan yang akan berjalan.

2.3.4 Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan dengan penyerapan dibawah 85% dikarenakan pada saat perencanaan menggunakan asumsi harga satuan tertinggi pada SSH sehingga terdapat efisiensi karena realisasi belanja menyesuaikan harga pasaran (belanja jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak/gas, pajak kendaraan, penggandaan, ATK dll), belanja sewa ruang rapat/ tempat penginapan yang tidak diserap sesuai arahan/ kebijakan Gubernur untuk menyelenggarakan rapat di ruang kantor;
2. Terdapat beberapa kegiatan Konsultansi dengan penyerapan dibawah 85% karena efisiensi harga satuan tenaga ahli menyesuaikan pengalaman pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana KP3B terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, yaitu:
 - Pengadaan lahan KP3B untuk pembebasan lahan seluas 14.390 m2 dan konsultan apraisal lahan yang dianggarkan pada APBD-P TA. 2017 tidak terlaksana dikarenakan terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi;
 - Pekerjaan pemagaran masjid kecil (Masjid Gowok) dikawasan KP3B dan Konsultan Pengawasan tidak dilaksanakan karena pembelian tanah untuk masjid baru selesai dibayarkan/dilaksanakan tanggal 27 Desember 2017 sehingga waktu pelaksanaannya tidak mencukupi.
4. Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih dengan tolok ukur Penyediaan Air Bersih pada Kawasan strategis sebanyak 47 paket, diantaranya 6 paket pekerjaan tidak dapat dilaksanakan di Desa Tanjung Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang, karena mobilisasi material terkendala lokasi/akses jalan yang tidak bisa

dilalui kendaraan (musim hujan) dan waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi. Selain itu terdapat efisiensi dari beberapa paket yang sudah dilaksanakan.

5. Kegiatan Penyelenggaraan Pengadaan Lahan terdapat item pekerjaan pengadaan lahan seluas 4,6 Ha di Banten Lama yang dianggarkan pada APBD-P TA.2017 karena terkendala waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir permasalahan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tersebut untuk periode ke depan antara lain, sebagai berikut:

1. Lebih cermat dalam menganggarkan suatu item pekerjaan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan pekerjaan;
2. Lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan kondisi yang ada;
3. Persiapan pengadaan lahan lebih matang/intensif;
4. Perlunya perencanaan yang lebih akurat dalam menentukan harga satuan dengan melakukan survey harga pasaran setempat;
5. Agar lebih teliti mencermati hasil lelang pekerjaan dari ULP terutama berkaitan dengan tenaga ahli;

2.3.5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, adalah:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana serta tidak mengalami hambatan. Namun demikian khusus bagi kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di kabupaten/kota agar lebih ditingkatkan kembali aspek koordinasi supaya terjalin harmonisasi dan sinkronisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota khususnya yang menangani fungsi kesatuan bangsa dan politik.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Permasalahan

- 1) Belum optimalnya fungsi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten yang mempunyai kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran Perda.
- 2) Koordinasi yang belum optimal antar Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota dengan Provinsi. Hal ini disebabkan euphoria otonomi daerah yang masih lekat, sehingga masih ada “batas” antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang seharusnya saling bersinergis;
- 3) Belum optimalnya kerjasama dalam pemeliharaan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mitra kerja, instansi terkait dan masyarakat/tokoh masyarakat.

b. Solusi

- 1) Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 2) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 3) Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten;
- 4) Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 5) Mengembangkan fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota, Provinsi Perbatasan, Kepolisian Daerah, PPNS, Instansi terkait dan masyarakat.
- 6) Untuk tahun depan Anggaran untuk pemeliharaan gedung tidak dianggarkan lagi.

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Permasalahan

- 1) Terkendala aturan yang berbeda itulah Anggaran Monev dalam Perencanaan mengikuti Juknis APBN BNPB yang memperbolehkan mengalokasikan untuk Honor Pengelola, sementara Anggaran Hibah dimaksud masuk di Anggaran APBD Provinsi Banten harus mengikuti Aturan APBD Provinsi Banten yang tidak memperbolehkan adanya alokasi untuk

Honor Pengelola, sehingga pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tidak terlaksana dengan optimal;

- 2) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) BPBD Provinsi Banten yang berkualitas dan berintegritas sehingga berdampak lambatnya penyelesaian Administrasi terutama SPJ;
- 3) Adanya ketidak sinkronan pada Rencana Operasional Kerja (ROK) yang telah di susun dengan pelaksanaan dilapangan.

b. Solusi

- 1) Pada penyerapan Triwulan IV direncanakan diadakan perubahan mengikuti aturan APBD Provinsi Banten Khususnya anggaran Honor Pengelola kegiatan diubah ke alokasi Perjalanan Dinas, Namun Perubahan Anggaran Tidak dapat direalisasi karena Tim Anggaran Daerah dari BAPPEDA mensyaratkan harus ada JUKNIS APBN dan JUKNIB BPBD Prov. Banten;
- 2) Perlu peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan Profesional serta berintegritas melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan dan upaya lain yang menunjang peningkatan kinerja aparatur BPBD dan perlu adanya Reward and punishment terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan;
- 3) Dilakukan Perbaikan dan Penjadwalan ulang untuk triwulan berikutnya pada anggaran Perubahan.

2.3.6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada Belanja Tidak Langsung capaian realisasi keuangan sebesar Rp15.297.194.166 (87,91%) dengan sisa anggaran Rp2.102.805.834 (12,09%), hal tersebut dikarenakan adanya pegawai Dinas Sosial Provinsi Banten yang pensiun sebanyak 4 orang, meninggal sebanyak 2 orang, pindah ke SKPD lain sebanyak 2 orang sehingga Gaji dan Tunjangan Kinerja tidak dapat diserap.
2. Pada Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana terdapat tolok ukur Asuransi Jiwa TAGANA sebesar Rp145.200.000 tidak dapat dicairkan karena sebagian besar peserta TAGANA tidak dapat melampirkan KTP dan KK.

3. Ketersediaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota belum semuanya berdasarkan *by name byadress*, sedangkan untuk pelaksanaan pendataan menjadi kewenangan kabupaten/kota.
 4. Pada beberapa kegiatan terdapat anggaran tidak digunakan yang disebabkan sisa kontrak dan efisiensi anggaran.
- b. Solusi
1. Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2017 lebih di pertajam dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program dan anggaran.
 2. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan masing-masing kegiatan agar dilengkapi dengan data dukung yang valid dan terukur.
 3. Perlu adanya alokasi khusus untuk anggaran pendataan PMKS dan PSKS yang berdasarkan *by name by adress* di Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota, baik melalui dana APBD Provinsi maupun Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.

2.3.7 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenagakerjaan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Ketenaga Kerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Provinsi Banten, adalah:

- a. Permasalahan
1. Permasalahan utama dalam penyerapan adalah Terlambatnya pengesahan APBD perubahan sedangkan banyaknya kegiatan yang berada pada anggaran perubahan, sehingga ada keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatannya;
 2. Ada keterlambatan pengajuan pencairan kontrak pengadaan barang jasa, sehingga berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 3. Adanya pengurangan anggaran (efisiensi) untuk belanja makan dan minum kegiatan;

4. Kurang matangnya dalam menyusun perencanaan Program Kegiatan yang berakibat adanya beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan;
 5. Adanya pengadaan barang dan jasa yang gagal lelang yang berakibat kepada besarnya nilai SilPa.
- b. Solusi
1. Perlu adanya perencanaan kegiatan yang lebih matang, sehingga di tahun selanjutnya pelaksanaan kegiatan bisa sesuai dalam hal penjadwalan waktu penyusunan, penginputan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD);
 2. Agar setiap program kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) yang telah dibuat;
 3. Setiap penganggaran belanja barang dan jasa yang dilaksanakan agar berpatokan kepada Standar Satuan Harga yang berlaku, sehingga adanya selisih perbedaan harga dapat diminimalisir;

Pada saat penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA SKPD) setiap bidang agar berpatokan kepada dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan target yang telah ditentukan, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kegiatan yang tidak dilaksanakan.

2.3.8 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan terkait Pengadaan Meja dan Kursi Pejabat mengingat kewenangan Pengadaan Sarana Kantor berupa Meja dan Kursi menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi Banten selaku pengelola Gedung Kantor Bersama SKPD Provinsi Banten;

2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas serta Belanja Pajak Kendaraan Bermotor dan BBNKB yang disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten;
3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp10.000.000,- berupa Dekorasi Kendaraan Hias HUT Banten yang diikuti oleh Dinas P3AKKB Provinsi Banten Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas disesuaikan dengan jumlah aset kendaraan bermotor Roda 4 dan 2 yang dioperasikan;
4. Kegiatan Penguatan Jaringan Kerja Pengarusutamaan Gender anggaran tidak digunakan pada Belanja Promosi dan Publikasi Penyusunan Anggaran esponsif Gender (ARG) bag SKPD Provinsi, Kab/Kota dan PSW sebesar Rp12.000.000 yang disesuaikan dengan metoda kegiatan yang dilaksanakan berupa Rapat Koordinasi;
5. Kegiatan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan agar tidak digunakan terutama pada Belanja Narasumber Penguatan Pengembangan Industri Rumahan Lintas Sektoral dan Lintas Program Bagi Pelaku IR di Wilayah Lebak dan Pandeglang sebesar Rp10.000.000 yang disesuaikan dengan jumlah narasumber yang hadir;
6. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga anggaran tidak digunakan antara lain:
 - Uang Saku Peserta Integrasi Program Gerakan Sayang Ibu (GSI) Dengan P4K sebesar Rp11.250.000 yang disesuaikan dengan kehadiran peserta;
 - Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Evaluasi Program PKK yang merupakan Paket Fullday sebesar Rp15.820.000 dan Kegiatan Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja yang merupakan Paket Fullboard sebesar Rp123.504.000 yang disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang pembatasan

- pelaksanaan kegiatan melalui mekanisme Fullboard, Fullday dan Halfday;
- Belanja Narasumber Bintek Penguatan Kapasitas Perempuan Dalam Meningkatkan Kemandirian Bekerja sebesar Rp15.000.000 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber;
 - Belanja Cetak dan Penggandaan Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.300.000 yang disesuaikan dengan materi kegiatan yang disampaikan;
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp163.247.300 yang disesuaikan dengan banyaknya undangan yang diterima untuk ditindaklanjuti;
 - Belanja Narasumber dan Tenaga Ahli Penguatan Kelembagaan TP PKK sebesar Rp11.900.000 yang disesuaikan dengan kehadiran narasumber dan moderator;
7. Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak terdapat beberapa tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan antara lain :
- Percepatan Pembentukan Kota Layak Anak sebesar Rp40.490.000 melalui sosialisasi Permen PPPA tentang Pembentukan Kota Layak Anak tidak dilaksanakan, mengingat Permen PPPA dimaksud telah beberapa kali dilakukan sosialisasi pada periode pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya;
 - Uang Saku Peserta dan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pembinaan dan Peningkatan Anak yang disesuaikan dengan kehadiran.
8. Permasalahan Renstra Perangkat Daerah belum sepenuhnya dijadikan rujukan dalam penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilakukan oleh PPTK;
9. PPTK tidak melakukan review atas target kinerja yang ditetapkan pada saat dilakukannya perubahan anggaran;
10. Tahapan pelaksanaan kegiatan tidak tergambarkan secara mendetail dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK);
11. Target Sasaran tidak tidak tergambarkan secara mendetail dalam Term of Reference (TOR);

12. Penetapan target kinerja tolok ukur belum mencerminkan target sasaran jangka menengah perangkat daerah (Renstra).

b. Solusi

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan.

2.3.9 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup

Terdapat beberapa tolok ukur yang tidak dilaksanakan, disebabkan diluar kewenangannya sebagaimana arahan Inspektorat, yaitu Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN 2017 dan tolok ukur Kegiatan APIP.

2.3.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyusunan dan Pengelolaan Data, Informasi Kependudukan Sebagai Basis Perencanaan Pembangunan terdapat tolok ukur kegiatan Penyusunan dan Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan tidak dilaksanakan disebabkan telah terdapat target output sejenis melalui Dana Alokasi Khusus;
2. Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Kependudukan (DAK) anggaran yang tidak diserap antara lain :
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota sebesar Rp13.846.326 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan

- penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebesar Rp96.272.310 yang disesuaikan dengan Permendagri No. 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya 25% dikarenakan pelaksanaan Rakornas Kependudukan yang semula diagendakan oleh Ditjen Adminduk Kemendagri dilaksanakan diluar pulau jawa namun dialihkan di Jakarta.
3. Pada Kegiatan Penataan Administrasi Pencatatan Sipil (DAK) terkendala pada beberapa Tolok Ukur Kegiatan, antara lain : Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Penggandaan, Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Uang Saku, Belanja Jasa Narasumber/Instruktur, Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Belanja Promosi dan Publikasi sebesar Rp55.034.500 yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 4. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK), anggaran yang tidak digunakan antara lain : Belanja Jasa Narasumber/Instruktur Rapat Pemanfaatan Data dan PIAK Kependudukan Tingkat Provinsi sebesar Rp12.500.000 yang disesuaikan dengan materi pada saat pelaksanaan kegiatan, Honorarium Pejabat/Pokja/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Cetak Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Buku Data Kependudukan Persemester Tingkat Provinsi sebesar Rp20.300.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Adminduk Terkait PIAK dan Pemanfaatan Data yang terkendala keterbatasan waktu pelaksanaan sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
 5. Secara umum, permasalahan dalam penyerapan anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Banten yang

bersumber dari PAD Provinsi Banten maupun DAK dan DAU meliputi :

- Review atas Pelaksanaan Anggaran terhadap Standar Satuan Harga Tahun 2017;
- Penjadwalan dalam Rencana Operasional Kegiatan (ROK) tidak diikuti dengan proses persiapan yang cukup sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Penetapan target sasaran, baik peserta, narasumber maupun moderator tidak cukup tergambarkan dalam Kerangka Acuan Kegiatan;
- keterbatasan waktu pelaksanaan DAK sehubungan penetapan Anggaran Kas dan ROK dialokasikan pada Triwulan IV;
- Review atas anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan mempedomani Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Juklak DAK Adminduk hanya untuk menghadiri Rakornas Kependudukan.

b. Solusi

1. Menetapkan target sasaran yang jelas dan tergambar secara utuh dalam Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
2. Menyusun ROK yang menggambarkan secara detail kebutuhan anggaran serta tahapan proses persiapan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan;
3. Mempedomani Standar Satuan Harga serta peraturan perundangan yang berlaku dan menjadi rujukan dalam proses penyusunan anggaran.

2.3.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Adanya efisiensi dari belanja barang/jasa;
2. Keterbatasan waktu pelaksanaan, oleh karena penetapan APBD Perubahan TA.2017 tidak sesuai dengan perencanaan;
3. Adanya tolok ukur yang tidak dilaksanakan;
4. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkecakupan Khusus (kompeten);

5. Adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
6. Keterlambatan dalam proses pencairan keuangan.

b. Solusi

Merujuk pada permasalahan tersebut diatas, dimasa mendatang diperlukan perencanaan yang matang, terukur, terjadwal. Sehingga permasalahan tersebut dapat diminimalisir, antara lain:

1. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dengan instansi terkait dari mulai perencanaan anggaran hingga pelaporan;
2. Menyusun program, kegiatan dan penganggaran secara tepat, akurat dan skala prioritas sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

2.3.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran terdapat efisiensi Belanja Listrik, belanja makan minum rapat, dan belanja makan minum kegiatan;
2. Kegiatan Pendayagunaan Telematika, dikarenakan Bintek system informasi perencanaan penganggaran dan laporan tidak dapat dilaksanakan;
3. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan, dikarenakan Penerbitan Tabloid Menara Banten;
4. Kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak Untuk Tahun sedunia tidak dapat dilaksanakan dan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI tidak disetujui oleh Tim Penataan UPT.

b. Solusi

1. Harus dilakukan penyesuaian dengan tingkat kebutuhan;
2. Akan lebih selektif dalam menentukan penjadwalan yang melibatkan unsur narasumber luar pada Kegiatan Pendayagunaan Telematika dengan tolok ukur Bintek system informasi perencanaan penganggaran;

3. Harus dilakukan penyesuaian pada pola penganggaran terhadap Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan;
4. Kedepan untuk kegiatan Penyelenggaraan KIP dengan tolok ukur Kegiatan event Hari Hak untuk Tahun sedunia realisasi keuangan agar dapat disesuaikan dengan kesesuaian waktu pelaksanaan dan Tolok Ukur kegiatan Penyusunan Naskah Akademik UPT sekretariat KI Tidak dianggarkan lagi karena usulan pendirian UPT tidak disetujui oleh tim penataan UPT.

2.3.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Permasalahan

1. Pembangunan gedung PLUT tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang oleh LPSE;
2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi pada tolok ukur Pemeringkatan tidak dapat dilaksanakan karena kurangnya persiapan dan terkendala dengan aturan yang mengharuskan dilaksanakan oleh lembaga survey yang berakreditasi;
3. Terdapat efisiensi pada tolok ukur kegiatan bimbingan koperasi pada jumlah koperasi dari 138 koperasi ternyata dalam kondisi terahir berjumlah 125 koperasi, hal ini dikarenakan koperasi tidak aktif.

b. Solusi

1. Agar proses lelang diajukan di awal tahun, karena pengajuan pembangunan gedung PLUT diajukan pada bulan agustus sehingga tidak cukup waktunya;
2. Agar PPTK lebih teliti dalam penyusunan anggaran kegiatan.

2.3.14 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pelaksanaan progam Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi adalah jadwal kegiatan yang masih belum pasti terutama

kegiatan promosi yang dilaksanakan BKPM RI sehingga menyulitkan dalam pengalokasian anggaran;

2. Belum optimalnya penerapan dari standar operasional prosedur tersebut untuk tiap-tiap proses penyelenggaraan perizinan;
3. Adanya keterbatasan Sarana dan Prasarana kerja yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program termasuk aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang dimiliki masih belum memadai dalam memperlancar pelayanan publik;
4. Permasalahan Keterlambatan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017;
5. Lemahnya perencanaan awal penganggaran dan pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
6. Pelarangan melaksanakan kegiatan/rapat di luar kantor, sehingga Perjalanan Dinas, sewa ruang rapat, penginapan, dan makan minum yang telah dianggarkan tidak terserap secara optimal;
7. Dampak meletusnya Gunung Agung di Bali yang menyebabkan batalnya penyelenggaraan pameran penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Banten yang menyatakan bahwa honorarium tim terkoordinasi tidak lagi diperkenankan dibayarkan;
9. Terlambatnya proses lelang.

b. Solusi

1. Melakukan koordinasi dengan BKPM RI mengenai perubahan jadwal promosi;
2. Penerapan kedisiplinan bagi tiap-tiap pelaksana penyelenggaraan perizinan dalam melaksanakan proses perizinan agar sesuai dengan standar yang diterapkan;
3. Komunikasi yang intensif dan optimal dengan OPD teknis dan penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu di Kabupaten/Kota demi tercapainya sinergitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Mengikutsertakan pegawai BPPT dalam kegiatan-kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/kursus yang dapat meningkatkan kompetensi dalam mendukung peningkatan pencapaian kinerja organisasi;

5. Secara terus menerus berupa memenuhi kebutuhan Sarana dan Prasarana kerja, termasuk didalamnya penyempurnaan aplikasi sistem informasi dan komunikasi yang sudah dimiliki.
6. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan;
7. Memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan;
8. Mempersiapkan dokumen pendukung lelang lebih awal.

2.3.15 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor efisiensi Pada Belanja Kendaraan;
2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor terdapat efisiensi Pada Belanja Pemeliharaan Kendaraan;
3. Pada Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah dikarena Banyak Kegiatan luar daerah yang sudah di fasilitasi oleh penyelenggara, sehingga terjadi efisiensi anggaran.

b. Solusi

Diharapkan kedepan akan dilakukan lebih selektif dalam penganggaran.

2.3.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Statistik Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan

Dasar Bidang Statistik, adalah:

a. Permasalahan

1. Masih belum maksimalnya pengumpulan data yang dilakukan baik dari internal SKPD, Stakeholder, Kab/Kota yang berakibat kompilasi data masih belum lengkap;
2. Tenaga ahli IT dalam pengelolaan website masih belum mencukupi, menyebabkan informasi yang disampaikan belum maksimal dan updating data masih tersendat;

3. Pengaduan Masyarakat/Lembaga Masyarakat terkait kebutuhan informasi publik masih belum maksimal.

b. Solusi

1. Menyusun basis data, rencana, monitoring dan evaluasi bidang ketentraman dan ketertiban umum;
2. Menyiapkan tenaga IT yang handal dan profesional;
3. Mengembangkan jaringan dalam pengelolaan website melalui updating dan upgrade website.

2.3.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Kebudayaan
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya terdapat 2 (dua) kegiatan yang serapan rendah, meliputi :

- Kegiatan Pemanfaatan Taman Budaya terdapat efisiensi dari SPPD, belanja Modal barang meubelair dan pendataan tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu;
- Kegiatan Pemanfaatan Museum terdapat Belanja jasa konsultasi disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan.

b. Solusi

Kedepan agar dilakukan perencanaan yang lebih matang, dan dilakukan percepatan dalam pelaksanaan kegiatan.

2.3.18 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan
Permasalahan dan Solusi pada Urusan Wajib Bukan Pelayanan
Dasar Bidang Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Belum meratanya minat baca antara daerah perkotaan dan pedesaan;
2. Belum meratanya akses layanan perpustakaan bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan;
3. Belum maksimalnya difersifikasi layanan perpustakaan digital;

4. Kurangnya promosi perpustakaan;
5. Belum maksimalnya capaian perpustakaan standar nasional dikarenakan wewenang akreditasi perpustakaan ada pada Perpustakaan Nasional RI;
6. Perlunya dukungan/tambahan sumber daya manusia yang memadai dalam bidangnya (IT, Akuntansi, Pelaporan) dalam rangka memaksimalkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
7. Pengadaan koleksi E-Book ada yang tidak dilaksanakan karena kendala kelengkapan administrasi yang tidak dipenuhi pihak penyedia.
8. Masih terdapatnya kesalahan dalam penempatan kode rekening belanja kegiatan yang belum tepat, sehingga membutuhkan perubahan anggaran.
9. Kesalahan perencanaan Tolok Ukur pengadaan DED Diorama arsip sehingga anggaran tidak bisa diserap karena harus membuat Elementary Design dan Story Line terlebih dahulu.
10. Kurang cermat dalam menyusun perencanaan Belanja Tidak Langsung sehingga mengakibatkan silpa yang cukup besar.
11. Permasalahan Kurangnya Sumber Daya Aparatur yang menguasai teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan informasi kearsipan.
12. Sarana teknologi informasi yang belum memadai dalam mendukung pemanfaatan IT dalam kearsipan.
13. Belum maksimalnya konektivitas jaringan informasi kearsipan pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Memperluas kegiatan pengembangan minat baca melalui berbagai seminar, lomba, gebyar ke pelosok kab/kota se Provinsi Banten.
2. Memperbanyak jumlah titik layanan kunjungan mobil unit perpustakaan keliling di 8 kab/kota se Provinsi Banten sehingga dapat menjembatani masyarakat yang jauh aksesnya dari layanan perpustakaan tetap dapat memanfaatkan perpustakaan.
3. Pengembangan perpustakaan digital melalui e-Banten, yang merupakan layanan perpustakaan digital berbasis e-Book.

4. Meningkatkan promosi perpustakaan melalui berbagai cara baik media cetak, media elektronik dan media sosial.
5. Meningkatkan pembinaan perpustakaan mengacu pada standar nasional perpustakaan guna menyiapkan sebanyak mungkin perpustakaan yang siap dilakukan akreditasi oleh Perpustakaan Nasional.
6. kualitas SDM melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten untuk memenuhi kualifikasi SDM yang di butuhkan.
7. PPTK dan PEP lebih cermat dalam menyusun perencanaan dengan berdasarkan Regulasi yang ada dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan Perpustakaan dan Kearsipan.
8. Koordinasi yang lebih intensif baik dengan leading sektor Pemerintahan maupun mitra kerja.
9. Sisa Peningkatan kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam teknologi informasi melalui berbagai pelatihan dan magang.
10. Peningkatan sarana teknologi informasi dalam menunjang digitalisasi Arsip.
11. Melakukan langkah koordinasi yang intensif dengan berbagai leading sektor yang terkait dengan konektifitas jaringan kearsipan seperti ANRI, Dinas Kominfo dan Bappeda Provinsi Banten.

2.3.19 Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Permasalahan Kegiatan pengadaan sarana prasarana lampu suar (BBAT) realisasi anggaran kegiatan tidak terlaksana dikarenakan dalam suatu akan merencanakan dan sampai pelaksanaanya pembangunan harus ada beberapa tahapan, seperti dalam kegiatan ini bahwa untuk kegiatan ini bahwa belum adanya dari pada bangunan *breakwater*.

b. Solusi

Perlu adanya perencanaan, yang lebih maksimal lagi, sehingga dalam melaksanakan program/kegiatan dapat terlaksana dengan baik;

2.3.20 Urusan Pilihan Bidang Pariwisata

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Pemeliharaan Kendaraan Dinas yang hanya terserap sekitar 56,26% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp354.590.000. Hal ini disebabkan minimnya aktifitas kendaraan operasional kantor (non operasional jabatan) dalam penggunaannya sehingga kendaraan – kendaraan tersebut belum memerlukan service berkala serta pergantian suku cadang.
2. Pengadaan sarana dan prasarana kantor pada tolok ukur Peremajaan kendaraan bermotor roda 4 yang tidak terserap sejumlah pagu tolok ukur sebesar Rp195.300.000. Hal ini disebabkan minimnya persiapan dalam menyusun spesifikasi kendaraan yang diajukan sehingga penjadwalan pelaksanaan *e-purchasing* terhambat selain itu terdapat nilai belanja karoseri/peremajaan lebih besar daripada perolehan aset sehingga disarankan oleh Inspektorat Provinsi Banten untuk tidak dilaksanakan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pada tolok ukur Fasilitasi bimbingan teknis yang hanya terserap sekitar 2,90% dari pagu tolok ukur kegiatan sebesar Rp30.000.000, Hal ini disebabkan minimnya surat undangan yang masuk yang meminta aparatur PNS dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan teknis, adapun undangan bimtek yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi yang diperlukan.

b. Solusi

1. Memahami analisa perencanaan berbasis SMART (spesific, measurement, realiable dan time bond);
2. Melaksanakan pengawasan atas penguasaan barang milik daerah yang dikuasai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten untuk dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan pemahaman tentang "program follow function" dilingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai landasan

dalam menyusun anggaran agar terciptanya anggaran profesional, yang responsif terhadap efektifitas dan efisiensi sehingga tepat guna dan tepat sasaran dalam pengelolaannya.

2.3.21 Urusan Pilihan Bidang Pertanian

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Pertanian, adalah:

a. Permasalahan

1. Pada kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana pada kantor Balai Pelayanan dan Pengujian Veteriner realisasi keuangan terserap 84,35%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada pembayaran listrik, telpon serta makan minum rapat;
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Aneka Kacang dan Umbi (Akabi) hanya terserap 88,27%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi dari belanja pupuk dan efisiensi belanja sewa ruang;
3. Realisasi keuangan kegiatan Pengembangan Pakan Ternak sebesar 84,54%. Hal tersebut disebabkan adanya efisiensi pada belanja makan minum kegiatan dan sewa ruang rapat;
4. Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanian tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini sesuai dengan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun sisa anggaran yang ada dikarenakan terdapat efisiensi pada rekening belanja makan minum kegiatan, sewa ruang kegiatan, maupun honorarium internal. Salah satu factor adanya efisiensi ini adalah belum jelasnya peraturan yang mengatur pengeluaran biaya pada honorarium internal, serta kebijakan penggunaan ruang rapat pada hotel.

b. Solusi

1. Sisa Diperlukannya petunjuk pelaksanaan APBD yang lebih jelas dan sosialisasi yang baik terhadap SKPD;
2. Diperlukannya pemahaman yang sama antara instansi pemerintah terhadap pelaksanaan APBD.

2.3.22 Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Terdapat target kinerja di 4 (empat) kegiatan Pembangunan Listrik Pedesaan yang tidak seluruhnya terealisasi, yaitu hanya terelalisasi 6.903 RTS dari target 7.045 RTS, karena adanya kendala teknis lapangan sehingga terdapat 142 RTS tidak terealisasi. Sehingga mengakibatkan timbulnya deviasi fisik (capaian kinerja *output*) sebesar 0,39% dan berimbas pada capaian kinerja *output* pelaksanaan APBD;
2. Permasalahan realisasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial (BANSOS) pada pelaksanaan 2 kegiatan yaitu BANSOS Listrik Pedesaan dan hibah Sumur Bor Produksi Air Tanah dikarenakan realisasi anggaran untuk kedua kegiatan tersebut baru selesai di akhir bulan Nopember 2017, sedangkan dalam dokumen Rencana Operasional Kegiatan (ROK) diplot selesai pada bulan Juni-Juli 2017. Sehingga ada keterlambatan selama 5 bulan (Agustus- Nopember). Selama kurun waktu 5 bulan tersebut, deviasi negatif penyerapan anggaran Dinas ESDM Provinsi Banten cukup besar (30-40%), dimana 60-75% adalah kontribusi dari permasalahan hibah dan BANSOS ini.
Kendala dan hambatan yang dihadapi pelaksanaan kegiatan hibah dan bansos adalah diantaranya sebagai berikut, yaitu :
 - Kendala penyiapan dokumen pelelangan (adanya proses verifikasi ulang calon penerima bansos dan proses pergeseran anggaran);
 - Proses pelelangan dilakukan sampai 3 kali (2 kali gagal lelang);
 - Terlambatnya penetapan calon penerima hibah dan BANSOS oleh Gubernur.
3. Permasalahan realisasi belanja perjalanan dinas dan makan minum kantor;
4. Alokasi berlebih perencanaan anggaran untuk pembayaran rekening PJU (perbatasan dan kawasan pariwisata);
5. Sisa anggaran di DPA yang berasal dari sisa kontrak.

b. Solusi

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi internal setiap bulannya di SKPD dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus penyiapan bahan rapat pimpinan dengan Gubernur;
2. Koordinasi terpadu dengan PT. PLN terkait penyiapan dokumen verifikasi calon penerima BANSOS Listrik Perdesaan;
3. Koordinasi terpadu dengan POKJA ULP Provinsi Banten terkait percepatan dan penyelesaian proses pelelangan untuk paket-paket pembangunan Listrik Perdesaan;
4. Menetapkan calon penerima hibah dan bantuan sosial melalui Surat Keputusan Kepala OPD setelah diterbitkannya SK Pelimpahan wewenang penetapan penerima hibah dan BANSOS dari Gubernur ke kepala OPD;
5. Optimalisasi anggaran yang tidak digunakan di DPA dengan mengubahnya di APBD Perubahan TA.2017.

2.3.23 Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya, belum dapat diintervensi Pemerintah;
2. Masih ditemui barang kadaluwarsa yang beredar;
3. Meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017, secara otomatis membuka peluang bagi kegiatan investasi di Provinsi Banten yang secara langsung akan berdampak pada perekonomian di Banten.

b. Solusi

1. Penyelesaian masalah terhadap dinamika gejolak harga menyangkut sembako dan barang strategis lainnya ini tidak bisa dilakukan secara parsial, namun perlu kebijakan nasional;
2. Dilakukan pembinaan terhadap para pelaku usaha tentang pemahaman bahaya mengkonsumsi barang kadaluwarsa;

3. Strategi yang dilakukan terhadap meluasnya aktivitas MEA pada tahun 2017 harus berorientasi pada bagaimana IKM di Banten tetap terpancang kuat dan berdaya saing.

2.3.24 Urusan Pilihan Bidang Industri

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pilihan Bidang Industri yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Bagi beberapa pelaku industri, permasalahan yang umum dihadapi adalah berkaitan dengan pemasaran produk. Para pelaku IKM di beberapa wilayah Kabupaten/Kota biasanya masih bertransaksi dengan cara konvensional sedangkan saat ini konsumen sedang gemar bertransaksi *online*. Idealnya, para pelaku industri sudah dapat menguasai teknologi informasi sederhana khususnya berbasis android;
2. Keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian sampai saat ini juga masih menjadi salah satu kendala;
3. Belum optimalnya kerjasama antara pelaku IKM dengan perusahaan besar terutama dibidang penyediaan bahan mentah maupun pemasaran.

b. Solusi

1. Langkah yang ditempuh berkaitan dengan pemasaran produk diantaranya dengan melibatkan praktisi marketing yang berkolaborasi dengan praktisiIT (*information technology*) untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku IKM;
2. Untuk mengatasi keterbatasan personil untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian harus melibatkan praktisi, akademisi dan asosiasi;
3. Perlu ditingkatkan kerjasama antara IKM dengan perusahaan besar terutama adanya kemitraan baik dalam hal ketersediaan bahan mentah maupun dalam pemasaran.

2.3.25 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang administrasi Pemerintahan

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan, adalah:

- Sekretariat DPRD
 - a. Permasalahan

Pada Penyusunan, Persetujuan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan DPRD Provinsi Banten, penyerapan belanja masih rendah realisasinya diantaranya adalah pembahasan Raperda.
 - b. Solusi

Dilakukan dengan upaya berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menangani produk hukum pemerintah daerah selaku leading sector penyusunan dan pembahasan hasil legislasi daerah dengan mempertimbangkan jadwal dan agenda kegiatan DPRD sehingga Raperda dapat dibahas sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- Biro Hukum
 - a. Permasalahan
 1. Pada beberapa kegiatan yang serapan kurang dari 80% disebabkan adanya efisiensi anggaran;
 2. Belanja Promosi dan Publikasi kegiatan Penyusunan Raperda (1 Raperda x 1 kali tayang x 1 keg) tidak terlaksana, disebabkan Raperda yang diterima Biro Hukum, tidak ada yang layak untuk dipublikasikan karena masih dikembalikan ke pengusul serta jumlah halaman Raperda yang diusulkan tidak terjangkau oleh anggaran penayangan sebesar Rp30.000.000 untuk Raperda RPJMD;
 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada Biro Hukum, realisasi keuangan hanya terserap 37,54%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi Keuangan pada belanja cetak dan belanja penggandaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada saat pelaksanaan kegiatan;
 4. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah terdapat beberapa perjalanan dinas yang semula direncanakan, tidak bisa dilaksanakan karena belum ada undangan masuk ke

Biro Hukum, sehingga adanya efisiensi pengeluaran anggaran belanja perjalanan dinas;

5. Pada Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di beberapa tolok ukur, meliputi :
 - Terdapat efisiensi pembiayaan, dan terdapat prestasi terhadap Jumlah Perda yang dilakukan Pengkajian dianggarkan 3 Kajian namun dihasilkan 5 Kajian Perda, serta terdapat prestasi dalam Asistensi, dimana raperda yang dibahas bersama dengan DPRD dianggarkan 6 Asistensi terlaksana 8 Asistensi;
 - Kegiatan yang tidak dilaksanakan hanya 2 kegiatan yaitu 1 Harmonisasi dan Sinkronisasi, dan 1 Pemantapan Konsepsi. Hal ini karena Raperda yang dibahas belum diterima oleh Biro Hukum.
6. Kegiatan Penanganan Sengketa Hukum hanya terlaksana 2 kegiatan Forum Diskusi dan 1 kegiatan tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu tidak mencukupi, selebihnya karena efisiensi pada belanja cetak, belanja penggandaan dan belanja jasa tenaga ahli.

b. Solusi

Solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut untuk tahun yang akan datang program dan kegiatan pada Biro Hukum perencanaanya akan disusun dengan lebih cermat dan teliti sehingga dapat dihasilkan suatu perencanaan yang lebih optimal untuk mencapai target yang telah direncanakan.

- Biro Organisasi

a. Permasalahan

1. Kegiatan Penataan Analisa dan Formasi Jabatan Perangkat Daerah terdapat kendala pada 2 tolok ukur kegiatan, yaitu:
 - Tolok ukur Kegiatan penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari ren aksi KPK mengalami hambatan pada saat penyusunan/proses input data pada aplikasi Sinjab (www.sinjab.bantenprov.info) ini disebabkan kurang pemahaman dalam mengidentifikasi analisa jabatan dan analisa beban kerja sebagian OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan adanya regulasi

- baru terkait nomenkatur JFU (Jabatan Fungsional Umum) Permendagri Nomor 25 Tahun 2016;
- Tolok ukur Penyusunan Standar kompetensi teknis dan manajerial Jabatan tidak bisa dilaksanakan karena penyusunan Anjab dan ABK belum tuntas.
2. Kegiatan Penataan Kelembagaan Lembaga Lain Bagian Perangkat Daerah dan Pembinaan dan Fasilitasi Raperda/Perda Perangkat Daerah Kab/Kota, pada tolak ukur kajian penataan lembaga tertentu sebagai bagian perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan karena adanya perubahan peraturan perundang-undangan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sehubungan dengan perubahan perundang-undangan tersebut maka Peraturan Pemerintah yang mengatur Perangkat Daerah turut mengalami perubahan yaitu dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, klausul tentang lembaga tertentu yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut;
 3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Provinsi Banten, pada tolak ukur Penyusunan Evaluasi Laporan Kinerja Provinsi Banten, tidak dapat dilaksanakan karena sampai masa ahir periode anggaran tahun 2017 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum memberikan keputusan terkait evaluasi Lakip Provinsi Banten;
 4. Kegiatan Peningkatan dan Pembinaan Budaya Kerja Aparatur pada tolak ukur Penyusunan Rapergub *Reward* dan *Panishment* Aparatur Dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Pemerintah Provinsi Banten yang diinisiasi BKD telah menerbitkan Pergub Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, sebagaimana telah diubah oleh Pergub Nomor 31 Tahun 2017

tentang perubahan Pedoman pengukuran kinerja dan pemberian tambahan penghasilan pegawai dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

b. Solusi

1. Melakukan Koordinasi lebih lanjut dengan seluruh Perangkat Daerah dalam Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara mengenai Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Standar Kompetensi Manajerial, dan Standar Kompetensi Teknis Masing masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
 2. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Instansi Pemerintah;
 3. Sehubungan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Banten akan selalu mempedomani Peraturan Pemerintah tersebut;
 4. Segera berkoordinasi dan konfirmasi ke Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Evaluasi LAKIP Provinsi Banten;
 5. Akan mempedomani dan mengikuti peraturan yang telah diterbitkan sesuai amanat Pergub.
- Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
- a. Permasalahan
- Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang datang sehingga terjadi efisiensi anggaran; Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Keluar Daerah pada Biro Bina Infrastruktur dan SDA dengan serapan 79,97% karena terdapat kelebihan biaya Transportasi pada belanja Perjalanan Dinas.

- Biro Umum
- a. Permasalahan
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan tidak dapat di realisasikan terkait dengan surat edaran Inspektorat Provinsi Banten perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan. Sehingga berpengaruh besar pada persentasi capain realisasi kegiatan;
 2. Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor terkendala pada penyerapan pengadaan APK barang yang tidak di laksanakan sebesar Rp557.000.000;
 3. Kegiatan terdapat efisiensi pada belanja Pengadaan Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp150.000.000 dan Pengadaan Pagar Lapangan Upacara dengan Efisiensi sebesar Rp65.000.000;
 4. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas dan Premi Asuransi terdapat efisiensi pada beberapa belanja di antaranya sebagai berikut :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas berjenis Land Cruiser & Nissan X Trail dengan Efisiensi sebesar Rp900.000.000;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (9 Unit) dengan Efisiensi sebesar Rp320.000.000;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Golf dengan Efisiensi sebesar Rp120.000.000;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Inova (2 unit) dengan Efisiensi sebesar Rp430.000.000.
 5. Pada tolok ukur kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kegiatan dan tolok ukur kegiatan Peningkatan Pelayanan Perpustakaan tahun 2017 terkait dengan surat edaran Inspektorat perihal Pembayaran Honorarium Narasumber Internal ASN Provinsi Banten yang tidak dapat dibayarkan (Single Salary System) sehingga pada kegiatan tersebut honor Narasumber/Moderator tidak dapat dibayarkan.

- Biro Administrasi Pembangunan Daerah
- a. Permasalahan
1. Kualitas SDM belum memenuhi standar kapabilitas yang mencukupi, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan fasilitasi perumusan, perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan- kebijakan Pemerintah Daerah
 2. Adanya perubahan/pergeseran kode rekening di tiap kegiatan sehingga berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan
 3. penerapan SOTK baru sehingga perlu adanya pemahaman terhadap pola/penerapan yang lebih matang.
 4. Efisiensi sebesar Rp1.614.543.999 dari Honorarium Non PNS, Pelengkapan Peserta, Makan minum kegiatan, Belanja internet, Dekorasi, Promosi dan Publikasi, kegiatan yang dikontraktualkan (Fullboard, Kajian) dan tolok ukur kegiatan yang tidak dilaksanakan, SPPD Koordinasi untuk Tim Pokja ULP tidak dilaksanakan dikarenakan tidak ada usulan dari tiap OPD Provinsi Banten.
- b. Solusi
1. Dalam pencapaian sasaran mikro dan sasaran stratejik yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, walaupun capainnya belum optimal, namun umumnya telah terlaksana dengan baik.
 2. Terkait dengan kesinambungan pelaksanaan kegiatan periode sebelumnya terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan kegiatan kedepan, yaitu :
 - Peningkatan pengelolaan dengan mengoptimalkan SDM dan Pelatihan - pelatihan sehingga tercipta peningkatan kinerja aparatur;
 - Dalam pencapaian sasaran tahunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan perlu adanya kecermatan dan perencanaan yang baik sehinga Capaian Program dan Kegiatan dapat di Optimalkan.

- Biro Kesejahteraan Rakyat

a. Permasalahan

1. Kegiatan – kegiatan dengan serapan tidak mencapai 100% pada umumnya karena ketidak hadiran dan ketidak sesuaian Narasumber yang dating sehingga terjadi efisiensi anggaran;
2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten terdapat beberapa fungsi/kewenangan yang tumpang tindih dengan OPD lain;
3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten merupakan Biro yang membantu Asisten Ekonomi dan Pembangunan dengan mitra kerja Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo maka untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya memerlukan data yang falid dan up date dari OPD teknis diatas.

b. Solusi

Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Banten perlu melakukan koordinasi lanjutan dengan OPD Teknis dan terkait dengan penyediaan data pembangunan dan dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tidak terdapat tumpang tindih kewenangan.

- Biro Pemerintahan

a. Permasalahan

Rendahnya penyerapan lebih di dasarkan kepada hal-hal teknis yang terjadi selama tahun 2017, diantaranya :

1. Penyerapan anggaran baru dapat di laksanakan pada bulan Maret 2017;
2. Terjadinya pergantian pimpinan (Kepala Biro Pemerintahan) di sebabkan telah berakhirnya masa tugas Kepala Biro Pemerintahan pada akhir bulan Mei 2017. Pengangkatan Plt (Pelaksana Teknis) Kepala Biro Pemerintahan baru di lantik per 1 September 2017. Secara umum Biro Pemerintahan hanya dapat melaksanakan Program dan Kegiatan serta penyerapan anggarannya selama 7 Bulan;

3. Kedua hal tersebut yang mengakibatkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah di buat sebelumnya.

b. Solusi

Secara umum, tindak lanjut untuk memperbaiki dan meningkatkan Capaian Kinerja Input, Output, Outcomes dan Program adalah Personil pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus :

1. Mempedomani peraturan perundangan yang melandasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DPA maupun DPPA;
3. Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan *Cash Budgetting* yang telah ditetapkan;
4. Diharapkan dalam hal penyerapan anggaran sudah dapat di laksanakan pada awal tahun (Bulan Januari);
5. Terkait dengan pensuin ASN seharusnya sudah dapat di prediksi jauh hari sebelumnya, dengan melihat data masa kerja dalam identitas ASN. Kemudian terkait dengan pengangkatan Plt (pelaksana teknis) seharusnya juga sudah dapat di verifikasi jauh hari sebelum pensiun seorang ASN. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan kembali, yang mengakibatkan terhambatnya kinerja pegawai.

- Badan Penghubung

a. Permasalahan

1. SPJ kantor (Badan) harus 75 % bila belum mencapai 75 % belum dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan yang sudah selesai belum dapat mengajukan kembali karna harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat berpengaruh pada serapan anggaran sehingga berdampak tidak terserapnya masing-masing objek rekening Kegiatan;
3. Proses Penatausahaan Keuangan melalui data base SIMDA online masih terkendala of line sehingga menghambat

pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akuntansi neraca dan aset;

4. Penentuan GU UP per SKPD dihitung dengan formulasi $GU\ UP\ SKPD = 1/12 \times (\text{Jumlah pagu Belanja Langsung SKPD setelah dikurangi belanja LS})$, tidak berdasarkan Estimasi pengeluaran alokasi triwulan pada anggaran kas yang sesuai dengan Pergub Banten 89 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun 2017 sehingga GU UP nilainya tidak sesuai dengan Anggaran Kas/ROK;
5. Pada Kegiatan Sarasehan belum ada tindak lanjut nota dinas kegiatan;
6. Konsep Pembinaan dan Rakor mahasiswa, serta Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah belum sesuai dengan tujuan dan masalah dan Tufoksi serta PP 18 Tahun 2016;
7. Pengelolaan Wisma tidak sesuai dengan nomenklatur kegiatan Penyelenggaraan Pemda agar disesuaikan dengan fungsinya;
8. Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi Badan Penghubung;
9. Hubungan Kelembagaan kurang efektif apabila jadi satu dengan promosi dan investasi karna di Badan Penghubung lain Hubungan Kelembagaan jadi Fasilitas Pimpinan dan Pelayanan Masyarakat;
10. Badan penghubung yang mengkoordinasi. Tugas badan penghubung mengikuti event promosi? Uraian tugas . Belum ada tolak ukur kegiatan terkait untuk investasi yang sesuai tupoksi;
11. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (SP-RKA, KL, DPA, ROK) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran;
12. Terdapat harga satuan Pergub tidak sesuai dengan kondisi harga di Jakarta;
13. Belum semua OPD Provinsi Banten melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
14. Belum tersedianya data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
15. Belum ada database investor/pengusaha dalam dan luar negeri;

16. Belum adanya legalitas untuk mencantumkan produk kesenian dan produk unggulan Banten yang dapat mencerminkan Jati diri Provinsi Banten;
17. Beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. Belum tersusunnya kinerja secara menyeluruh yang menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan;
20. Belum Optimalnya kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi , Kabupaten/Kota dan Stakeholder;
21. Belum terbangunnya jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan.
22. Belum terbentuknya Tim Koordinasi terkait dengan Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat;

b. Solusi

1. Dilakukan Penentuan SPJ kantor (Badan) harus 75% agar dapat mengajukan GU (ganti uang) sehingga kegiatan tidak harus menunggu kegiatan lain selesai;
2. Hasil Evaluasi DPA oleh Inspektorat dilakukan seharusnya pada masa Penyusunan RKA sehingga pelaksanaan kegiatan dapat diserap sesuai dengan DPA;
3. Kedepan Tim SIMDA Provinsi Banten dan Dinas Kominfo agat meningkatkan peran aktifnya untuk keberlangsungan SIMDA online sehingga tidak terjadi kembali SIMDA of line yang dapat menghambat proses pertanggungjawaban Bendahara dan penyusunan laporan kegiatan dan keuangan, akutansi neraca dan aset;
4. Penentuan GU UP per SKPD agar ditinjau dan dihitung kembali sehingga proses ganti uang dan kesedian anggaran tiap OPD dapat mendukung kelancaran kegiatan;
5. Akan diupayakan dan berkoordinasi dengan mitra OPD yang menangani produk kesenian;
6. Perlu dibuat Nota Dinas tindak lanjut hasil narasumber Instrumen sebagai bahan perencanaan kegiatan saresehan dan pengendalian

dan evaluasi kegiatan. Sehingga ada kesinambungan pertemuan. Topik/Tema yang berkaitan dengan tupoksi/IKU Badan Penghubung

7. Agar dilakukan mapping antara Badan Penghubung dengan ARTP terkait kegiatan (lihat PP nomor 18 tahun 2016).
8. Pengelolaan Wisma tidak berhubungan dengan nomenklatur penyelenggaraan pemerintah daerah di Sarankan tupoksinya dipindah/ dirubah;
9. Perlu adanya Koordinasi dan mapping antara badan penghubung dan dinas penanaman modal terkait pembagian tugas;
10. Akan dibuat rumusan, usulan kajian dan konsep tentang hubungan kelembagaan, dan usulan tentang kerjasama pembangunan. Serta hubungan kelembagaan dipindahkan ke fasilitasi penyelenggaraan;
11. Agar ditampilkan kegiatan yang terkait dengan investasi serta dikoordinasikan, mapping dengan dinas terkait;
12. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran serta kegiatan dilakukan secara selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
13. Kedepan harga satuan harus disesuaikan dengan kondisi di Jakarta dan dimasukkan dalam Pergub;
14. Kedepan akan dilaksanakan dan koordinasi untuk semua SKPD Provinsi Banten agar melibatkan/mengikutsertakan Kantor Penghubung dalam melakukan koordinasi ke Pemerintah Pusat serta kegiatan-kegiatan selama di Jakarta;
15. Kedepan akan diupayakan data secara lengkap jenis dan jumlah Paguyuban Warga Banten di Jabodetabek;
16. Kedepan akan diupayakan data base investor/pengusaha dalam dan luar negeri;
17. Perlu ditinjau kembali beban tugas dan kesenjangan kewenangan Badan Penghubung, para Kepala Badan Penghubung sepakat perlu adanya peningkatan kelembagaan menjadi Esselon II;
18. Perlu adanya jaringan kerja antara Badan Penghubung dengan Kabupaten/Kota;
19. Badan Penghubung harus menyusun SOP semua Kinerja;
20. Harus mengoptimalkan kerja Tim Pameran, Event dan Promosi dengan OPD Provinsi, Kabupaten/Kota dan Stakeholder;

21. Perlu membangun jaringan promosi dengan berbagai pihak yang lebih sinergis, kontinyu dan saling menguntungkan;
22. Akan mengusulkan Tim Koordinasi tentang Penyelesaian permasalahan Teknis OPD di Pemerintah Pusat.

2.3.26 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan didukung oleh 3 program dan 14 kegiatan yang dilaksanakan pada Inspektorat Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp18.797.378.100 dan realisasi sebesar Rp15.222.005.477 atau sebesar 80,98% dengan realisasi fisik sebesar 95%.

Permasalahan

1. Terdapat beberapa kegiatan serapan anggaran tidak mencapai target, antara lain : disebabkan adanya efisiensi anggaran dari nilai kontrak, nilai barang dan jasa, efisiensi perjalanan dinas, penginapan, honorarium pengawas, honorarium panitia dan honorarium narasumber;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor disebabkan pengadaan kendaraan roda 2 yang dibatalkan, dan Alat komunikasi;
3. Kegiatan peningkatan kapasitas Aparatur disebabkan tolok ukur kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu;
4. Kegiatan penanganan kasus-kasus pengaduan dilingkungan pemerintah disebabkan pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat.

2.3.27 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan didukung oleh 5 program dan 28 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Pemerintahan, dan Biro Administrasi Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp41.637.536.400 dan realisasi sebesar Rp35.140.132.543 atau sebesar 84,40% dengan realisasi fisik sebesar 96,28%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan, adalah:

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Tenaga Pendidik, pada kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

2.3.28 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan didukung oleh 4 program dan 103 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Biro Umum Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp199.717.953.995 dan realisasi sebesar Rp126.055.220.948 atau sebesar 63,12% dengan realisasi fisik sebesar 98,56%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan, adalah:

- Badan Pendapatan Daerah

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dimana masih dijumpainya keterlambatan para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam menyampaikan laporan kegiatan dan masih adanya perbedaan data di bidang-bidang yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.
2. Adanya keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses Lelang, adanya pengunduran diri

penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja barang pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah *out of stock/discountinue* atau *indent*;

3. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran pada UPT DPPKD Pandeglang jumlah anggaran sebesar Rp2.413.963.000 dan realisasi sebesar Rp1.765.380.291 atau 73,13%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Penyediaan BBM. Terdapat kekeliruan penganggaran belanja BBM yang tidak sesuai standar satuan harga Provinsi Banten maka PPTK berinisiatif merubah alokasi belanja tersebut melalui mekanisme pergeseran anggaran namun usulan pergeseran tidak terlaksana, maka belanja tersebut disesuaikan dengan proses perubahan anggaran yang menyebabkan jadwal pelaksanaan berubah dan proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal;
- Penyediaan Jasa Telepon, Air dan Jasa Listrik. Karena terdapat rencana menaikkan kapasitas daya listrik pada UPT Pandeglang dari daya 1005.000Kwa menjadi 135.000Kwa, maka PPTK berinisiatif mengalokasikan dalam usulan pergeseran anggaran TA.2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana yang mengakibatkan penyerapan anggaran tidak maksimal;
- Belanja Perjalanan Dinas. karena dibulan Januari terdapat pengisian jabatan pada UPT Pandeglang yang bertambah jumlah pegawainya sehingga jumlah belanja perjalanan dinas memerlukan penyesuaian, maka PPTK berinisiatif mengusulkan usulan pergeseran anggaran TA. 2017 namun usulan pergeseran tidak terlaksana proses penyerapan hanya terdapat waktu 2 (dua) bulan sehingga tidak terlaksana dengan maksimal.

4. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Rangkasbitung jumlah anggaran sebesar Rp350.580.000 dan realisasi sebesar Rp95.631.035 atau 27,28%, rendahnya penyerapan diakibatkan :

- Terdapat rehab gedung kantor pada kegiatan tersebut yang tidak dilaksanakan karena pada bulan Mei 2017 pegawai pada

UPT Rangkasbitung menempati gedung baru dan gedung tersebut dan gedung tersebut belum bisa dilakukan renovasi/rehab karena masih dalam pemeliharaan pihak ketiga;

- Efisiensi Pemeliharaan Kendaraan dinas yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan kendaraan;
 - Efisiensi Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor yang kami lakukan sesuai dengan kondisi kerusakan alat perlengkapan kantor tersebut.
5. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor pada UPT DPPKD Balaraja jumlah anggaran sebesar Rp1.975.566.000 dan realisasi sebesar Rp1.366.094.320 atau 69,15%, rendahnya penyerapan diakibatkan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan pada APBD Perubahan TA.2017, waktu pelaksanaan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan proses *e-Catalog*, adanya pengunduran diri penyedia pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan belanja modal alat kantor lainnya dan alat rumah tangga lainnya pada akhirnya barang yang dibutuhkan sudah out of stock atau indent.
6. Beberapa kegiatan terdapat efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel, meliputi :
- Kegiatan Keberatan dan Restitusi jumlah anggaran sebesar Rp268.728.000 dan realisasi sebesar Rp159.696.000 atau 59,43%;
 - Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Retribusi jumlah anggaran sebesar Rp172.265.000 dan realisasi sebesar Rp98.131.000 atau 56,97%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu :

- Efisiensi terkait adanya kebijakan pimpinan untuk tidak melaksanakan rapat di luar kantor (Hotel), uang saku peserta tidak diserap karena peserta yang hadir hanya dari OPD Provinsi Banten dan perlengkapan peserta berupa tas tidak diserap karena tidak sesuai dengan SSH;
 - Efisiensi dari Belanja Sewa Ruang Rapat/Tempat Pertemuan dikarenakan Peraturan Gubernur Banten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA. 2017 tentang Pembatasan kegiatan Pertemuan/rapat diluar kantor yang tidak memperbolehkan melakukan kegiatan di luar kantor atau menyewa rapat pertemuan di hotel.
 - Kegiatan Pembinaan dan Bagi Hasil Pajak Kab/Kota jumlah anggaran sebesar Rp301.104.000 dan realisasi sebesar Rp162.420.500 atau 53,94%, adapun kendala lain yang mengakibatkan rendahnya penyerapan yaitu adanya kebijakan tidak diperbolehkannya Rapat di luar Kantor, narasumber maksimal 4 orang yang bisa di realisasikan, dan Perlengkapan Peserta yang tidak boleh di serap; dan
7. Kegiatan Intensifikasi Pendapatan Lain-lain di wilayah UPT DPPKD Cilegon jumlah anggaran sebesar Rp22.700.000 dan realisasi sebesar Rp18.100.000 atau 79,74%, rendahnya penyerapan diakibatkan :
- Dalam pendataan pemakaian BBM pada SPBU dan sektor industri, anggaran penyerapan hanya sebesar 79,74% dikarenakan dalam pengeluaran uang saku pendataan pemakaian BBM Nilai Penyerapan Anggaran sebesar Rp14.600.000 sehingga sisa yang tidak terserap sebesar Rp4.600.000 yang diakibatkan terdapat kesalahan perhitungan alokasi anggaran kas perubahan yang seharusnya untuk dua bulan tetapi diinput satu tahun anggaran.

b. Solusi

Solusi yang dapat ditempuh terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, antara lain:

1. Pada Penyusunan Rencana Kerja sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, dan Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Jadwal yang telah ditetapkan;
2. Agar terus ditingkatkan kedisiplinan para PPTK dalam menyampaikan progres kegiatan;
3. Perlunya penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi;
4. Koordinasi intensif antar bidang dan institusi terkait terus diperkuat; dan
5. Perlu dilakukan koordinatif planning dalam penyusunan anggaran sesuai kebutuhan yang rasional.

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah di beberapa kegiatan yang serapan anggaran dibawah 85%. hal ini disebabkan karena efisiensi, yaitu: Efisiensi pada Belanja Jasa Narasumber, Belanja Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Efisiensi dari kontrak/LS, Belanja Sewa Tempat/Ruang Rapat (Pelaksanaan kegiatan dikantor), Belanja Sertifikasi, dan Pelaksanaan kegiatan diluar kendali Pengguna Anggaran (Verifikasi DPA 2018, Bimtek Simral, Sosialisasi Perda BMD).

b. Solusi

Solusi dari permasalahan yang terjadi pada Program Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah, dan Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
2. Meningkatkan kecermatan pada saat penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA;
3. Meningkatkan Kapasitas SDM pelaksana kegiatan secara berkesinambungan, dan Meningkatkan kualitas kegiatan.

- Biro Umum

a. Permasalahan

Kegiatan Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pemerintah Provinsi Banten dengan pekerjaan Pengadaan Tanah Rencana Waduk Sindang Heula lanjutan seluas ±71,1 Ha terlaksana 89 bidang dengan luas 225,054 m² (22,5 Ha). Sisanya tidak terlaksana karena lahan seluas 35 Ha dalam sengketa hukum dan 13,6 Ha dengan bukti kepemilikan tanah belum jelas.

b. Solusi

1. Mengalokasikan anggaran pada tahun anggaran 2018 untuk sisa tanah seluas 48,6 Ha yang belum dibayarkan pada tahun anggaran 2017;
2. Melakukan pembayaran melalui konsinyasi terhadap tanah sengketa pada tahun anggaran 2018.

2.3.29 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian

Pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian didukung oleh 3 program dan 16 kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Alokasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp11.573.227.500 dan realisasi sebesar Rp8.091.089.055 atau sebesar 69,91% dengan realisasi fisik sebesar 89,53%.

Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Pengadaan Mesin Absensi untuk SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pengesahan DPPA Tahun 2017 ditetapkan dengan waktu yang sedikit sehingga jadwal pelaksanaan tidak memungkinkan untuk direalisasikan, sehingga rencana pemasangan jaringan dan instalasi mesin absensi bagi SMA/SMK se-Provinsi Banten pada Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pegawai tidak dapat dilakukan mengingat teknis pelaksanaan sesuai perencanaan tidak mungkin dilakukan;

2. Kegiatan Pembinaan Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai pada tolak ukur Pengukuran kinerja pegawai terkendala oleh pemahaman Perangkat Daerah dalam penerapan sistem kinerja, sehingga dibutuhkan waktu yang cukup untuk memahami secara utuh system kinerja dimaksud;
3. Dalam rangka pengoptimalisasi pelaksanaan Pengelolaan Jabatan Fungsional penganggaran kegiatan tersebut dirasionalisasi, akan tetapi pada perubahan anggaran tidak dirubah sehingga berdampak pada penyerapan anggaran;
4. Pelaksanaan beberapa tolak ukur seperti Pelantikan dan Sidang Baperjakat Jabatan Struktural tidak dilaksanakan pada Tahun 2017 sedangkan komponen lainnya terdapat rasionalisasi terkait dengan pemberian honorarium bagi ASN Provinsi Banten;
5. Pelaksanaan Seleksi Perpindahan PNS ke Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten tidak dapat dilaksanakan karena Badan Kepegawaian Daerah masih menganalisa terkait kebutuhan pegawai didasarkan oleh Analisis Beban Kerja dan Analisis Beban Kerja yang telah dilaksanakan oleh Biro Organisasi.

b. Solusi

1. Proses perencanaan harus dianggarkan pada DPA murni sehingga ketersediaan waktu sangat banyak;
2. Harus ada sosialisasi, pendampingan dari Tim terkait OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten;
3. Pengelolaan Manajemen Jabatan Fungsional dilingkungan Pemprov Banten akan lebih efektif dijalankan dengan cara langsung berkoordinasi dengan OPD terkait karena karakteristik di tiap-tiap OPD berbeda-beda;
4. Dalam penyusunan anggaran kedepan harus mempedomani ketentuan yang berlaku.

2.3.30 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

1. Permasalahan Pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Teknis Substantif, Fungsional, Manajemen dan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan terdapat efisiensi kontrak, efisiensi honor narasumber dan efisiensi uang saku peserta. Selain itu terdapat peserta yang dipanggil untung mengikuti Diklat, namun tidak menghadiri baik dikarenakan ketidaksesuaian kriteria, mendapatkan penugasan lain, maupun tidak ada konfirmasi ketidakhadiran;
2. Pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan, terdapat perubahan alokasi anggaran jumlah peserta Diklat dari Kabupaten Lebak, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang;
3. Pada Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasana Kantor , Terdapat efisiensi kontrak dan anggaran yang tidak digunakan pada honorarium pejabat/ pokja/ panitia pengadaan barang dan jasa, belanja premi asuransi BMD, dan belanja pajak BBNKB;
4. Pada kegiatan penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, Terdapat efisiensi dan anggaran tidak digunakan karena; adanya perubahan harga, stok yang masih tersedia, pemakaian dibawah perkiraan anggaran;
5. Sedangkan pada kegiatan lainnya secara umum, terdapat efisiensi baik pada kontrak, honorarium narasumber, maupun anggaran yang tidak digunakan karena efisiensi.
6. Pengesahan APBD Perubahan pada triwulan ke-empat (Bulan November) berimplikasi pada padatnya kegiatan di dua bulan terakhir, sedangkan sarana dan prasarana kediklatan khususnya kelas dan asrama masih terbatas;
7. Kurangnya dukungan OPD untuk mengirimkan peserta Diklat sesuai dengan kompetensi/ Kriteria yang dipersyaratkan;
8. Tingginya Kebutuhan Diklat melalui usulan yang disampaikan baik oleh OPD Provinsi Banten, BKPP/BKPSDM Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Banten, maupun Lembaga/ Instansi Vertikal belum seiring dengan ketersediaan sarana utama maupun sarana penunjang Kediklatan;

9. Rencana Operasional Kegiatan (ROK) belum dapat di laksanakan Tepat waktu.
- b. Solusi
1. Telah dilakukan perbaikan dalam tahapan perencanaan kegiatan Diklat Tahun 2018 melalui proses *e-planning* (SIMRAL), sehingga diharapkan serapan antara realisasi sejalan dengan perencanaan;
 2. Telah dibuat kalender penyelenggaraan Diklat Tahun 2018, tujuannya agar OPD dapat menyiapkan ASN yang akan mengikuti Diklat selama Tahun 2018 agar sesuai dengan peta kebutuhan kompetensi. Selain itu kalender menjadi kontrol agar terdapat kesesuaian antara jadwal Diklat dengan ketersediaan pengajar, ketersediaan ruang kelas dan asrama;
 3. Selesaiannya pembangunan Gedung Assessment, Gedung Kantor, Asrama VIP dan Gedung Ruang makan/ dapur menjadi solusi keterbatasan sarana;
 4. Diharapkan BKD memberikan teguran kepada Intansi yang tidak mengirimkan Peserta Diklat yang telah ditetapkan;
 5. OPD diharapkan melakukan proses seleksi internal sebelum mengirimkan peserta Diklat, agar sesuai dengan kompetensi, ketentuan serta kebutuhan;
 6. Terkait perubahan peraturan terkait penyelenggaraan Diklat yang bersifat Dinamis baik pada Diklat Pim, Diklat Teknis dan Fungsional akan dilakukan konsultasi dan koordinasi baik dengan LAN, BPSDM Kemendagri, serta lembaga terkait.

2.3.31 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan dan Solusi pada Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, adalah:

a. Permasalahan

Desain Pemetaan Untuk Perluasan dan Pemerataan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten; dan Kajian Relevansi Pendidikan Kejuruan Melalui Strategi Kemitraan SMK Industri di Provinsi Banten, pada kegiatan Penelitian Sosial, Pemerintah, Ekonomi, Dan Pembangunan, tolok ini direncanakan dilaksanakan secara swakelola dan bekerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), namun dikarenakan tidak tidak

terjadi Kesepakatan Antara UPI dan Pemprov Banten.

b. Solusi

Agar dimasukkan kembali pada tolok ukur ini kedalam Rencana Kerja Bappeda Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makro ekonomi semata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Perubahan Tahun 2019 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2018, proyeksi Tahun 2019 dan 2020. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2018.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan RKPD tahun ke 2 RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2019 diharapkan mampu mencapai misi ke 5 RPJMD yakni Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. Secara detail, misi ke 5 bermakna:

1. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
2. Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
5. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalam rangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi

Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya disajikan pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Target Pembangunan Ekonomi Banten Tahun 2018-2022

Indikator	Satuan	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.00	6.20	6.40	6.70	7.00
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8.45	8.20	7.95	7.68	7.40
Angka Kemiskinan	Persen	5.13	5.00	4.87	4.74	4.60
Gini Ratio	Poin	0.39	0.39	0.38	0.37	0.37

Sumber : RPJMD Banten 2017-2022

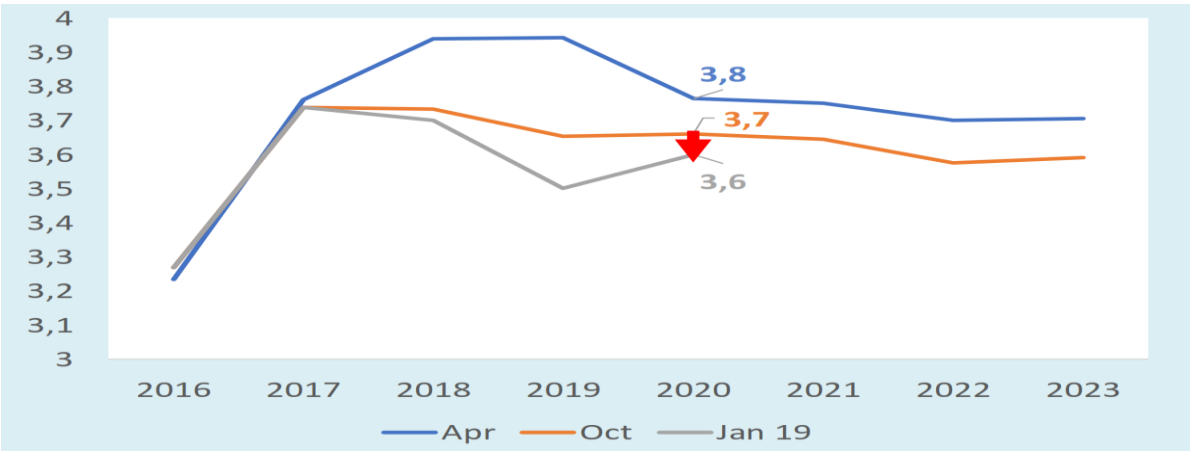
Target pembangunan ekonomi tersebut sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional dalam kondisi baik. Namun demikian kondisi perekonomian global, nasional, maupun regional sangat dinamis. Hal tersebut tentunya berpengaruh dalam Pencapaian Target Pembangunan di Provinsi Banten pada Tahun 2019.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Global

Berdasarkan estimasi *World Economic Outlook* (WEO) pada Oktober 2018, Ekspansi Ekonomi Global melemah, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan sebesar 3.7 persen. Kinerja Ekonomi di beberapa negara melambat terutama Eropa dan Asia. Ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat sebesar 3,5 persen pada 2019 dan 3,6 persen pada tahun 2020. Penurunan pertumbuhan ekonomi terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi negara maju diproyeksikan berada pada kisaran 1,7 persen sedangkan pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang pada kisaran 5,0 persen.

Gambar 3.1

Outlook Pertumbuhan Ekonomi Dunia



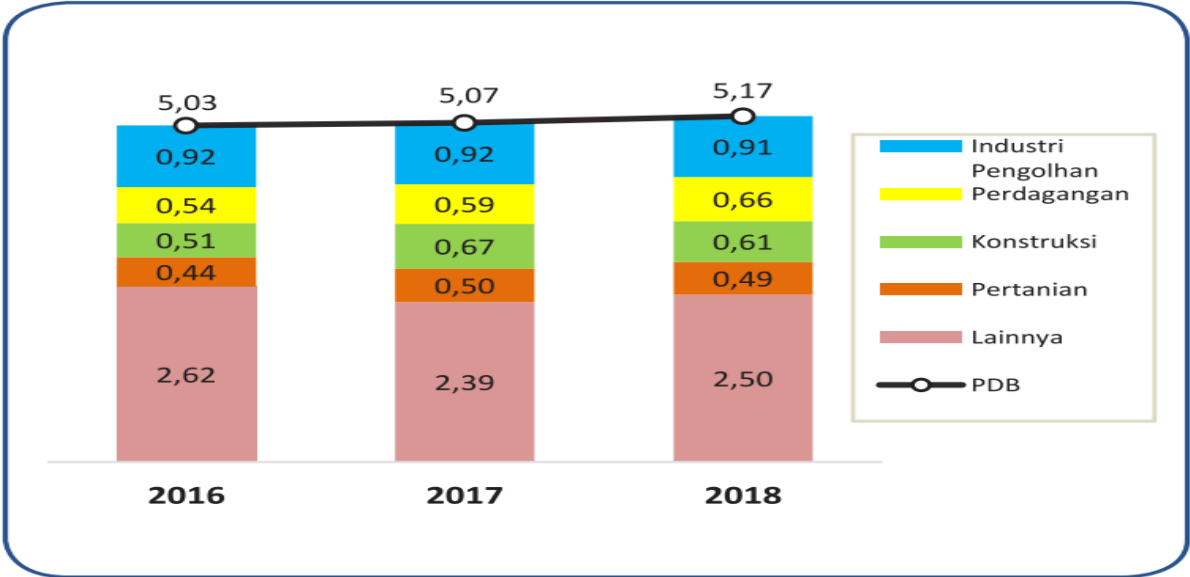
Sumber : WEO, IMF, Januari 2019

Perkembangan perekonomian dunia pada tahun 2020 diprediksi masih terpengaruh oleh ketegangan perdagangan Amerika-China. Pemeberlakuan standar emisi bahan bakar kendaraan oleh Jerman, kontraksi ekonomi Turki, kondisi perlambatan pertumbuhan ekonomi juga dapat diperparah dengan tingginya utang publik dan swasta. Selain itu penarikan tanpa kesepakatan oleh Inggris dan Uni Eropa berdampak lebih besar dari yang diperkirakan China.

3.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia digambarkan terus menguat dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sebesar 5,03 persen, tahun 2018 sebesar 5,07 persen, dan proyeksi tahun 2019 sebesar 5,17 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 0,91 persen, diikuti Perdagangan sebesar 0,66 persen, Konstruksi sebesar 0,61 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,50 persen, dan Informasi dan Komunikasi sebesar 0,36 persen, lapangan usaha lainnya sebesar 2,14 persen.

Gambar 3.2
Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2018 (persen)

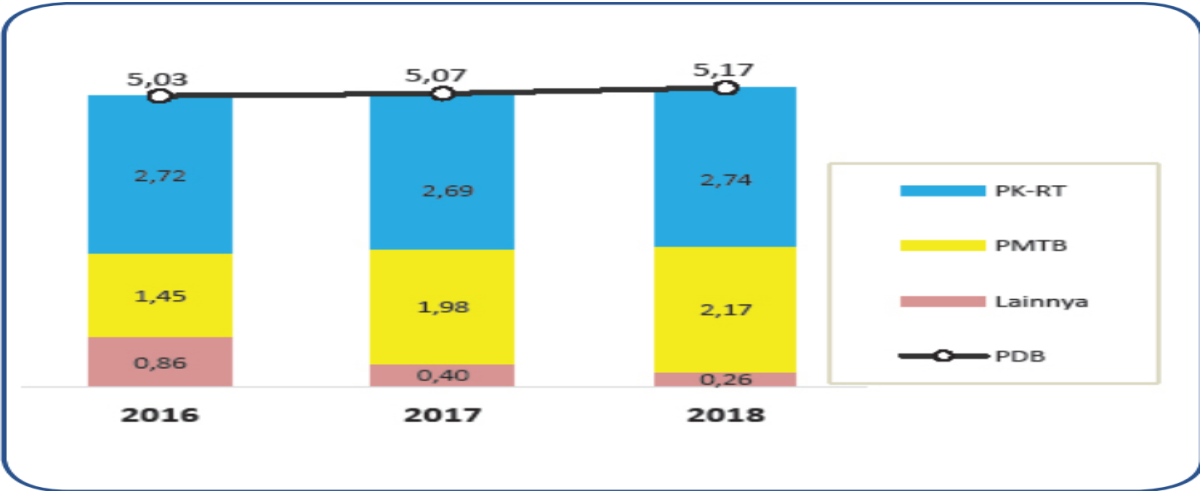


Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 5,17 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua komponen, yaitu Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT), PK-LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto

(PMTB), dan Ekspor Barang dan Jasa. Sementara komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan, namun komponen ini merupakan factor pengurang. Komponen PKLNPRRT merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 9,08 persen; diikuti Komponen PMTB sebesar 6,67 persen; dan Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 6,48 persen.

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sedangkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari komponen Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Komponen PK-RT sebesar 2,74 persen; yang diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 2,17 persen. Sementara sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia dari komponen lainnya sebesar 0,26.

Gambar 3.3
 Sumber Pertumbuhan PDB Menurut Pengeluaran
 Tahun 2016–2018 (persen)

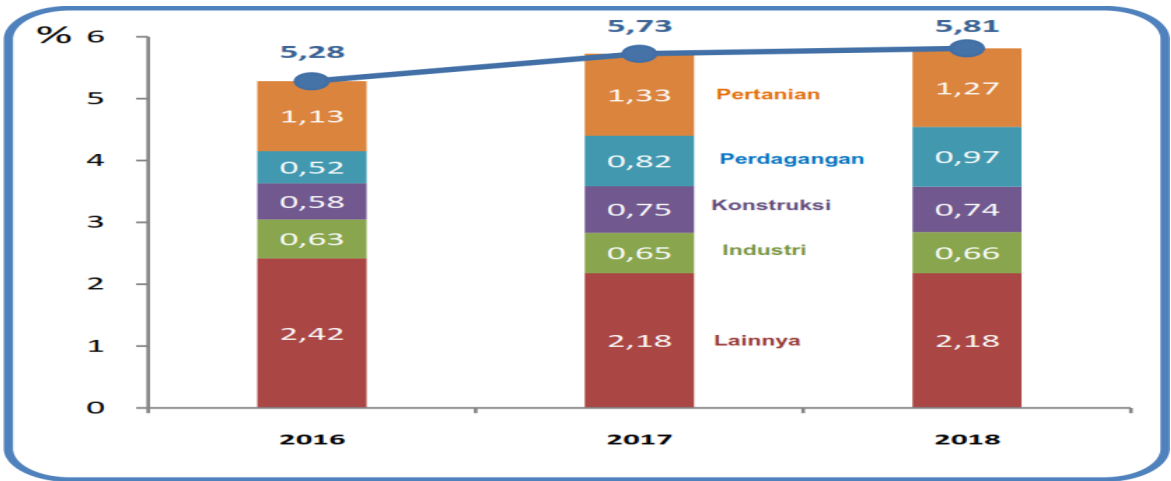


3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Banten

Perekonomian Banten Tahun 2018 yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 614,91 triliun dan PDRB Perkapita mencapai Rp 48,46 juta. Ekonomi Banten tahun 2018 tumbuh 5,81 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,73 persen. Sementara pada triwulan I 2019 (YoY) tumbuh sebesar 5,42 persen.

Gambar 3.4

Sumber Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Tahun 2016-2018

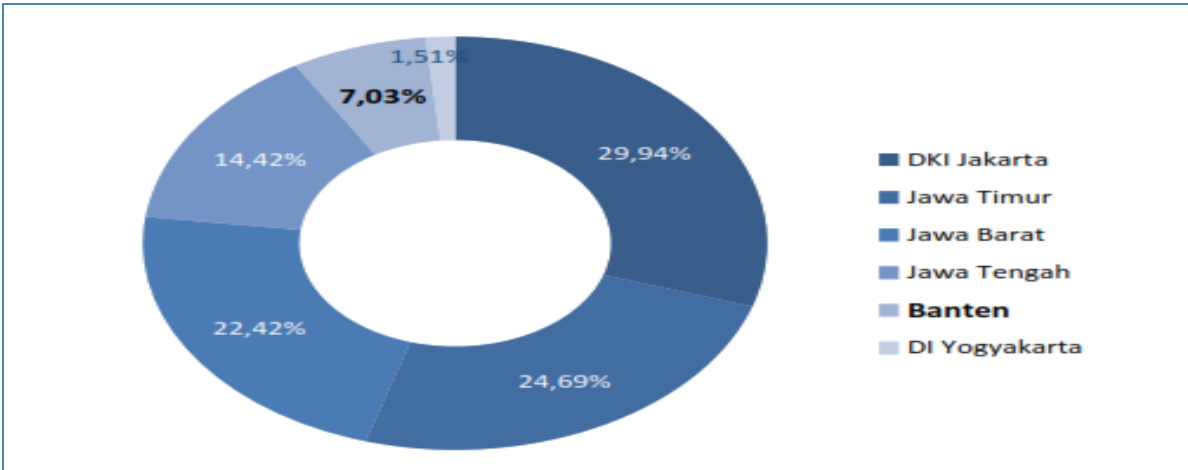


Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Real Estate sebesar 7,88 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Pemerintah yang tumbuh sebesar 7,14 persen. Ekonomi Banten triwulan IV-2018 (YoY) tumbuh 5,98 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,11 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 7,88 persen.

Ekonomi Banten triwulan I 2019 (YoY) tumbuh 5,42 persen melambat dibandingkan dengan capaian triwulan I 2018 sebesar 5,84 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 8,98 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang tumbuh 7,38 persen

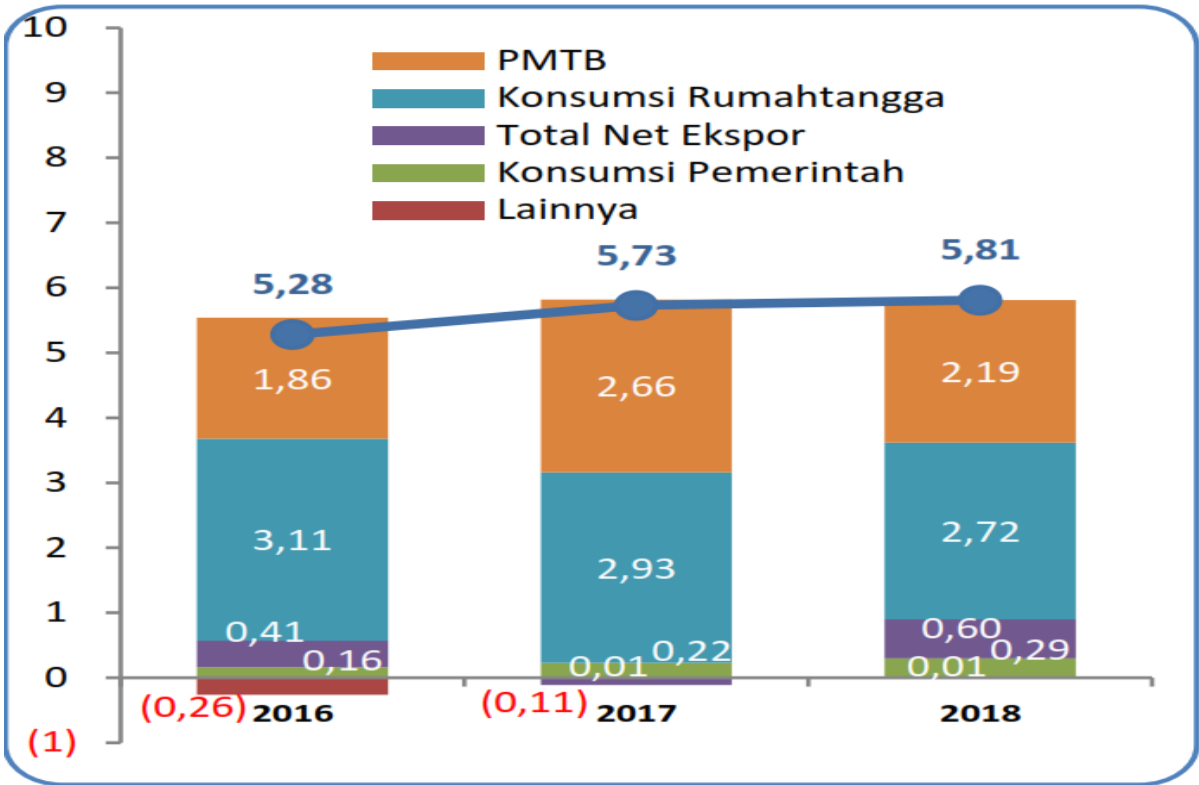
Struktur perekonomian Provinsi se-Jawa pada triwulan I-2019 masih didominasi oleh Provinsi DKI Jakarta yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto se-Jawa sebesar 29,94 persen, kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur sebesar 24,69 persen, Provinsi Jawa Barat sebesar 22,42 persen. Sementara itu, Provinsi Banten memberikan kontribusi sebesar 7,03 persen

Gambar 3.5
Kontribusi PDRB se- Jawa TW I 2019



Sumber : BPS Provinsi Banten

Gambar 3.6
Sumber Pertumbuhan Beberapa Komponen Tahun 2016-2018



Tabel 3.2

PDRB Provinsi Banten Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010

Menurut Pengeluaran Tahun 2018 – TW I 2019 (Triliun Rp)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019	Triwulan I-2018	Triwulan IV-2018	Triwulan I-2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah tangga	77,10	82,95	84,03	60,32	63,14	63,47
2. Konsumsi LNPRT	0,67	0,73	0,74	0,52	0,55	0,56
3. Konsumsi Pemerintah	5,03	9,50	5,47	3,42	6,32	3,63
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	45,60	51,85	51,29	32,40	35,68	34,55
5. Perubahan Inventori	0,08	0,01	0,01	0,08	0,01	0,01
6. Total Net Ekspor	18,50	14,83	18,29	8,41	5,58	8,63
6.a. Total Ekspor	106,04	115,69	109,84	81,60	86,38	82,76
6.b. Total Impor	87,54	100,86	91,55	73,18	80,80	74,13
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	146,97	159,87	159,83	105,15	111,28	110,86

Tabel 3.3

Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Provinsi Banten Menurut

Pengeluaran Tahun 2016-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran	Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010			Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Konsumsi Rumah tangga	5,39	5,08	5,27	52,68	52,26	52,35
2. Konsumsi LNPRT	4,19	3,28	6,77	0,46	0,45	0,46
3. Konsumsi Pemerintah	3,85	5,30	7,14	4,42	4,37	4,43
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,30	8,91	7,12	29,69	30,72	31,42
5. Perubahan Inventori	(90,46)	(5,64)	9,21	0,01	0,01	0,02
6. Total Net Ekspor:	5,30	(1,40)	3,74	12,75	12,19	11,32
6.a. Total Ekspor	2,32	9,57	3,47	72,83	74,44	73,19
6.b. Total Impor	2,01	10,77	3,44	60,08	62,25	61,87
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	5,28	5,73	5,81	100,00	100,00	100,00

Pengeluaran kapital (PMTB) selama periode tahun 2016 - 2018 memberikan kontribusi cukup besar yaitu sekitar 29-31 persen, dengan kontribusi pada tahun 2016 sebesar Rp115,88 Triliun, Tahun 2017 sebesar Rp126,21 Triliun dan tahun 2018 sebesar Rp135,19 triliun.

Tabel 3.4

Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Banten, 2016 – 2020

Uraian	2016	2017	2018	RKPD TAHUN 2019	
				MURNI	PERUBAHAN
1. PMTB adhk 2010	115,88	126,21	135,19	135,30	135,30
2. Pertumbuhan PMTB adhk 2010 (Persen)	6,3	8,91	7,12	7,44	7,44

Sumber : BPS dan Bappeda Provinsi Banten proyeksi*

Sebagaimana proyeksi Bank Indonesia bahwa Perekonomian Provinsi Banten Tahun 2019 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,6 - 6,0% (YoY). Dari Sisi permintaan, pelaksanaan konstruksi beberapa proyek pembangunan infrastruktur terutama proyek nasional serta adanya rencana ekspansi pabrik beberapa pelaku usaha di Provinsi Banten akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dari komponen investasi. Komponen konsumsi diperkirakan akan tumbuh menguat di tahun 2019 terutama konsumsi rumah tangga. Dari sisi ekspor diperkirakan akan tumbuh positif disukung oleh perdagangan antar daerah terutama untuk komoditas logam dasar dan kimia serta ekspor produk manufaktur tertentu seperti alas kaki, tekstil dan produk tekstil, serta makanan dan minuman. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan melambat dibandingkan dengan tahun 2018 menyebabkan bias ke bawah ekonomi nasional.

Sementara dari sisi penawaran pertumbuhan ekonomi provinsi banten terutama didorong oleh sector industri pengolahan seiring dengan ekspektasi menguatnya kinerja penjualan dari sisi domestic dan ekspor, di sisi lain sector perdagangan diperkirakan berada dalam tren akselerasi menyusul masih kuatnya konsumsi masyarakat tahun 2019.

Tabel 3.5

Capaian Pertumbuhan Ekonomi 2017, 2018, TW I 2019, dan Target 2019 (persen)

URAIAN	REALISASI				TARGET RKPD 2019	
	2016	2017	2018	TW I 2019	MURNI	PERUBAHAN
Dunia	n.a.	3,7	3,5	n.a.	3,6	n.a.
Nasional		5,07	5,17	5,07	5,3	n.a.
Banten	5,28	5,73	5,81	5,42	5,6-6,0	5,6-6,0

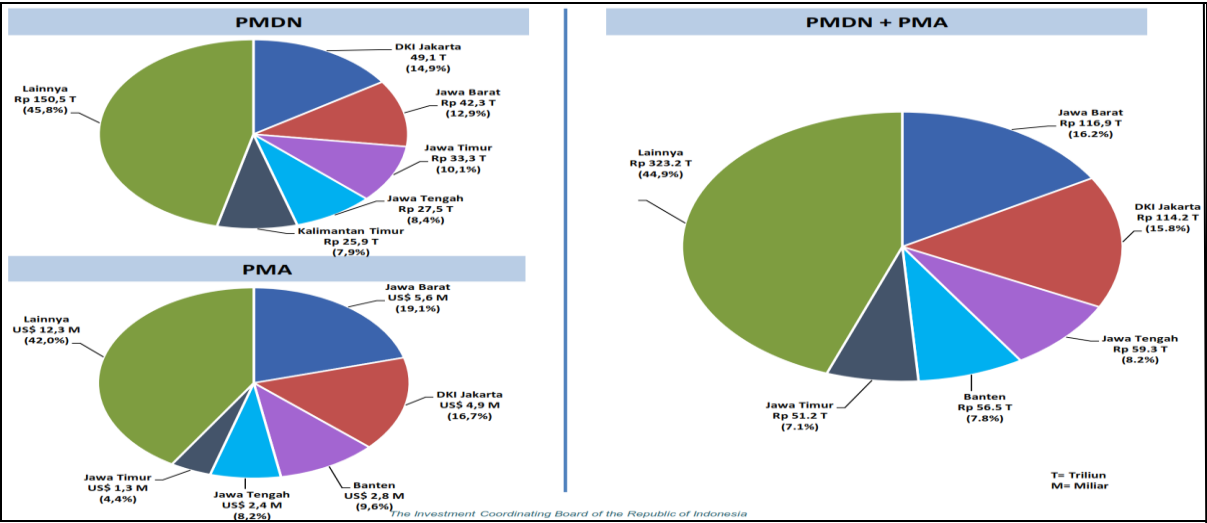
3.1.4 Penanaman Modal

Perkembangan perekonomian PMA dan PMDN di Provinsi Tahun 2016-2018 menunjukkan bahwa Provinsi Banten masih sangat menarik bagi Investor. Sektor yang sangat diminati oleh investor yaitu :

- 1) Listrik, gas, dan air sebesar ;
- 2) Transportasi, Pergudangan, dan telekomunikasi;
- 3) Pertambangan;
- 4) Pengolahan makanan; dan
- 5) Perumahan, kawasan industri, dan perkantoran.

Gambar 3.7

Realisasi investasi berdasarkan lokasi Januari – Desember 2018



Sumber: BKPM RI

Tabel 3.6

Perkembangan Realisasi Investasi PMA dan PMDN
di Provinsi Banten Tahun 2013- 2018

TAHUN	PMDN		PMA	
	PROYEK	INVESTASI (MILIAR RUPIAH)	PROYEK	INVESTASI (JUTA USD)
2016	496	12.426,3	2.161	2.912,1
2017	699	15.141,9	2.479	3.047,5
2018	718	18.637,56	1.895	2.827,3

Sumber: BKPM RI

Pada tahun 2018, PMDN Banten masuk peringkat enam setelah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk PMA, Provinsi Banten masuk pada peringkat tiga setelah

Jawa Barat dan DKI Jakarta. Secara kumulatif sepanjang Januari-Desember 2018, realisasi investasi mencapai Rp 56,5 triliun dengan kurs rupiah 13.400 per USD.

Investasi pada tahun 2019 dan 2020 diperkirakan tetap tumbuh, seiring dengan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur serta perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal. Berkurangnya ketidakpastian global seiring stance the federal reserves Amerika Serikat yang kemungkinan besar tidak menaikkan suku bunganya pada tahun 2019 diperkirakan akan mendorong minat investor asing untuk berinvestasi di negara negara emerging markets termasuk Indonesia. Realatif menurunnya ketidakpastian keuangan global serta kondisi ekonomi nasional yang membaik, turut mendorong Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Banten.

Berlanjutnya program perbaikan birokrasi perizinan dan penanaman modal atau *Online Single Submission* (OSS) yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan angka *ease of doing business* diharapkan akan meningkatkan daya Tarik investor asing ke Indonesia. Pada tahun 2018 telah berlangsung pembangunan beberapa proyek besar oleh Pemerintah dan juga sector swasta di Provinsi Banten. Penataan Kawasan Kesultann Banten diharapkan akan menambah kontribusi PDRB. Terdapat beberapa faktor resiko yang harus diwaspadai dan dapan menahan investasi. Salah satu factor resiko yang menentukan di pasar keuangan adalah masih adanya kemungkinan dinaikkannya the Fed Fund Rate oleh Federal Reserve Amerika Serikat di 2019. Kebijakan tersebut akan mendorong penguatan dolar AS.

3.1.5 Inflasi

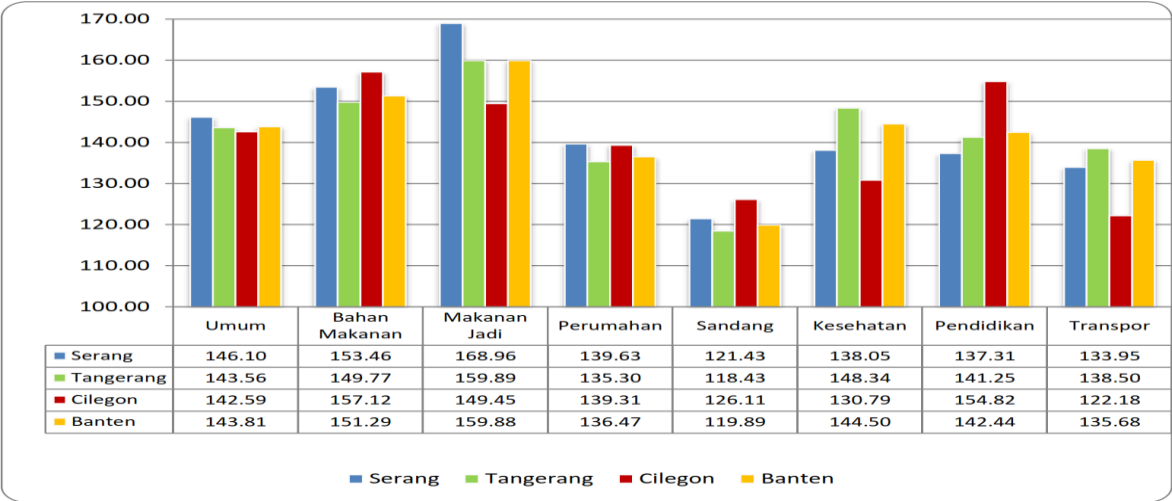
Laju inflasi tahun kalender tercatat sebesar 0,35 persen, sedangkan inflasi “*Year on Year*” (IHK Februari 2019 terhadap Februari 2018) sebesar 3,30 persen. Kemudian inflasi “*Year on Year*” (IHK Maret 2019 terhadap Maret 2018) tercatat sebesar 2,97 persen.

Tabel 3.7
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten
Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Maret 2019 (2012= 100)

Kelompok Pengeluaran (1)	IHK Maret 2018 (2)	IHK Februari 2019 (3)	IHK Maret 2019 (4)	Inflasi Maret 2019 *) (5)	Laju Inflasi Tahun 2019 **) (6)	Inflasi "Year on Year" ***) (7)
U M U M	139,66	143,70	143,81	0,08	0,43	2,97
1. Bahan Makanan	151,79	152,16	151,29	-0,57	-0,74	-0,33
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	154,71	159,28	159,88	0,38	1,26	3,34
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	131,10	136,39	136,47	0,06	1,05	4,10
4. Sandang	115,42	119,84	119,89	0,04	0,45	3,87
5. Kesehatan	137,23	144,19	144,50	0,22	0,27	5,30
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	136,43	142,59	142,44	-0,11	0,10	4,41
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	131,25	134,90	135,68	0,57	0,25	3,37

Kelompok komoditas yang memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi Banten berturut-turut sebagai berikut: kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,09 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,08 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,02 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen, kelompok sandang sebesar 0,00 persen sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar -0,01 persen dan -0,11 persen. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi selama bulan Maret 2019 antara lain bawang merah, tahu mentah, angkutan udara, pizza, bawang putih, bawal, Mujair dan gurame. Sementara komoditas yang mengalami penurunan harga paling banyak antara lain adalah tomat buah, buncis, cabe merah, daging ayam ras, cabe rawit dan kamera.

Gambar 3.8
Perkembangan IHK Kota Serang, Tangerang, Cilegon dan Banten
(2012=100) Bulan Februari 2019



Sumber: BPS Provinsi Banten

Tabel 3.8
Perbandingan IHK, Inflasi/Deflasi dan Laju Inflasi 26 Kota
Di Pulau Jawa dan Banten Bulan Maret 2019

	Kota	IHK Maret2018	IHK Maret2018	IHK Maret2019	Inflasi Maret 2019)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2019 **)	Inflasi Year on Year **)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jakarta	132,14	135,25	136,12	0,14	0,64	3,01
2.	Bogor	133,48	136,73	137,09	0,28	0,26	2,70
3.	Sukabumi	131,7	134,06	134,35	0,04	0,22	2,01
4.	Bandung	131,24	134,48	134,53	0,03	0,04	2,51
5.	Cirebon	128,11	129,98	130,27	0,18	0,22	1,69
6.	Bekasi	129,57	132,13	133,26	0,01	0,86	2,85
7.	Depok	130,68	132,93	133,45	0,24	0,39	2,12
8.	Tasikmalaya	130,96	132,23	132,67	0,03	0,33	1,31
9.	Cilacap	135,58	137,73	138,27	0,32	0,39	1,98
10.	Purwokerto	129,19	131,87	131,99	0,19	0,09	2,17
11.	Kudus	138,9	140,92	141,29	0,23	0,26	1,72
12.	Surakarta	127,76	129,30	130,05	0,29	0,58	1,79
13.	Semarang	130,71	132,70	132,95	0,34	0,19	1,71
14.	Tegal	128,62	131,35	131,44	0,20	0,07	2,19
15.	Yogyakarta	129,23	131,81	132,60	0,26	0,60	2,61
16.	Jember	127,72	130,62	130,53	-0,06	-0,07	2,20
17.	Banyuwangi	127,62	128,96	129,58	0,17	0,48	1,54
18.	Sumenep	128,12	130,78	130,62	-0,07	-0,12	1,95
19.	Kediri	127,41	129,27	129,56	0,16	0,22	1,69
20.	Malang	132,38	134,99	135,63	0,36	0,47	2,46
21.	Probolinggo	127,59	129,77	129,59	-0,12	-0,14	1,57
22.	Madiun	129,76	132,09	132,59	0,14	0,38	2,18
23.	Surabaya	132,35	135,24	135,73	0,15	0,36	2,55
24.	Tangerang	139,38	143,08	143,56	0,01	0,34	3,00
25.	Cilegon	138,85	141,62	142,59	0,37	0,68	2,69
26.	Serang	141,71	145,19	146,10	0,15	0,63	3,10
27.	BANTEN	139,66	143,70	143,81	0,08	0,43	2,97

Tabel 3.9
 Proyeksi Inflasi Provinsi Banten Tahun 2019-2020 (%)

INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET RKPD 2019			TARGET PERUBAHAN RKPD		
	2017	2018	TW I 2019	OPTIMIS	MODERAT	PESIMIS	OPTIMIS	MODERAT	PESIMIS
Nasional	3,30	3,23		2,5 – 4,5			2,5 – 4,5		
Banten	3,89	3,49	2,97	3,30	3,50	3,7	3,30	3,50	3,7

Keterangan: Sumber, BPS Provinsi Banten
 Target RKPD merupakan angka proyeksi Bappeda Provinsi Banten

3.1.6 ICOR

Nilai ICOR Total

Berdasarkan perhitungan PDRB ADHK 2010 pada Tahun 2018 PDRB Provinsi Banten tercatat sebesar 433,88 Triliun rupiah dengan Pertumbuhan sebesar 5,81 persen dari tahun sebelumnya. Pembentukan Modal Tetap Bruto dan inventori sebesar Rp 135,30 Triliun sehingga ICOR Provinsi Banten sebesar 5,36. Yang artinya untuk melakukan 1 investasi diperlukan modal sebesar 5,36. Kondisi Ideal yaitu pada ICOR pada skala 2,0 – 3,0. Hal ini juga menggambarkan bahwa Penciptaan Lapangan Kerja di Provinsi Banten masih didominasi oleh Investasi Padat Modal bukan Padat Karya.

3.1.7 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 6,142 juta orang, naik 53.916 orang dibanding Februari 2018. Meningkatnya jumlah angkatan kerja, tidak disertai dengan naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang justru mengalami penurunan sebesar 0,87 poin. Ini disebabkan oleh adanya pergeseran penduduk dari angkatan kerja ke bukan angkatan kerja. Dalam setahun terakhir, pengangguran berkurang 6.947 orang, sejalan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang turun menjadi 7,58 persen pada Februari 2019.

Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih tertinggi di antara tingkat pendidikan lain, yaitu sebesar 11,65 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 5,676 juta orang, bertambah 60.863 orang dari Februari 2018. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Perdagangan (4,53 persen poin), Konstruksi (1,34 persen poin), dan Jasa Pendidikan (1,00 persen poin Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian & Pertambangan (2,67 persen poin); Industri Pengolahan (1,52 persen poin); serta Jasa Lainnya (1,24 persen

poin). Sebanyak 2,46 juta orang (43,41 persen) bekerja di kegiatan informal. Selama setahun terakhir (Februari 2018-Februari 2019), pekerja informal turun sebesar 1,34 persen poin. Persentase tertinggi pada Februari 2019 adalah pekerja penuh (jam kerja minimal 35 jam per minggu) sebesar 78,18 persen. Sedangkan penduduk yang bekerja dengan jam kerja 1-7 jam memiliki persentase yang paling kecil, yaitu sebesar 1,24 persen. Sementara itu, pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua, yaitu pekerja paruh waktu (14,88 persen) dan pekerja setengah penganggur (5,61 persen).

Tabel 3.10
 Dekomposisi Penduduk Usia Kerja dan Indikator Ketenagakerjaan
 Provinsi Banten, Februari 2017 – Feb 2019

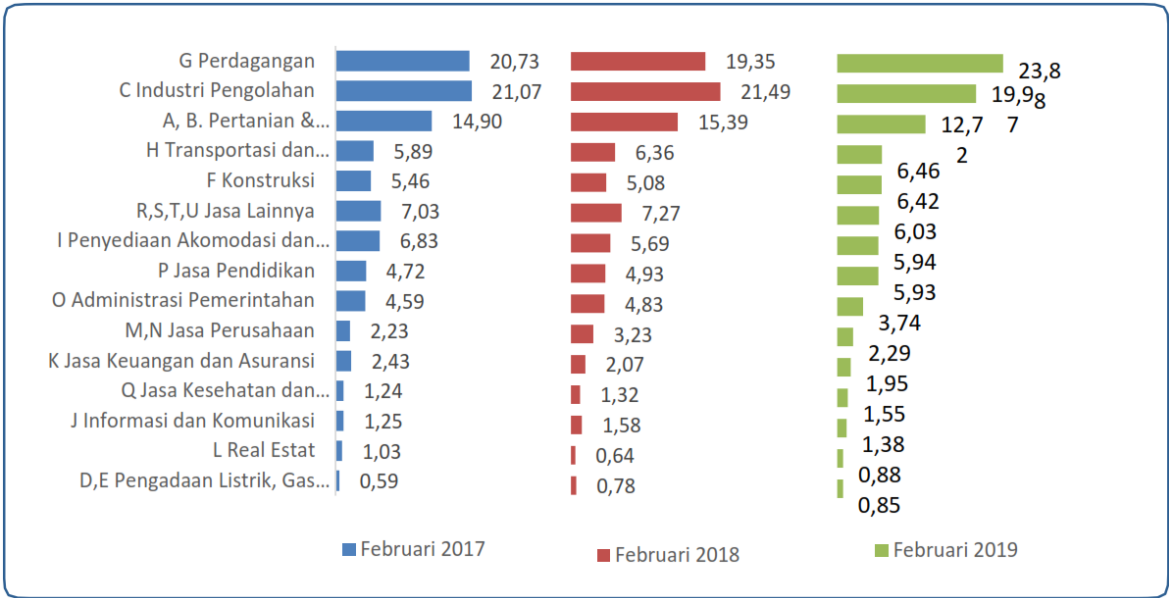
Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2017	Februari 2018	Februari 2019	Perubahan 1 Tahun (Feb 2018-Feb 2019)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	juta orang	juta orang	juta orang	juta orang	persen
Penduduk Usia Kerja	8.878,6	9.078,5	9.279,8	201,3	2,22
Angkatan Kerja	5.969,3	6.088,1	6.142,0	53,916	0,89
Bekerja	5.507,0	5.615,4	5.676,2	60,863	1,08
Pengangguran	462,3	472,8	465,8	-6,947	-1,47
Bukan Angkatan Kerja	2.909,3	2.990,4	3.137,8	147,337	4,93
Sekolah	731,0	771,2	804,6	33,421	4,33
Mengurus Rumah Tangga	1.845,2	1.914,2	2.017,6	103,374	5,40
Lainnya	333,2	305,0	315,5	10,542	3,46
	persen	persen	persen	persen poin	
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,75	7,77	7,58	-0,18	
Perkotaan	7,48	7,47	7,45	-0,03	
Perdesaan	8,39	8,47	7,91	-0,56	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,23	67,06	66,19	-0,87	
Laki-Laki	84,39	84,24	83,20	-1,04	
Perempuan	49,43	49,25	48,55	-0,69	

Sumber : BPS Provinsi Banten

Penduduk yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah penduduk yang bekerja pada setiap kategori lapangan pekerjaan menunjukkan kemampuan dalam penyerapan tenaga kerja. Struktur penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan pada Februari 2019 masih didominasi oleh tiga lapangan pekerjaan utama, yaitu: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 23,88 persen; Industri Pengolahan 19,97 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan

Perikanan sebesar 12,36 persen. Dilihat berdasarkan tren lapangan pekerjaan selama Februari 2018-Februari 2019, lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk yang bekerja terutama pada Perdagangan (4,53 persen poin), Konstruksi (1,34 persen poin), dan Jasa Pendidikan (1,00 persen poin). Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan utamanya pada Pertanian & Pertambangan (2,67 persen poin); Industri Pengolahan (1,52 persen poin); serta Jasa Lainnya (1,24 persen poin).

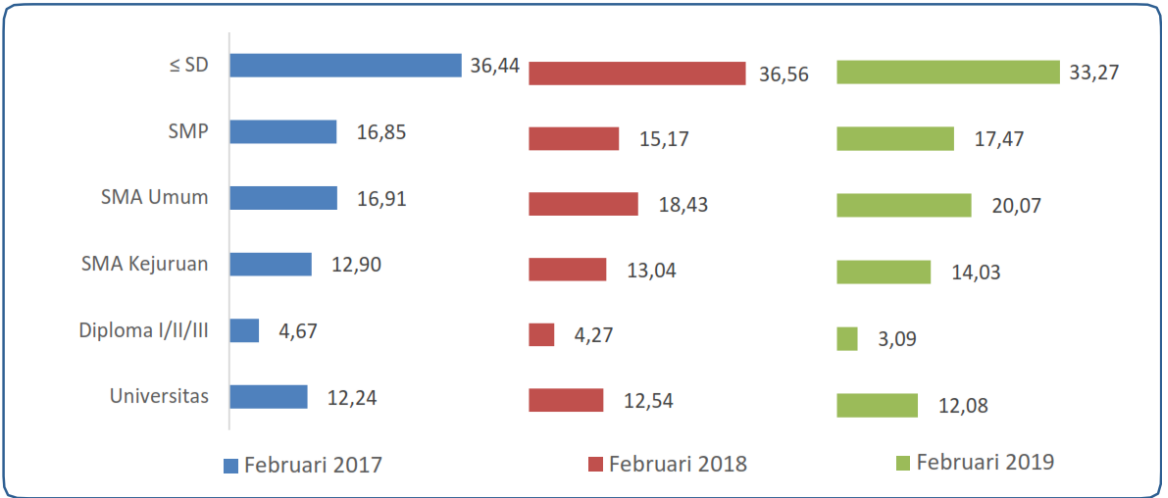
Gambar 3.9
Penduduk yang bekerja menurut status Lapangan Pekerjaan Utama
Februari 2017 - 2019



Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah sebanyak 1,89 juta orang (33,27 persen), SMA sebanyak 1,14 juta orang (20,07 persen), SMP sebanyak 991,48 ribu orang (17,47 persen), dan SMK sebanyak 796,34 ribu orang (14,03 persen). Sementara itu, penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma ke atas) ada sebanyak 861,11 ribu orang (15,17 persen) mencakup 175,33 ribu orang berpendidikan Diploma I/II/III dan 685,77 ribu orang berpendidikan Universitas Dalam setahun terakhir, persentase penduduk bekerja yang meningkat adalah mereka yang berpendidikan SMP (2,30 persen poin), SMA (1,64 persen poin), dan SMK (0,99 persen poin). Sementara penurunan persentase terutama pada penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah (3,29 persen poin), Diploma (1,18 persen poin), dan Universitas (0,46 persen poin).

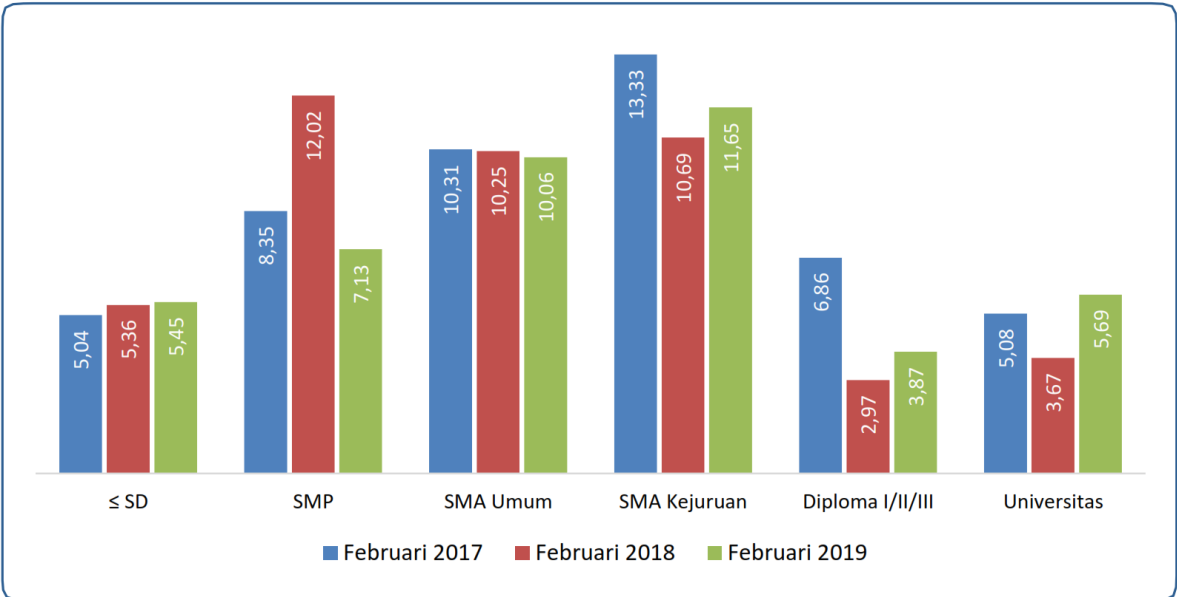
Gambar 3. 10

Pesentase Penduduk Bekerja menurut Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan
Februari 2017 – Februari 2019



Gambar 3.11

Tingkat Pengangguran menurut Pendidikan
di Provinsi Banten, Februari 2017 - Feb 2019 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Banten

Tabel 3. 11

Realisasi Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tahun 2018, Prediksi Tahun 2019, dan Proyeksi Tahun 2020

INDIKATOR	2017	2018	TW I 2019	TARGET	
				MURNI	PERUBAHAN
Nasional	5,50	5,34	5,01	4,80 – 5,20	4,8 – 5,1
Banten	9,28	8,52	7,58	8,20	7,5 – 8,20

3.1.8 Kemiskinan

Angka kemiskinan Provinsi Banten hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bulan September 2018 sebesar 5,25 persen, mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin dibanding periode sebelumnya yang sebesar 5,24 persen. Hal ini sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan yang pada Maret 2018 sebesar 4,38 persen turun menjadi 4,24 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 7,33 persen naik menjadi 7,67 persen pada September 2018. Selama periode Maret 2018 - September 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 11,67 ribu orang (dari 393,80 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 382,13 ribu orang pada September 2018), sementara di daerah perdesaan naik sebanyak 19,05 ribu orang (dari 267,55 ribu orang pada Maret 2018 menjadi 286,60 ribu orang pada September 2018). Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2018, sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 71,60 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen. Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan September 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, roti serta kopi bubuk dan kopi instan (sachet). Sementara komoditi non makanan penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di perkotaan dan perdesaan adalah sama yaitu biaya perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan perlengkapan mandi.

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan September 2018 mencapai 5,25 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2018, maka selama enam bulan terjadi peningkatan sebesar 0,01 poin (dari posisi 5,24 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan sedangkan di daerah perdesaan mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,38 menjadi 4,24 dan persentase penduduk miskin di perdesaan naik dari 7,33 pada Maret 2018 menjadi 7,67 pada September 2018. Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama bertambah sebanyak 7,38 ribu orang dari 661,36 ribu

orang pada Maret 2018 menjadi 668,74 ribu orang pada bulan September 2018.

Tabel 3.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah,
Maret 2018-September2018

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)
<u>Perkotaan</u>		
Maret 2018	393,80	4,38
September 2018	382,13	4,24
<u>Perdesaan</u>		
Maret 2018	267,55	7,33
September 2018	286,60	7,67
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>		
Maret 2018	661,36	5,24
September 2018	668,74	5,25

Sumber : BPS Provinsi Banten

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Tahun 2002 - 2018 Secara umum, pada periode 2002–2018 tingkat kemiskinan di Banten cenderung menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2006, September 2013, Maret 2015, September 2017dan September 2018. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Gambar 1 menyajikan perkembangan tingkat kemiskinan Provinsi Banten tahun 2002 sampai dengan September 2018.

Perubahan Garis Kemsikinan September 2018, Garis Kemiskinan di pergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompok kan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. perkembangan Garis Kemiskinan pada periode Maret-September 2018. Selama periode Maret-September 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar 4,42 persen, yaitu dari Rp431.069,- per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp450.108,-per kapita per bulan pada September 2018. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan(GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM),dapat dilihat bahwa peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Sumbangan GKM terhadap GK pada September 2018 adalah sebesar 71,60 persen, mengalami sedikit penurunan dibandingkan Maret 2018 yang sebesar 71,66 persen.

Tabel 3.13
 Garis Kemiskinan dan Perubahannya Menurut Daerah,
 Maret 2018 - September 2018

Daerah/Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Perkotaan</u>			
Maret 2018	316.089	132.429	448.518
September 2018	331.096	137.477	468.572
Perubahan (%)	4,75	3,81	4,47
<u>Perdesaan</u>			
Maret 2018	293.446	96.862	390.309
September 2018	301.349	104.616	405.965
Perubahan (%)	2,69	8,01	4,01
<u>Perkotaan+Perdesaan</u>			
Maret 2018	308.915	122.153	431.069
September 2018	322.256	127.852	450.108
Perubahan (%)	4,32	4,67	4,42

Sumber : BPS Provinsi Banten

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan
 Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan yang terkait dengan kesejahteraan penduduk miskin. Pada periode Maret-September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) keduanya mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,822 pada Maret 2018 menjadi 0,908 pada September 2018. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,196 menjadi 0,250 pada periode yang sama. Peningkatan nilai kedua indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Tabel 3.14

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di
Banten Menurut Daerah, Maret 2018 - September 2018

Tahun	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,692	1,143	0,822
September 2018	0,684	1,449	0,908
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,162	0,278	0,196
September 2018	0,157	0,475	0,250

Dengan dilaksanakannya Program Pembangunan Provinsi Banten yang *Pro Poor* seperti, Pembangunan Rumah Layak Huni, Penanganan Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh, Program Pendidikan Gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS dan BOSDA) pada SMA Negeri, SMK Negeri, dan SKH Negeri serta Pemberian Hibah BOSDA Kepada Sekolah Swasta, Pembiayaan Masyarakat Miskin, Pembangunan Rumah Layak Huni, Pembangunan Infrastuktur Permukiman Kumuh, dan juga program bantuan social berupa Jamsosratu diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap Pengurangan kemiskinan di Provinsi Banten pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 15

Realisasi penurunan Kemiskinan Tahun 2017, 2018, TW I 2019,
dan Target Tahun 2019

INDIKATOR	CAPAIAN			TARGET RKPD 2019	
	2017	2018	TW I 2019	MURNI	PERUBAHAN
Nasional	9,82	9,66	9,66	8,5 - 9,85	8,5 - 9,85
Banten	5,24	5,25	5,25	5,00	5,0 - 5,20

3.1.9 Indek Gini

Indeks Gini merupakan alat ukur derajat ketidakmerataan atau ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks Gini Provinsi Banten pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Banten yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,367. Angka ini turun 0,018 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,385. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,362 turun dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,386. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan justru meningkat dari 0,283 pada Maret 2018 menjadi 0,299 pada September 2018. Pada September 2018, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah adalah sebesar 18,50 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 18,22 persen dan di daerah perdesaan sebesar 21,75 Persen.

3.1.10 Indeks Pembangunan Manusia

Sebagaimana dipublikasikan dalam Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Banten oleh Bank Indonesia, Periode Februari 2019 bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Banten secara konsisten mengalami peningkatan dan lebih tinggi dari IPM Nasional. Namun demikian secara spasial terlihat lebarnya perbedaan antara IPM di Tangerang Raya dengan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang mencerminkan masih adanya kesenjangan kualitas hidup masyarakat antara wilayah Banten Utara dengan Banten.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia yang menunjukkan akses penduduk terhadap hasil pembangunan antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya di suatu wilayah.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH). Dimensi Pengetahuan dicerminkan oleh indikator Harapan lama sekolah dan Rata-rata lama sekolah. Sementara dimensi Standar Hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan.

Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42, atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 0,98 persen. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan yang terendah untuk komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), RLS, dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, masing-masing 69,49 tahun, 12,78 tahun, 8,53 tahun, dan 11,7 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (80,84) dan Kabupaten Lebak (62,95)

Pembangunan manusia di Banten secara konsisten terus mengalami kemajuan, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). **Pada tahun 2018, IPM Banten telah mencapai 71,95**, atau meningkat 0,53 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 71,42. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2018 mengalami akselerasi atau percepatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,74 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun 2017 yang hanya 0,65 persen. Status pembangunan manusia Banten pada tahun 2018, masih tertahan pada level atau kategori “Tinggi”. Kategori “Tinggi” tersebut, diperoleh Banten sejak tahun 2015. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada semua komponen pembentuk. Dengan pertumbuhan tertinggi untuk komponen Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (PKP), sedangkan yang terendah pada komponen Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Adapun nilai atau capaian UHH 69,64 Tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) 12,85 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 8,62 tahun, dan PKP 12,0 juta rupiah. Meningkatnya IPM Banten terjadi pada seluruh wilayah, dengan IPM tertinggi dan terendah tetap diduduki oleh Kota Tangerang Selatan (81,17) dan Kabupaten Lebak (63,37). Pencapaian IPM dan salah satu komponen penyusun yaitu Rata-rata Lama Sekolah dapat menjadi gambaran bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pemerataan pembangunan ke wilayah Selatan yang saat ini juga masih menjadi daerah tertinggal.

Tabel 3.16

Capaian dan Target IPM Provinsi Banten Tahun 2017-2020

INDIKATOR	CAPAIAN		TARGET RKPD TAHUN 2019	
	2017	2018	MURNI	PERUBAHAN
Nasional	70,81	71,5	71,98	71,98
Banten	71,42	71,95	72,20	72,20

Dengan memperhatikan Target dan Capaian Makro Ekonomi Secara Nasional dan Capaian Makro Ekonomi Tahun-tahun sebelumnya, serta Berita Acara Rapat Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Daerah antara Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Daerah Provinsi telah menyepakati Kebijakan Makro Ekonomi Provinsi Banten Tahun 2020, dengan target sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,6 - 6,0 Persen
2. Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka 7,5 -8,20 Persen
3. Penurunan Tingkat Kemiskinan 5,0 – 5,20 Persen
4. Indeks Pembangunan Manusia 72,20
5. Indeks Gini Rasio 0,36 - 0,37

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan

terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Perubahan RKPD Tahun 2019

Sejalan dengan arah kebijakan keuangan daerah khususnya kebijakan pendapatan daerah, dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang ada berkaitan dengan upaya-upaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan non pajak daerah. Rencana Pendapatan Daerah dan Pembiayaan Daerah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian hukum penerimaannya. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2019 dapat dijelaskan pada rincian sebagai berikut :

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp11.831.983.759.800,00 target dimaksud menurun 1,64% atau sebesar Rp(193.609.520.079,00) sehingga setelah perubahan menjadi sebesar Rp11.638.374.239.721,00.

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp7.344.821.272.800,00 menurun sebesar 2,72% atau sebesar Rp (200.000.000.000,00) sehingga target Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan menjadi sebesar Rp7.144.821.272.800,00. Komponen Pendapatan Asli Daerah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pajak daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp 6.967.729.412.400,00 berdasarkan prognosis semester I Tahun 2019 pajak daerah tidak mengalami perubahan atau tetap.
- b) Retribusi Daerah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp18.569.771.200,00.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp55.300.000.000,00.
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp303.222.089.200,00.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp4.481.092.487.000,00. Pada Perubahan APBD TA 2019 tidak mengalami perubahan. Adapun rincian komponen dana perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak tidak mengalami perubahan yaitu tetap sebesar Rp711.779.997.000,00.
- b) Dana Alokasi Umum tidak mengalami perubahan target, yaitu tetap sebesar Rp 1.140.003.353.000,00.
- c) Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan target, yaitu tetap sebesar Rp2.629.309.137.000,00.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pendapatan Daerah dari pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, yaitu dari Pendapatan Hibah mengalami kenaikan sebesar 105,28% atau sebesar Rp6.390.479.921,00 semula ditargetkan sebesar Rp6.070.000.000,00 menjadi Rp12.460.479.921,00.

Rincian Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 tercantum pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 3.17
Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD TA 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
4	PENDAPATAN DAERAH	11.831.983.759.800	11.638.374.239.721	(193.609.520.079)	(1,64)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.344.821.272.800	7.144.821.272.800	(200.000.000.000)	(2,72)
4.1.1	Pajak Daerah	6.967.729.412.400	6.967.729.412.400	-	-
4.1.2	Retribusi Daerah	18.569.771.200	18.569.771.200	-	-
4.1.3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	55.300.000.000	55.300.000.000	-	-
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	303.222.089.200	303.222.089.200	-	-

	yang Sah				
4.2	DANA PERIMBANGAN	4.481.092.487.000	4.481.092.487.000	-	-
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	711.779.997.000	711.779.997.000	-	-
4.2.2	Dana Alokasi Umum	1.140.003.353.000	1.140.003.353.000	-	-
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.629.309.137.000	2.629.309.137.000	-	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.070.000.000	12.460.479.921	6.390.479.921	105,28
4.3.1	Pendapatan Hibah	6.070.000.000	12.460.479.921	6.390.479.921	105,28

3.2.1.2 Rencana Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,56% atau Rp432.798.985.809 dari semula yang targetkan sebesar Rp12.154.531.396.800 menjadi Rp12.587.330.382.609. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada Belanja Langsung digunakan untuk membiayai urusan konkuren Pemerintah Daerah melalui program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 41 (empat puluh satu) Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019 tercantum pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 3.18
Belanja Daerah pada Perubahan APBD TA 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	%
5	BELANJA DAERAH	12.154.531.396.800	12.587.330.382.609	432.798.985.809	3,56
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.626.033.770.600	8.046.596.615.840	420.562.845.240	5,51
5.2	BELANJA LANGSUNG	4.528.497.626.200	4.540.733.766.769	12.236.140.569	0,27

3.2.1.3 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mengalami kenaikan sebesar 138,11% atau Rp626.408.505.888,00 sebelum perubahan sebesar Rp453.547.637.000,00 sehingga setelah perubahan menjadi Rp1.079.956.142.888,00. Jumlah tersebut bersumber dari Sisa Lebih Pelaksanaan Anggaran (SiLPA) TA 2018 yang sudah diaudit oleh Badan Pemeriksaa Keuangan Republik Indonesia (*audited*). Rincian penerimaan pembiayaan daerah tercantum pada tabel 2.3

Tabel 3.19

Target Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah TA. 2019

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG	%
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888	138,11
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	453.547.637.000	1.079.956.142.888	626.408.505.888	138,11

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penetapan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 didasarkan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian RPJMD Tahun 2012-2017, identifikasi isu strategis yang berkembang serta permasalahan-permasalahan mendesak tingkat Nasional dan Regional, kerangka ekonomi daerah, dan kerangka pendanaan tahun 2019. Selanjutnya Penyusunan RKPD tahun 2019 juga memperhatikan:

1. Arah Kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMN) 2015-2019.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2017-2022 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Banten sebagai upaya penyelesaian target-target pembangunan nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Banten yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019.

Prioritas Pembangunan Daerah akan didukung dengan pelaksanaan program sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Tahun 2017-2022.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun

skala daerah. Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 agenda Prioritas (Nawa Cita), yaitu:

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3 : membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6 : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi
- Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari empat bagian utama yakni:

- 1) norma pembangunan;
- 2) tiga dimensi pembangunan;
- 3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta
- 4) program-program *quick wins*.

Dimensi dan kondisi pembangunan perlu strategi pembangunan untuk memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah.

Selain dijabarkan dalam strategi pembangunan, untuk mencapai Nawa Cita ditetapkan sasaran pokok pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah:

1. Pembangunan Ekonomi dengan indikator: Pertumbuhan ekonomi, PDB perkapita, Penurunan kemiskinan, Pengangguran
2. Pembangunan Ketahanan Pangan dengan indikator: Produksi padi, Produksi Jagung, Produksi kedelai, Produksi gula, Produksi daging, Produksi ikan
3. Kebutuhan Energi dengan Indikator: Produksi Minyak bumi, Produksi gas bumi, Produksi batubara, Pembangunan gas bumi dalam negeri, Penggunaan batubara dalam negeri.
4. Ketahanan Air dengan indikator: Terselesaikannya status DAS lintas Negara, Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi dalam KPH, Pulihnya kesehatan 4 DAS Prioritas Nasional (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Kapuas, dan DAS Siak) dan 26 DAS prioritas sampai dengan tahun 2019, Terjaganya / meningkatnya jumlah mata air di 4 DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas sampai dengan 2019 melalui konservasi sumber daya air.
5. Kapasitas/Daya tampung dengan indikator: Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk, Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak) Rata-rata kapasitas Desain Pengendalian Struktural dan Non Struktural Banjir.
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas dengan indikator: Rasio elektrifikasi, Akses Air Minum Layak, Sanitasi Layak, Kondisi Mantap Jalan, Pembangunan Jalan, Panjang Jalur Kereta Api, *Dwelling Time* Pelabuhan, *On-time Performance* Penerbangan, Kab/Kota yang dijangkau broadband

7. Lingkungan dengan indikator Emisi Gas Rumah Kaca, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (Tambahan Rehabilitasi Hutan 2 juta ha (dalam dan luar kawasan).
8. Politik dengan indikator: Tingkat Partisipasi Politik Pemilu, Angka Indeks Demokrasi Indonesia, Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2019 Aman, adil dan demokratis Aman, adil dan demokratis, Peringkat Indonesia dalam Mengirimkan Pasukan Perdamaian Indonesia di PBB
9. Penegakan Hukum dengan indikator: Indeks Pembangunan Hukum N.A. 75%, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 3,63 4,0, Indeks Penegakan Hukum Tipikor N.A. Naik 20% (skala 5), Persentase Penyelesaian Rekomendasi UNCAC N.A. 100%
10. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi dengan indikator: Opini WTP atas Laporan Keuangan - Kementerian/Lembaga Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah yang akuntabel, Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Integritas Nasional, Integritas Pelayanan Publik (pusat), Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
11. Pertahanan dan Keamanan dengan Indikator: Persentase pemenuhan MEF, Persentase pemenuhan pemeliharaan dan perawatan Alutsista Persentase Kontribusi industri pertahanan DN terhadap MEF, Jumlah Rumkit Polri yang ditingkatkan Faskesnya Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba
12. Kesejahteraan Rakyat dengan indikator, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meningkat, Indeks Gini 0,41 menurun, Meningkatnya presentase penduduk yang menjadi peserta jaminankesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, Kepesertaan Program SJSN Ketenagakerjaan Pekerja formal dan Pekerja informal.
13. Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan indikator: Laju Pertumbuhan Penduduk, Angka kelahiran total (Total Fertility

Rate/TFR), Pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (*all methods*)

14. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun meningkat, Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 meningkat, Prodi Perguruan Tinggi Minimal Terakreditasi meningkat
15. Kesehatan dengan indikator: Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, Prevalensi stunting pada anak baduta (dibawah 2 tahun)
16. Pembangunan Kewilayahan Peran Luar Jawa dalam pembentukan PDB meningkat, Jumlah Kabupaten Tertinggal menurun
17. Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan dengan indikator Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, Peningkatan dan pengembangan jumlah kapal perintis, Pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum, Pengembangan pelabuhan perikanan berskala nasional, Peningkatan produksi perikanan dan kelautan Luas kawasan konservasi laut/perairan

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan langkah mewujudkan visi pembangunan dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dengan tujuan dan sasaran :

- a. Misi 1 (satu) yaitu Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
- b. Misi 2 (dua) adalah Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
- c. Misi 3 (tiga) Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari; dan

- d. Misi 4 (empat) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

4.1.3 Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran Provinsi Banten

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 yang tertuang didalam RKP Tahun 2019 diterjemahkan kedalam sasaran pokok pembangunan, yang dalam hal ini sasaran pokok tersebut juga merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019, yaitu:

1. Sasaran Makro, meliputi pembangunan manusia dan masyarakat, ekonomi makro melalui pembangunan manusia dan masyarakat, serta ekonomi makro;
2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, meliputi: kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan (melalui meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan sumberdaya kesehatan), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, perlindungan masyarakat;
3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, meliputi kedaulatan pangan (melalui produksi dalam negeri, pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi irigasi), kedaulatan energy, maritim dan kelautan (melalui memperkuat jati diri sebagai Negara maritime, pemberantasan tindakan perikanan liar, membangun konektivitas nasional, serta pengembangan ekonomi maritim dan kelautan), pariwisata dan manufaktur (pariwisata dan industri manufaktur), ketahan air, infrastruktur dasar, dan konektivitas (melalui ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas, lingkungan);
4. Sasaran pembangunan dimensi pemerataan, meliputi menurunkan kesenjangan antar kelompok ekonomi, meningkatkan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu (melalui perlindungan social bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40% penduduk berpendapatan rendah), peningkatan daya saing tenaga

kerja, kepesertaan program SJSN ketenagakerjaan, meningkatkan kualitas dan ketrampilan pekerja);

5. Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah, meliputi : pemerataan pembangunan antar wilayah melalui peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional (peran wilayah dalam pembentukan PDB Nasional, pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, pembangunan kawasan perkotaan), pembangunan perdesaan, pengembangan kawasan perbatasan, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar jawa, serta pembangunan kawasan perkotaan;
6. Sasaran pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, meliputi politik dan demokrasi, penegakan hukum, tata kelola dan reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintah desa (kinerja keuangan daerah, kinerja kelembagaan, kinerja aparatur), serta pertahanan dan keamanan.

Sasaran pokok pembangunan nasional tersebut tentunya dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2019 di Provinsi Banten menjadi bagian integral, dimana sasaran pembangunan di Provinsi Banten memiliki interkoneksi dengan sasaran nasional. Sasaran pembangunan di Provinsi Banten Tahun 2019 sebagaimana tertuang didalam RPJMD Tahun 2017-2022. Interkoneksi sasaran nasional dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1
Interkoneksi antara Sasaran Pembangunan Nasional dengan Sasaran
Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
Sasaran makro	Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,06
	Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan		
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	30
		Angka Kematian Ibu (AKI)	300
	Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten	Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten	Harapan lama sekolah	13,5
	Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit	Rata rata lama sekolah	8,7
	Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah		
	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,06
	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten	LPE Sektor Perdagangan	5,4
		Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Strategis	4
	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten	LPE Sektor Perindustrian	3,95
	Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	3,89
Sasaran pembangunan manusia dan masyarakat		Index Gini	0,39
	Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	91,95
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,34
	Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	35
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatkan Cabang	Indeks Pembangunan Kepemudaan	20

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
	Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan kejuaraan tingkat nasional		
		Indeks Pembangunan Olahraga	20
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	85
	Meningkatkan koleksi Museum	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah	100
Sasaran pembangunan sektor unggulan	Meningkatnya Pelayanan Kelistrikan dan Energi terbarukan	Rasio elektrifikasi	98
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan pangan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90,6
	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	13
	Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	88,22
	Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi	Jumlah Nilai Investasi	60,80 trilyun
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	1
	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44.67
	Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,80
	Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	6
	Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan)	Pertumbuhan Sektor Pertanian	5,6
Sasaran pembangunan wilayah dan antar wilayah	Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana transportasi	20
	Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	
	Meningkatnya Kulaitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten	Tingkat Kemantapan Jalan	89
	Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten		

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
	Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi	Pemenuhan tingkat layanan irigasi	16722
	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	26,27
	Meningkatnya Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis dalam Rencana Detail Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	85
	Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten	cakupan pelayanan pengelolaan sampah	20
	Meningkatnya Penataan Perumahan, Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Luasan Kawasan Kumuh	203,2
		Persentase Rumah Layak Huni	85,18
Sasaran politik, hukum dan pertahanan keamanan	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	
	Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	60,62
	eningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,2
		Capaian LAKIP Provinsi Banten	BB
		Index Gini	0,39
	Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan profil penduduk	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	80
	Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3.00

SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR	TARGET 2019
		Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP
	Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	75
	Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	61,83
	Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID dengan pelayanan berbasis teknologi informasi	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	89
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	15
	Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	15
	Meningkatnya Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Resiko Bencana	133
	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	74
		Angka Kriminalitas	4.500
	Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,91

Didalam perencanaan pembangunan diperlukan interkoneksi pusat dan daerah, pada dokumen RPJMD Tahun 2017-2022 terdapat sasaran dan indikator sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Provinsi Banten dan secara teknis operasional menjadi sasaran dan indikator sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten.

4.2 Prioritas Pembangunan

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu.

Agenda pembangunan nasional tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Tema Pembangunan Nasional tahun 2019 yaitu :

“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

Sesuai sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,4-5,8 persen Inflasi secara nasional berkisar antara 2,5 – 4,5 persen.
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5-9,5 persen; IPM menjadi 71,98; gini rasio pada kisaran 0,38-0,39; dan tingkat pengangguran terbuka 4,8-5,2 persen.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional; Sumatera 21,87 persen, Jawa 58,15 persen, Kalimantan 8,09 persen, Sulawesi 6,15 persen, Bali-Nusa Tenggara 3,22 persen, Maluku 0,52 persen Papua 2,01 persen.

Prioritas nasional tahun 2019 terbagi menjadi 5 prioritas nasional dijabarkan kedalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat Pengurangan Kemiskinan;

- 1) Memperkuat pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 2) Memperkuat sistem jaminan sosial;
 - 3) Memperkuat literasi untuk kesejahteraan;
 - 4) Memperkuat reforma agraria; dan
 - 5) Pemberian akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial.
- b. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- 1) Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - 2) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - 3) Mencegah dan pengendalian penyakit;
 - 4) Mempercepat penurunan stunting; dan
 - 5) Meningkatkan “gerakan masyarakat hidup sehat”.
- c. Pemerataan layanan Pendidikan berkualitas;
- 1) Menyediakan pendidik yang berkualitas dan merata;
 - 2) Menyediakan afirmasi pendidikan;
 - 3) Memperkuat kelembagaan satuan pendidikan; dan
 - 4) Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik.
- d. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak;
- 1) Menyediakan akses hunian layak dan terjangkau;
 - 2) Menyediakan akses infrastruktur dasar pemukiman layak; dan
 - 3) Meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman.
- e. Meningkatkan Tata Kelola Layanan Dasar.
- 1) Memperkuat layanan dan rujukan satu pintu;
 - 2) Memperkuat integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
 - 3) Mempercepat pencapaian SPM di daerah.
2. Prioritas Nasional 2: Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan konektivitas;

- 1) Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional yang mendukung sektor unggulan; dan
 - 2) pengembangan transportasi perkotaan.
- b. Mengembangkan Telekomunikasi dan Informatika;
- 1) Pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal.
- c. Mengembangkan pusat kegiatan di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa;
- 1) Peningkatan aksesibilitas desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi.
- d. Melaksanakan Pembangunan Daerah Afirmasi;
- 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi.
- e. Pembangunan Konektivitas untuk mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu Hilir Perikanan.
- 1) Peningkatan produksi perikanan melalui pembangunan konektivitas logistik perikanan dan tata kelola kawasan perikanan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional kedua, antara lain:

- a. Pembangunan konektivitas dan jaringan logistik nasional sektor unggulan;
- b. Peningkatan keterpaduan transportasi perkotaan dan keselamatan transportasi;
- c. Peningkatan sarana prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing;
- d. Optimalisasi pembangunan kota-kota KTI untuk pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Peningkatan aksesibilitas pusat pertumbuhan, layanan kesehatan, dan pendidikan di daerah tertinggal dan perbatasan;
- f. Peningkatan aksesibilitas desa, kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi;

- g. Peningkatan kapasitas SDM di daerah dan desa dalam penyediaan sarana prasarana konektivitas;
 - h. Peningkatan sarana dan prasarana sistem logistik perikanan; dan
 - i. Peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan perikanan.
3. Prioritas Nasional 3: Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah produk pertanian melalui peningkatan produktifitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana;
- b. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai/nilai dan pemanfaatan inovasi;
- c. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi dan penguatan kemitraan;
- d. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerjasama dunia usaha dan kewirausahaan;
- e. Mengembangkan IPTEK dan Inovasi untuk meningkatkan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM dan IPTEK, pengembangan litbang keilmuan.

Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis prioritas nasional ketiga, antara lain:

- a. Peningkatan nilai tambah ekonomi dari hasil pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk industri;
- c. Optimalisasi penciptaan nilai tambah jasa produktif;
- d. Peningkatan produktifitas tenaga kerja; dan

- e. Optimalisasi pemanfaatan IPTEK dan hasil inovasi untuk peningkatan produktivitas dan penciptaan nilai tambah.
4. Prioritas Nasional 4: Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air melalui pelestarian lingkungan
- Pada prioritas nasional ini mengarahkan peningkatan kuantitas dan kualitas sumber-sumber energi, pangan dan air yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk melakukan segala aktivitasnya. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumberdaya air ini dilakukan melalui pelestarian lingkungan dengan beberapa arah kebijakan yang harus diperhatikan sebagai berikut:
- a. meningkatkan produksi energi primer;
 - b. meningkatkan penerapan energi baru terbarukan dalam bauran energi;
 - c. meningkatkan aksesibilitas air;
 - d. meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik;
 - e. mempertahankan dan memantapkan penyediaan pangan utama dalam negeri;
 - f. meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan;
 - g. memperkuat distribusi dan stabilitas harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat;
 - h. meningkatkan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat terutama untuk menurunkan kasus malnutrisi;
 - i. memantapkan pembangunan infrastruktur sumber daya air;
 - j. meningkatkan perlindungan sumber daya air dan ekosistemnya;
 - k. meningkatkan pemenuhan kebutuhan air yang adil dan merata;
 - l. mempercepat regulasi dan pembangunan wilayah berbasis DAS;
- dan
- m.meningkatkan kesadaran sumberdaya air.
- Selain arah kebijakan tersebut terdapat isu strategis perioritas nasional keempat, antara lain:
- a. Pemenuhan Kebutuhan Energi;

Kebutuhan energi primer akan meningkat dari 1.555 BOE di tahun 2015 menjadi 2.086 juta Barrel of Equivalent (BOE) di tahun 2019 atau meningkat 7,4 persen.

b. Pemenuhan kebutuhan Pangan

Kebutuhan konsumsi pangan masyarakat yang terus meningkat

c. Pemantapan ketahanan Sumber Daya Air

1) pemenuhan kebutuhan air yang belum terpenuhi untuk rumah tangga, industri dan pertanian; dan

2) suplai air minum.

d. Upaya pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;

Penguatan langkah untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

e. Perencanaan pembangunan rendah karbon.

Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang RAN penurunan emisi gas rumah kaca.

5. Prioritas Nasional 5: Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka arah kebijakan yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan KAMTIBMAS dan Keamanan Siber;

1) meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan kepolisian;

2) menyelesaikan konflik sosial;

3) meningkatkan upaya pencehagan dan pemberantasan narkoba;

4) meningkatkan pengamanan aktivitas siber; dan

5) meningkatkan penanganan terorisme.

b. Menjamin Kesuksesan Pemilu

1) meningkatkan kualitas lembaga demokrasi;

2) menjamin terlaksananya hak memilih dan dipilih;

3) mewujudkan birokrasi yang netral dalam Pemilu 2019; dan

4) melaksanakan tahapan pemilu yang berkualitas.

c. Memperkuat Pertahanan Wilayah Nasional;

1) mengamankan wilayah yuridiksi nasional;

- 2) pengamanan kawasan perbatasan dan kedaulatan negara;
dan
- 3) penguatan pertahanan berdaya gentar tinggi.
- d. Meningkatkan Kepastian hukum dan Reformasi Birokrasi;
 - 1) meningkatkan kualitas penegakan hukum;
 - 2) meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - 3) meningkatkan pelaksanaan e-Government;
 - 4) mengoptimalkan Talent Management Nasional;
 - 5) meningkatkan pengawasan program prioritas nasional.
- e. Efektivitas Diplomasi
 - 1) memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri;
 - 2) memperkuat diplomasi maritim, politik, dan keamanan;
 - 3) memperkuat diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional; dan
 - 4) pemantapan peran Indonesia di ASEAN.

Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten:

- 1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol
 - a. Jalan Tol Serang-Panimbang (83,6 KM)
 - b. Jalan Tol Kunciran-Serpong (11,2 KM)
 - c. Jalan Tol Serpong-Cinere (10,1 KM)
 - d. Jalan Tol Serpong-Balaraja (30 KM)
- 2. Proyek Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api Dalam Kota
 - a. Kereta Api Ekspres SHIA (Soekarno Hatta-Sudirman)
- 3. Proyek Infrastruktur Energi Asal Sampah
 - a. Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang)
- 4. Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi
 - a. Bendungan Sindang Heula
 - b. Bendungan Karian
- 5. Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus
 - a. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung
 - b. Kawasan Industri Wilmar Serang

6. Pariwisata
- a. Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih

(Tanjung Lesung)

4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas pembangunan daerah di Provinsi Banten Tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan;
2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah;
3. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
4. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha.

Tabel 4.2

Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Provinsi Banten

Tahun 2019

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
1. Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan	a) Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Pelaksanaan Program Kegiatan b) Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peningkatan Infrastruktur Wilayah	a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat b) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku f) Pembangunan Bendung, empang dan situ g) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi h) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional j) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana

Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan
	lingkungan yang sehat k) Pembangunan TPST Regional l) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi m) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi n) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan o) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi p) Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi q) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3. Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit
4. Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	a) Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

4.2.3 Interkoneksi Antara Prioritas Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Secara lebih jelasnya pengelompokan sasaran pembangunan Provinsi Banten berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan Provinsi Banten dengan Nawacita dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3

Interkoneksi Fokus Pembangunan dan Arah Kebijakan
Provinsi Banten dengan Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Provinsi Banten	Arah Kebijakan
1.	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Pembangunan Pendidikan	a) Peningkatan Akses layanan pendidikan menengah serta relevansi pendidikan b) Peningkatan kualitas layanan pendidikan khusus serta relevansi pendidikan
		Pembangunan kesehatan	c) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian d) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lansia e) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui Peningkatan kesehatan masyarakat, Pencegahan dan pengendalian penyakit

No	Prioritas Nasional	Fokus Pembangunan Provinsi Banten	Arah Kebijakan
2	e. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman f. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air	Pembangunan infrastruktur wilayah	a) Peningkatan kualitas kebijakan akses infrastruktur bagi masyarakat b) Peningkatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dan teknologi informasi c) Pembangunan dan Pemeliharaan infrastruktur Jalan yang mendukung kawasan strategis, potensi Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kawasan Agrobisnis d) Peningkatan Sarana dan Prasarana pengendali Banjir e) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Tampungan dan Penyediaan Air Baku f) Pembangunan Bendung, empang dan situ g) Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan jaringan Irigasi h) Peningkatan kualitas Regulasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang i) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional j) Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan yang sehat k) Pembangunan TPST Regional l) Peningkatan pengelolaan gedung, sarana dan prasarana strategis provinsi m) Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi n) Pembangunan sarana dan Prasarana kelengkapan Jalan o) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana transportasi p) Pembangunan Sarana dan prasarana transportasi q) penataan Kawasan Permukiman, Infrastruktur Permukiman kumuh
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri dan Jasa Produktif	Pembangunan ekonomi	a) Peningkatan jumlah destinasi wisata yang berkualitas dan didukung oleh akses infrastruktur b) Peningkatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi c) memperluas Cakupan BPJS ketenagakerjaan pada Pekerja sektor formal dan informal

Sasaran pembangunan di Provinsi Banten yang dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah (PD) menjadi agenda prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahunan pada tahun ke-2 (dua) RPJMD tahun 2017 - 2022 dan RPJMD ke-IV (empat) tahap akselerasi II dari RPJPD Provinsi Banten. Secara lebih jelasnya interkoneksi dari pendekatan prioritas pembangunan di Provinsi Banten dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten, serta sasaran Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.4
Interkoneksi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Program Prioritas Daerah Tahun 2019

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 16 Unit dan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dan SMK 372 Unit di Provinsi Banten 2. Rehab ruang kelas SMA dan SMK 300 Unit 3. Meningkatnya Mutu Pendidikan dan penyediaan biaya operasional sekolah I10	1. Rata rata lama sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	8.70 Tahun 13.5 tahun	Pendidikan			DINDIKBUD
					Program Pendidikan Menengah			
						Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (Satuan: %)	74,67	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	65,14	
						Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan: %)	60,33	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: nilai)	57,74	
						Angka Putus Sekolah SMA (Satuan: Nilai)	0,19	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Angka Putus Sekolah SMK (Satuan: Nilai)	0,38	
						Angka Kelulusan SMA (Satuan:%)	98,64	
						Angka Kelulusan SMK (Satuan:%)	99,89	
						Nilai Rata-rata Ujian SMA IPA (Satuan: %)	53,22	
						Nilai Rata-rata Ujian SMK (Satuan: %)	56,30	
						Nilai Rata-rata Ujian SMA IPS (Satuan: %)	49,76	
						Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan: %)	97,16	
						Persentase SMK yang menerapkan link and match (Satuan: %)	34,00	
						Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan: %)	60,97	
					Program Pendidikan Khusus			
						Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan: %)	34,00	
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan			
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan: Nilai)	57.74	
						Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan: Nilai)	65.14	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan:%)	97.16	
						Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan:%)	60.97	
					Program Peningkatan Mutu Pembelajaran			
						Presentasi Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan: %)	30,00	
		Meningkatkan koleksi Museum	Persentase pelestarian dan inovasi nilai budaya daerah (Satuan: %)	100,00	Kebudayaan			DINDIKBUD
					Program Pelestarian Kebudayaan	Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	90,00	
						Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan organisasi kesenian (pembinaan sanggar/ kelompok seni dan budaya) (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Pelestarian Nilai-Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	90,00	
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya			
						Cakupan Pelayanan Museum (Satuan: %)	90,00	
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya			
						Cakupan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (Satuan: %)	90,00	
						Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Minat baca dan Kunjungan Masyarakat Terhadap Perpustakaan Daerah	Persentase peningkatan minat baca masyarakat	35,00	Perpustakaan			DPKD
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan			
						Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	80,00	
						Cakupan pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan			
						Cakupan Pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan (Satuan: %)	80,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah yang Berbasis Teknologi Informasi	Persentase OPD yang Menyelenggarakan kearsipan sesuai Katentuan Kearsipan	85,00	Kearsipan			DPKD
					Program Pengelolaan Sistem Kearsipan			
						Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Pengelolaan Arsip OPD sesuai Standar (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kepemudaan serta Meningkatnya Cabang Olahraga Berprestasi dalam keikutsertaan	Indeks Pembangunan Kepemudaan	20,00	Kepemudaan dan Olahraga			Dispora

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		kejuaraan tingkat nasional						
			Indeks Pembangunan Olahraga	20,00				
					Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan			
						Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda Mandiri (Satuan: Kelompok/ Organisasi)	80,00	
						Persentase Pemuda Wirausahawan Baru yang difasilitasi (Satuan: %)	80,00	
					Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olah Raga			
						Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan: %)	75,00	
					Program Peningkatan Prestasi Olah Raga			
						Cakupan Keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (Satuan: %)	80,00	
					Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan pembinaan olahraga (Satuan: %)	80,00	
		Meningkatnya Koordinasi Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks pembangunan gender (IPD)	91,95	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			DP3AKKB
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,34				
					Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera			
						Cakupan Data Terpilah Gender dan Anak (Satuan: %)	63,33	
						Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan: %)	55,00	
						Rasio Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah (Satuan: %)	62,27	
						Cakupan Kabupaten/Kota yang memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan: %)	75,00	
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Pengendalian laju pertumbuhan pendudukan dengan pendataan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1,91	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			DP3AKKB
					Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
						Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) (Satuan: Jumlah)	2,29	
						Persentase pemakaian kontrasepsi (modern contraceptive prevalence rate/CPR) (Satuan: %)	61,00	
					Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need (Satuan: %)	10,18	
						Tingkat putus pakai kontrasepsi (Satuan: %)	25,18	
		Meningkatnya kesehatan Ibu dan Anak	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,06	Kesehatan			Dinkes dan RSUD Banten dan Malingping
		Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan 70 Orang						
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	30				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Penyediaan Jaminan Kesehatan Pada Masyarakat Miskin di Provinsi Banten 100 %	Angka Kematian Ibu (AKI)	300				
			Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Kesehatan	100				
					Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat			
						Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan: %)	81,00	
						Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan: %)	100,00	
					Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit			
						Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program kesehatan masyarakat (Satuan: %)	60,00	
						Persentase Kab/Kota yang telah mendapatkan dukungan program pencegahan, pengendalian penyakit dan krisis kesehatan (Satuan: %)	85,00	
					Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Presentase Penduduk yang mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan: %)	100,00	
						Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP, FKRTL, Laboratorium) (Satuan: %)	81,00	
						Persentase Terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan: %)	35,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah			
						Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium kesehatan yang di layani (Satuan: %)	37,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat			
						Persentase Perusahaan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja di wilayah kerja BKKM (Satuan: %)	6,40	
					Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Jumlah Dokter/Dokter Gigi, Tenaga Kesehatan Masyarakat yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (Satuan: orang)	170,00	
						Presentase Pemenuhan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Satuan: %)	80,00	
						Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan: %)	60,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan			
						Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan: %)	70,00	
						Indeks kepuasan pelanggan (Satuan: %)	70,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan kualitas pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan: %)	70,00	
						Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping (Satuan: %)	50,00	
2.	Peningkatan infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan di Wilayah Provinsi Banten	Tingkat Kemantapan Jalan	89	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			DPUPR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Jembatan Di Wilayah Provinsi Banten						
		Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Banjir dan Abrasi	Persentase pemulihan dan pencegahan banjir	26,27				
			Pemenuhan tingkat layanan irigasi	16.721,78 Ha				
					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan			
						Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: %)	84,67	
						Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan: Km)	89,70	
					Program Pembangunan Sumber Daya Air			
						Cakupan pemulihan dan pencegahan banjir (Satuan: %)	26,27	
						Luas Layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan: Hektar)	16.721,78	
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Presentasi jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan: %)	28,99	
						Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan: %)	56,97	
						Presentase badan usaha jasa konstruksi yang memenuhi standar (Satuan: %)	20	
		Meningkatnya Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang	Persentase Kesesuaian Penggunaan Ruang sesuai dengan Tata Ruang	85,00				DPUPR
					Program Penataan Ruang			
						Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada Kawasan Strategis Provinsi (Satuan: Dokumen)	37,50	
		Meningkatnya Penataan Perumahan, Pelayanan Air Bersih Perkotaan dan Pedesaan, dan Penanganan Kawasan Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni	85,15	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			DPRKP
			Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	203,20 Ha				
		Meningkatkan Jumlah Pembangunan TPST di Wilayah Provinsi Banten	cakupan pelayanan pengelolaan sampah	20,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung Strategis yang berkualitas	Persentase Gedung strategis Provinsi dalam kondisi baik	50,00				
					Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan			
						Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: Unit)	85,18	
						Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	203,20	
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungan			
						Cakupan Pelayanan sanitasi lingkungan layak (Satuan: %)	75,57	
					Program Keciaptakaryaan	cakupan pelayanan pengelolaan sampah (Satuan: Ha)	20,00	
						Cakupan pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: Gedung)	69,00	
		Meningkatnya Fasilitas Perhubungan melalui penyediaan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi	20,00	Perhubungan			Dishub
		Meningkatnya Penataan Lalu Lintas Di Wilayah Jalan Provinsi Banten	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	20,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan			
						Persentase pengaturan rekayasa lalu lintas di ruas jalan provinsi (Satuan: % berdasarkan Lokasi)	100,00	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase ketersediaan rambu-rambu lalu lintas terhadap kebutuhan (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Pembangunan dan pemeliharaan dan prasarana perkeretaapian (Satuan: %)	20,00	
					Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	Persentase Pengendalian, penertiban dan pengawasan penyelenggaraan angkutan (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Persentase regulasi dan pedoman standar pelayanan transportasi yang diterapkan (Satuan: %)	20,00	
						Persentase kebutuhan terminal type B yang sudah terpenuhi (Satuan: %)	0,00	
						Persentase wilayah yang terlayani angkutan umum (Satuan: %)	0,00	
					Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Persentase pelabuhan pengumpan regional operasional (Satuan: %)	20,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup Baik air dan Udara	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	44,67	Lingkungan Hidup			DLHK
					Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup			
						Indeks Kualitas Air (Satuan: Nilai)	52,00	
						Indeks Kualitas Udara (Satuan: Nilai)	59,20	
						Luasan Penghijauan lahan kritis (Satuan: Hektar)	8000,00	
						Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Satuan: Kelompok/Lembaga)	60,00	
		Meningkatnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Rasio Cakupan Tutupan Hutan	31,71	Kehutanan			DLHK
					Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan			
						Luas Lahan kritis yang ter rehabilitasi (Satuan: Hektar)	5000,00	
						Persentase Peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (Satuan: %)	10,00	
		Meningkatkan cakupan pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan	Rasio elektrifikasi	98,00	Energi dan Sumberdaya Mineral			Dinas ESDM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan			
						Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan: SS)	15000,00	
					Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan			
		Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Perijinan Sumberdaya Alam	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	13	Energi dan Sumberdaya Mineral			
					Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara			Dinas ESDM
						Prosentase pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan (Satuan: %)	44,52	
						Presentase Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar (Satuan: %)	44,52	
3.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatkan Produksi pertanian (Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan	Pertumbuhan Sektor Pertanian	5,30	Pertanian			Distan

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Peternakan)						
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan			
						Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan: Ton)	2,420,714.00	
						Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan: Ton)	8,970.00	
						Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan: Ton)	771.75	
						Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan: Ton)	44,858.00	
						Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan: %)	87,00	
					Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
						Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase Produksi Benih Sumber Tanaman Pangan dan Hortikultura (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Jumlah sampel yang diuji (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Ketersedian Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PAD) (Satuan: %)	100,00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan: Ton)	22,657.00	
						Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan: Ton)	7,498.10	
						Capaian Produksi Tanaman Kakao (Satuan: Ton)	3,510.36	
						Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan: Ton)	1,762.00	
					Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan			
						Capaian Produksi Daging (Satuan: Ton)	34,18	
					Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian			
		Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan dan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	90,60	Pangan			Dinas Ketapang

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		ketersediaan pangan						
		Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	3,05	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			
						Ketersediaan pangan (Satuan: %)	95,10	
					Program Peningkatan Keterjangkauan pangan			
						Keterjangkauan/ akses pangan (Satuan: %)	82,50	
					Program Perlindungan Konsumen Pangan			
						Pemanfaatan Pangan (Satuan: %)	90,00	
					Pariwisata			Dispar
					Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
						Jumlah Kunjungan Wisatawan (Satuan: Orang)	15,601,344.00	
						Rata-Rata Lama Kunjungan (Satuan: Hari)	1,39	
						Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan (Satuan: Rp)	3,852,216.00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan: Lokasi)	1,00	
					Program Pemasaran Produk Pariwisata			
					Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata			
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri dan Pembangunan Industri di Provinsi Banten	LPE Sektor Perindustrian	3,95	Perindustrian			Disperindag
					Program Peningkatan Daya Saing Industri			
						Persentase Struktur Industri pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan: %)	20,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri yang Aktif (Satuan: %)	20,00	
						Rasio Pertumbuhan industri kreatif (Satuan: %)	20,00	
					Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri			
						Persentase Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi (Satuan: %)	200,00	
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Terhadap Hasil Produksi Lokal untuk Pertumbuhan Usaha Perdagangan di Provinsi Banten	Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting	4,00	Perdagangan			Disperindag
			LPE Sektor Perdagangan	5,40				
					Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri			
						Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan: %)	5,00	
						Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan: %)	12,00	
						Neraca ketersediaan barang pokok (Satuan: %)	100,00	
						capaian stabilitas harga	5,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						barang pokok (Satuan: %)		
					Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri			
					Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	Surplus Neraca Perdagangan (Satuan: Juta USD)	3,118.79	
						Indeks Tendensi Konsumen (Satuan: Nilai)	112,00	
					Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang			
						Persentase Pelayanan Sertifikasi dan standarisasi (Satuan: %)	85	
		Meningkatnya Investasi Dalam dan Luar Negeri dalam meningkatkan Dunia Usaha di Provinsi Banten	Jumlah Nilai Investasi	60,80 trilyun	Penanaman Modal			DPMPSTP
		Meningkatnya Pengelolaan Ijin Usaha yang Berbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Investor	88,22				
					Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Investasi			
						Nilai Realisasi Investasi PMDN (Satuan: Trilyun)	13,80	
						Nilai Realisasi Investasi PMA (Satuan: triliyun)	47,00	
					Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal			
						Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (Satuan: %)	100,00	
					Program Pengendalian Penanaman Modal			
						Cakupan Potensi Investasi yang Terealisasi (Satuan: %)	17,09	
					Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal			
						Presentase Realisasi Perizinan sesuai Standar Pelayanan (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Produktivitas Koperasi dan UKM Bagi Koperasi Aktif dan Sehat	Persentase Peningkatan Aset dan Omset Usaha Kecil	1,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas KUKM

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi			
						Capaian Koperasi Aktif (Satuan: Jumlah)	6,00	
					Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi			
						Persentase Koperasi yang Bankable (Satuan: %)	6,00	
		Meningkatnya Wirausaha Baru dalam mendukung Persaingan Usaha Kreatif	Persentase Peningkatan Kualitas kelembagaan Omset Koperasi	6,00	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			Dinas KUKM
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil			
						Persentase Usaha Kecil yang bermitra secara aktif dengan Dunia Usaha lain (Satuan: %)	1,00	
					Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM			
						Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan	6.00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						terhadap total peserta pelatihan Koperasi (Satuan: %)		
						Persentase realisasi implementasi hasil pelatihan terhadap total peserta pelatihan Usaha Kecil (Satuan: %)	1,00	
4.	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Meningkatnya Penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten dan Penurunan Jumlah PMKS	Persentase Penanganan Jumlah PMKS	3,89	Sosial			Dinsos
			Index Gini	0,39				
					Program Rehabilitasi Sosial			
						Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Satuan: orang)	608.00	
						Cakupan PMKS yang dilayani (Satuan: Jumlah)	230,00	
						Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: Jumlah)	1,300.00	
						Cakupan Masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: Orang)	25,000.00	
					Program Pemberdayaan Sosial			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan PSKS yang meningkat partisipasi sosialnya (Satuan: orang)	1,520.00	
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
						Persentase Updating Data PMKS (Satuan: %)	100,00	
						Cakupan Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapat perlindungan (Satuan: orang)	1,300.00	
						Cakupan Keluarga miskin yang mendapatkan jaminan sosial (Satuan: kk)	25,000.00	
					Program Penangan Fakir Miskin			
						Cakupan PMKS Fakir Miskin Penerima Fasilitas Pemberdayaan Sosial (Satuan: kk)	949.00	
					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti			
						Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan Sosial Keterampilan pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial (Satuan: Orang)	110.00	
					Program Pelayanan dan Perlindungan			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Sosial Dalam Panti			
						Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan Sosial (Satuan: Orang)	230.00	
5.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Ikan	Laju Pertumbuhan Sektor Perikanan Terhadap PDRB	4,07	Kelautan dan Perikanan			DKP
					Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap			
						Persentase Produksi Perikanan (Satuan: %)	8,08	
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
						Luas Laut Yang Terawasi (Satuan: %)	65.00	
					Program Peningkatan Daya Saing Perikanan			
						Persentase Usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan: %)	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
						Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan: %)	117,00	
6.	Pembangunan Ekonomi dan Kesempatan Berusaha	Meningkatnya Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Angka Pengangguran di Provinsi Banten	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	60,06	Ketenaga Kerjaan			Disnakertrans
					Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja			
						Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan: %)	4,40	
					Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Capaian Hubungan Industrial (Satuan: %)	4,40	
						Pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan: %)	10,00	
						Capaian Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Satuan: %)	9,53	
					Program Pengawasan Ketenagakerjaan			
						Capaian Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan: %)	3,04	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
						Capaian Kesempatan Kerja (Satuan: %)	15,55	
					Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri			
						Capaian Pelatihan dan kompetensi kerja (Satuan: %)	1,26	
7.	Tatakelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Efektifitas, dan Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	75,00	Administrasi Pemerintahan			Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD
					Program Tata Kelola Pemerintahan			Sekretariat Daerah dan Badan Penghubung, dan Sekretariat DPRD
						Nilai IKM (Satuan: skala)	3,00	
					Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan			Biro Organisasi
						Persentase OPD yang memiliki nilai LAKIP B (Satuan: %)	30,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan			Biro Pemerintahan
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Pemerintahan (Satuan: %)	75,00	
						Persentase Lembaga Keuangan yang memberikan Fasilitas Pinjaman bagi Masyarakat (Satuan: %)	100,00	
						cakupan rekening kredit per penduduk dewasa yang disalurkan oleh kantor bank umum konvensional di prov banten (Satuan: %)	100,00	
					Program Perumusan Kebijakan Perekonomian			Biro Perekonomian
						Presentase Keselarasan Kebijakan pada Bidang Ekonomi (Satuan: %)	18,28	
					Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum			Biro Hukum
						Persentase realisasi target prolegda (Satuan: %)	100,00	
						Presentase keselarasan peraturan perundangan daerah dengan regulasi	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						hukum nasional (Satuan: %)		
						Persentase Raperda inisiatif yang memiliki naskah akademik (Satuan: %)	80,00	
					Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur			Biro Bina Infrastruktur dan Sumberdaya Alam
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang infrastruktur (Satuan: %)	80,00	
					Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			Biro Kesra
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Kesra (Satuan: %)	80,00	
					Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan			
						Persentase keselarasan kebijakan di bidang Administrasi Pembangunan (Satuan: %)	80,00	Biro Administrasi Pembangunan
						Persentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan: %)	80,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan			
						Capaian % kinerja pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan: %)	80,00	
						Capaian % kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan: %)	80,00	
						Capaian % kinerja Pelayanan Keprotokolan (Satuan: %)	80,00	
					Program Pelayanan Umum			
						Persentase Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda dalam kondisi baik (Satuan: %)	80,00	
					Program Pembangunan Kemitraan			Badan Penghubung
						Cakupan koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan: %)	80,00	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			Sekretariat DPRD
						Capaian % Kinerja Fungsi DPRD (Satuan: %)	80,00	
						Rasio Ketersediaan Prasarana dan Sarana Perkantoran dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur (Satuan: %)	80,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Capaian % Pelayanan Keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan DPRD (Satuan: %)	80,00	
		Mewujudkan Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia	74,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Badan Kesbangpol
			Angka Kriminalitas	4500,00				
					Program Pembinaan Kerukunan, Kesatuan Bangsa dan Politik			
						Angka Partisipasi Pilpres (Satuan: %)	70,00	
						Angka Partisipasi Pilleg (Satuan: %)	0,00	
						Angka Partisipasi Pilgub (Satuan: %)	0,00	
						Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan: %)	0,00	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional			
						Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi			
						Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70,00	
					Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan			
						Cakupan pembinaan dan penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan: %)	24.00	
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional			
						Prosentase penurunan peristiwa gangguan keamanan dalam daerah (Satuan: %)	100.00	
					Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi			
						Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan (Satuan: %)	70.00	
		Mewujudkan Sistem Penanggulangan Kebencanaan yang efektif	Indeks Kebencanaan	125,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan			BPBD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Masyarakat			
					Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana			BPBD
						Cakupan mitigasi dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan: %)	100,00	
					Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana			
						Presentase Ketersediaan Peralatan dan Logistik, Prabencana dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan: %)	100,00	
					Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana			
						Presentase Pemulihan Kondisi sosial ekonomi, sarana dan prasarana pasca bencana (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatkan Penegakan Peraturan Daerah Serta Ketentraman dan ketertiban umum	Rasio Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah	75,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Satpolpp

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah			
						Presentase Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah (Satuan: %)	75,00	
					Program Ketentraman dan Ketertiban Umum			
						cakupan pelayanan ketentraman ketertiban umum daerah provinsi (Satuan: %)	100,00	
					Program Perlindungan Masyarakat			
						Cakupan perlindungan masyarakat (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan dan Profil Penduduk	Capaian Tertib Administrasi Kependudukan	80,00	Program Penanganan Bencana Kebakaran			DP3AKKB
						Cakupan koordinasi penanganan bencana kebakaran (Satuan: %)	100,00	
					Administrasi Kependudukan dan Capil			
					Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil			
						Rasio bayi berakte kelahiran (Satuan: %)	67,38	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Rasio Pasangan berakte nikah (Satuan: %)	30,81	
						Rasio kepemilikan KTP-el dan NIK (Satuan: %)	86,46	
						Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (Satuan: %)	80,99	
						Cakupan data dan informasi kependudukan (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel dan Transparan untuk mendukung penilaian Opini BPK	Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	100,00	Keuangan			BPKAD
					Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah			
						Persentase Kesesuaian laporan dengan Standar Akutansi Pemerintah (Satuan: %)	90,00	
					Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
						Pesrsentase Kepatuhan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan (Satuan: %)	85,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Program Penatausahaan Aset Daerah			
						capaian tertib Administrasi Aset daerah (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Pendapatan Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah (%)	60,62	Keuangan			BPD
		Meningkatnya Pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi Informasi						
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			
						Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah yang dapat di selesaikan (Satuan: %)	15,22	
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah			
						Persentase Peningkatan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	58,94	
						Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain terhadap Pendapatan Daerah (%) (Satuan: %)	41,06	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		Meningkatnya Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) untuk Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Capaian Maturitas SPIP	3,00	Pengawasan			Inspektorat
					Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			
						Capaian Nilai Sakip (Satuan: %)	75.00	
						Indeks Integritas (Satuan: poin)	74.48	
						Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan: nilai)	3.00	
						Capaian OPINI Laporan Keuangan (Satuan: opini)	100.00	
		Meningkatnya kapasitas Telekomunikasi, informasi dan teknologi informatika	Persentase Pelayanan e-Government Pemerintah Provinsi Banten	61,83	Komunikasi dan Informatika			Diskominfo
		Meningkatnya pelayanan publik sebagai fungsi PPID	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	89,00				

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
		dengan pelayanan berbasis teknologi informasi						
					Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik			Diskominfo
						Persentase ketersediaan perangkat TI (Satuan: %)	48,38	
					Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik			
						Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Satuan: %)	40,00	
					Persandian			
					Program Tata Kelola Persandian			
						Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana (Satuan: %)	40,00	
					Statistik			
					Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
						Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi	60,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						(Satuan: %)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	Capaian Kesesuaian dengan Parameter Penilaian Dokumen Perencanaan Daerah	70,00	Perencanaan			Bappeda
		Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah						
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan			
						Persentase dokumen perencanaan RPJPD, RTRW dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA (Satuan: %)	00,00	
						Persentase Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA (Satuan: %)	100,00	
						Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD (Satuan: %)	85,00	
						Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian			

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Pembangunan Ekonomi			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang ekonomi yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	
					Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah			
						Persentase usulan kegiatan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang diakomodir dalam dokumen perencanaan (Satuan: %)	75,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
					Penelitian dan Pengembangan			Bappeda
					Program Penelitian dan Pengembangan			
						Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan (Satuan: %)	60,00	
						Persentase inovasi yang diadopsi (Satuan: %)	60,00	
					Statistik			Bappeda
					Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah			
						Persentase keterpakaian data dan informasi pembangunan daerah yang terintegrasi (Satuan: %)	60,00	
		Meningkatnya Kualitas Integritas dan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Indeks Profesionalitas ASN	15,00	Kepegawaian			BKD
					Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah			
						Prosentase pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan (Satuan: %)	90,00	
						Prosentase pegawai yang tidak melanggar kode etik dan disiplin pegawai (Satuan: %)	90,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Prosentase akurasi data kepegawaian (Satuan: %)	90,00	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
						Prosentase penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya (Satuan: %)	90,00	
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan Kompetensi Aparatur	Persentase Peningkatan Indeks Kompetensi ASN	15,00	Pendidikan dan Pelatihan			BPSDM
					Program Pengembangan SDM Aparatur			
						Rasio peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85,00	
						Rasio peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik (Satuan: %)	85,00	
					Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur			
						Prosentase kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat (Satuan: %)	85,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab
						Cakupan Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur (Satuan: %)	100,00	
		Meningkatnya Jumlah Desa tertinggal menjadi Desa Mandiri	Persentase Desa Mandiri	18,80	Pemberdayaan Masyarakat Desa			Dinas PMD
					Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa			
						Cakupan Desa Tertinggal menjadi Berkembang (Satuan: %)	2,00	
						Cakupan Desa Berkembang menjadi Mandiri (Satuan: %)	2,00	
					Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa			
						Cakupan Kerjasama Desa yang meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan: %)	2,00	
					Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan			
						Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam Kategori Baik (Satuan: %)	41,00	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Pemda	Target Pemerintah Daerah 2019	Urusan / Program	Indikator	Target Indikator 2019	OPD Penanggung Jawab

4.3 Tema Pembangunan Tahun 2019

4.3.1 Tema RKPD Provinsi Banten Tahun 2019

Tema pembangunan daerah pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan, permasalahan, tematik pembangunan serta prioritas pembangunan. Tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019 yaitu “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Setidaknya terdapat beberapa kata kunci yang menjadi makna dari tema ini, antara lain:

1. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur kedepan diarahkan untuk membuka akses-akses kawasan pusat-pusat pertumbuhan terutama di selatan Provinsi Banten untuk menghilangkan ketimpangan antara utara dan selatan wilayah Provinsi Banten. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini dimaknai dengan upaya membangun perekonomian wilayah Provinsi Banten melalui pengembangan sektor-sektor unggulan khususnya pengembangan sektor perdagangan dan jasa dalam mendukung sektor industri. Pembangunan sektor industri di Provinsi Banten merupakan sektor strategis yang memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan sektor lainnya. Lebih lanjut pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten juga perlu dibangun melalui pengembangan sektor pertanian sebagai salah satu sektor yang dapat menopang sektor non bisnis lainnya. Basis yang dapat menopang sektor non basis lainnya dan pembangunan industri kreatif yang menjadi bagian penting menciptakan lapangan pekerjaan dalam mengurangi pengangguran, serta tetap menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten dengan terus memacu dukungan infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini sejalan dengan usaha untuk mewujudkan Provinsi Banten yang berdaya saing untuk meningkatkan investor yang berinvestasi di Provinsi Banten.

2. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan yang ada saat ini masih dirasakan oleh masyarakat adanya kesenjangan antara utara dan selatan di wilayah Provinsi Banten. Untuk mengurangi kesenjangan ini

pada Tahun 2019 pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial akan diarahkan ke wilayah-wilayah sesuai dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki agar dapat diolah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kondisi sosial masyarakat menuju perbaikan khususnya perbaikan karakter dan mentalitas masyarakat untuk lebih berbudaya, beretika, berbudi pekerti luhur dalam usaha mewujudkan pembangunan Provinsi Banten. Lebih lanjut kesejahteraan juga dimaknai dengan usaha-usaha untuk melakukan penurunan angka kemiskinan melalui penciptaan usaha ekonomi produktif, pembangunan infrastruktur dalam upaya mendukung peningkatan distribusi barang dan komoditas, serta membuka aksesibilitas antar wilayah sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan di Provinsi Banten.

Program-program pembangunan di Provinsi Banten harus mampu menjaga pertumbuhan ekonomi 2018 dan mendorong pertumbuhan ekonomi 2019, langkah-langkah yang harus diterapkan antara lain memperbaiki kualitas belanja, peningkatan iklim usaha dan iklim investasi yang lebih kondusif, peningkatan daya saing dan nilai tambah industri. Kemudian mendorong peningkatan peran swasta dalam pembiayaan dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, program yang diciptakan perlu memprioritaskan belanja pemerintah untuk mencapai sasaran prioritas nasional. Langkah-langkah itu dilakukan melalui pendekatan *money follow program* yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial.

Hal ini untuk mendukung rencana kerja pemerintah pusat yang mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”

4.3.2 Internalisasi RPJPD dengan Tema RKPD Tahun 2019

RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 adalah tahun kedua yang berada pada tahapan akselerasi ke-II (Periode 2017–2022) RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Penekanan tahapan ke-II RPJPD

Provinsi Banten Tahun 2005-2025 adalah Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan tahap sebelumnya, RPJMD ke-4 ini diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan di Provinsi Banten melalui peningkatan akselerasi pembangunan di segala bidang sebagai persiapan menuju Provinsi Banten yang modern.

Adapun prioritas pembangunan RPJPD tahap IV yaitu :

1. Penanggulangan Kemiskinan, Pengangguran, dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial;

Penumbuhkembangan kewirausahaan, perlindungan tenaga kerja, fasilitasi pembinaan, pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan berorientasi global.

2. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia;

Penumbuhkembangan dan aktualisasi norma agama dan nilai budaya dalam kehidupan masyarakat, perluasan peran dan fungsi kelembagaan keagamaan dan kebudayaan, fokus pembangunan bidang pendidikan pada peningkatan APM, APK, RLS, penurunan buta aksara melalui peningkatan mutu pendidikan dan manajemen kependidikan, penyebarluasan minat baca dan budaya baca masyarakat. Bidang kesehatan pada upaya peningkatan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan bermutu dan terjangkau, peningkatan kualitas tenaga dan manajemen pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan Daya Saing Perekonomian;

Kemampuan perekonomian masyarakat perdesaan dan perkotaan, pengembangan teknologi tepat guna dalam pengembangan produk pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan, pengembangan dan peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah yang mendukung produk utama industri besar, fasilitasi kemitraan usaha antara pelaku usaha

perdagangan besar (modern) dengan pelaku usaha perdagangan kecil dan menengah (tradisional).

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana Wilayah;
Fasilitasi pengembangan sarana dan teknologi telekomunikasi dan informatika di pedesaan, ketersediaan rumah yang layak huni, terjangkau, dan responsif bencana, Fasilitasi usaha pengembangan perumahan.
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup;
Pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkualitas, penguatan peran kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dalam pengendalian, peningkatan kualitas dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, mitigasi dan penanggulangan bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri. Penyelenggaraan Tata
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih;
Pengembangan dan peningkatan kualitas kemitraan dan kerjasama operasional dengan pihak swasta dalam pembiayaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, peningkatan kemitraan masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
7. Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis.
Pemantapan fungsi kawasan strategis sebagai „pintu keluar-masuk’ wilayah Banten:
 - (1) kawasan bandar udara Soekarno-Hatta;
 - (2) kawasan pelabuhan hub internasional Bojonegara;
 - (3) kawasan permukiman skala besar Kota Kekerabatan Maja;
 - (4) Operasionalisasi tol ruas baru.

Gambar 4.1
Posisi Dokumen RKPD Tahun 2019 Terhadap RPJPD Tahun 2005-2025
dan RPJMD Tahun 2017-2022



4.3.3 Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema
RKPD Tahun 2019

Tematik pembangunan Tahun 2019 dibangun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang didapatkan dari hasil Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2019, dengan penetapan Isu Strategis Tahun 2019 adalah:

1. Pengurangan kesenjangan wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur;
2. Peningkatan daya saing daerah melalui aksesibilitas dan mutu pendidikan dan kesehatan;
3. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan keterampilan;
4. Pengurangan kemiskinan melalui jaminan social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5. Peningkatan tatakelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tematik pembangunan daerah yang disusun dalam kerangka perencanaan yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah:

4.3.3.1 Tematik Kemiskinan dan Pengangguran

Tabel 4.5
Matrik Tematik Kemiskinan dan Pengangguran

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja			
			Bimbingan Konsultasi Penghargaan Paramakarya	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Identifikasi Kesenjangan Produktivitas Mikro	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
		Peningkatan Pelatihan dan Pemagangan			
			Kemitraan Jejaring LPK	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Klaster Kompetensi	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
			Pelatihan Dasar Kewirausahaan	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemagangan Berbasis Pengguna	Kantong kemiskinan di Prov.Banten	Disnakertrans
	Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM				
		Penyelenggaraan Pelatihan Pemberdayaan Koperasi			
			pelatihan pengembangan produk Koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			pelatihan peningkatan pemasaran produk koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			pelatihan peningkatan teknologi kapasitas produksi Koperasi	Kab. Lebak	Dinas KUKM
		Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Kecil			
			Pelatihan Pengembangan Produk Usaha Kecil	Kab. Lebak	Dinas KUKM
			Pendidikan dan Pelatihan SDM kewirausahaan usaha kecil	Kab. Lebak	Dinas KUKM
	Program Pelayanan Pelatihan Tenaga				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Kerja Industri				
		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja BLKI Provinsi Banten			
			Sertifikasi Uji Kompetensi	Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel	BLKI
			Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangsel	BLKI
	Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri				
		Standarisasi dan sertifikasi Industri			
			Pelayanan Standar Produk dan Sertifikasi Pangan	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Pemasaran Produk Pariwisata				
		Promosi Pariwisata Provinsi Banten			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan Nasional	Dalam dan Luar Daerah	Dinas Pariwisata
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
		Dukungan infrastruktur jalan untuk investasi			
			Pembangunan jalan dan Jembatan	Provinsi Banten	PUPR
	Program Pembangunan Kemitraan				
		Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan			
			Bulan Promosi 8 Kabupaten/Kota di TMII	Jakarta	Badan Penghubung
			Fasilitasi Partisipasi dalam rangka PRJ	Jakarta	Badan Penghubung
			Partisipasi Anjungan Provinsi Banten pada Kegiatan di TMII	Jakarta	Badan Penghubung
			Pengelolaan Media Informasi dan Publikasi Badan Penghubung Provinsi Banten	Jakarta	Badan Penghubung

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Pembangunan Sumberdaya Air				
		Dukungan infrastruktur pada sektor agribisnis			
			Rehabilitasi Irigasi	Provinsi Banten	PUPR
	Program Pendidikan Menengah				
		Revitalisasi SMK Agribisnis untuk mendukung produktivitas agribisnis			
			Revitalisasi SMK agribisnis	Provinsi Banten	Dinas Pendidikan
	Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi				
		Penyebarluasan dan Pengembangan Pasar Kerja			
			Bimtek Analisis Pengembangan Pasar Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penguatan Informasi Bursa Tenaga Kerja Melalui BKOL	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penguatan Informasi Pasar Kerja (IPK) di Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Peningkatan Pelayanan Bursa Kerja Khusus	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan				
		Pengawasan Ketenagakerjaan			
			Pemeriksaan Kasus Kecelakaan Kerja	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penanganan Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pengawasan Ketenagakerjaan ke Perusahaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Tindak Lanjut Pengaduan Kasus Ketenagakerjaan	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Perikanan				
		Penanganan Pelanggaran			
			Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan	Provinsi Banten	DKP
			Patroli Laut Terpadu	Provinsi Banten	DKP
			Penanganan Pelanggaran	Provinsi Banten	DKP
			Pencegahan Konflik Nelayan Antar Daerah	Provinsi Banten	DKP
			Pengoperasian Kapal Pengawas Perikanan	Provinsi Banten	DKP
	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan				
		Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan			
			Pengelolaan Usaha Hutan Rakyat Berbasis Industri	20 kelompok (Lebak, Serang, Pandeglang)	DLHK

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pengelolaan Hutan Wilayah Pandeglang			
			Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Hutan	20 kelompok (Pandeglang)	DLHK
		Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (DAK)			
			Pengembangan Hutan Rakyat	300 Ha (Pandeglang, Lebak, Serang)	DLHK
	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				
		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir			
			Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Panimbang Tanjung Lesung Kab Pndglnng	DKP
			Identifikasi CSR di Wilayah Pesisir Provinsi Banten	Kab Serang, Kab Tgr, Kab Pndglnng, Kota Cilegon, Kota Serang, Kab Lebak 6 KAB/KOTA	DKP

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir	Kec Titrayasa Desa Lontar Kab Serang	DKP
		Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi			
			Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional	Kec Sumur Desa Cigorondong, Kab Serang Kec Pulau Ampel	DKP
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata				
		Dukungan integrasi pariwisata dengan sektor agribisnis			
		Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten			
			Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan	5 Lokasi (1 Lokasi di Kab Pandeglang)	Dinas Pariwisata
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten			
			Pengelolaan Wisata Alam	Kab Pandeglang	Dinas Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengelolaan Wisata Budaya / Religi	Kota Serang	Dinas Pariwisata
			Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten			
			Pembinaan manajemen Homestay / Pondok Wisata	Sawarna, Kab Lebak	Dinas Pariwisata
			Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata	Cikolelet Kab Serang	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				
		Pembinaan Usaha Industri Pariwisata			
			Forum Bisnis Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Nasional	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Produk Industri Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif			
			Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Penyediaan sarana dan prasarana Kota kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi				
		Kelembagaan dan Perizinan			
			Pembinaan dan Penyuluhan Koperasi	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Verifikasi dokumen Perizinan pembentukan, Perubahan dan Pembubaran Koperasi yang diajukan	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Jumlah koperasi KSP/ USP dan KSPPS/ UKSPPS yang dilakukan penilaian kesehatan	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Pengawasan dan Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Dukungan perdagangan pada sektor agribisnis			
			Pembangunan Pusat Distribusi	Provinsi Banten	Disperindag
		Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan			
		Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka			
			Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional	Provinsi Banten	Disperindag
			Partisipasi Fasilitasi Pameran Nasional	Provinsi Banten	Disperindag
			Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata	Provinsi Banten	Disperindag
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Bazaar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disperindag
			Forum komunikasi perpupukan di provinsi Banten (data dan informasi pupuk bersubsidi)	Provinsi Banten	Disperindag
			Pemantauan harga dan persediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting di provinsi banten dalam rangka hari besar keagamaan dan tahun baru	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri				
		Peningkatan Peran Dunia Usaha Bagi Pengembangan Ekspor Daerah			
			Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Ekspor Produk Hasil IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Identifikasi Produk Ekspor	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengamatan Produk Ekspor Provinsi Banten di Negara Pesaing	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengembangan Produk Ekspor	Provinsi Banten	Disperindag
			Penyediaan dan penyebarluasan informasi produk potensial daerah dan informasi pasar	Provinsi Banten	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			luar negeri		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil				
		Pengembangan Bina Usaha Kecil			
			Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan Internasional	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Volume usaha kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT	Provinsi Banten	Dinas KUKM
			Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas KUKM
		Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil			
			Pengembangan Wirausaha Kecil	Provinsi Banten	Dinas KUKM
	Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Ekonomi Kreatif				
		Pengembangan SDM Pariwisata Banten			
			Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
		Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
			Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi	Kota Serang, kab Serang, pandeglang, Tangsel	Dinas Pariwisata
		Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia			
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
			Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata	Provinsi Banten	Dinas Pariwisata
	Program Peningkatan Akses dan Kualitas				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Informasi Publik				
		Dukungan informasi kesempatan kerja			
			Informasi pasar kerja melalui Media Cetak, Media Televisi, Media Online, Media Radio, Media Sosial	Provinsi Banten	Diskominfo
	Program Peningkatan Daya Saing Industri				
		Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah			
			Terlaksananya Pengembangan Mutu Produk dan SDM IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Pengembangan Industri Kreatif	Provinsi Banten	Disperindag
			Peningkatan Industri Kreatif penguatan Kelembagaan Dekranasda Provinsi Banten	Provinsi Banten	(blank)
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Sentra IKM	Provinsi Banten	Disperindag
			Terlaksananya Seleksi Produk Unggulan OVOP Banten di 8 Kab/Kota	Provinsi Banten	Disperindag

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri			
			Pemagangan guru dan siswa SMK untuk program keahlian ganda, prakerin, teaching factory	Provinsi Banten	Disperindag
	Program Peningkatan Daya Saing Perikanan				
		Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya			
			Kelompok Usaha Budidaya Yang Bankable	Kab Pandeglang	DKP
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
		Peningkatan Pemasyarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja			
			Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama dalam Pekerjaan (Task Force Equal Employment Opportunity) Tingkat Kabupaten/Kota dan Perusahaan Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan				
		Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan			
			Penyiapan Bahan Penanganan kerawanan pangan provinsi	1. Kec. Majasari (Kab Pndgng) 2. Kec Teluknaga (Kab Tgr) 3. Kec. Kosambi (Kab Tgr) 4. Kec. Curug (Kab Tgr) 5. Kec. Cikande (Kab Serang) 6. Kec. Waringin Kuurng (Kab Serang)	Dinas Ketapang
	Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan				
		Pelatihan Keterampilan Bagi Pemuda			
			Pengembangan sentra kewirausahaan Pemuda (SKP)	8 Kab/Kota	Dispora
			Pengembangan wirausaha muda pemuda (WMP) dan kelompok wirausaha pemuda (KMP)	8 Kab/Kota	Dispora

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pemberian penghargaan dan fasilitasi sarana dan prasarana kepemudaan			
			Fasilitasi pemuda wirausahawan baru (80%)	Kota Serang	Dispora
	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian				
		Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi			
			Optimasi Lahan (Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar)	Kab. Lebak Kec. Cirinten	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura				
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura			
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah	kab pandeglang, kab serang, kab tangerang	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Buah	kab pandeglang, kab serang	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai	Kab Pandeglang, Kab Serang, Kota Serang	Dinas Pertanian
		Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura			
			Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji	Kec Ciablung Kab Pandeglang, Kec Kramatwatu Kab Serang	Dinas Pertanian
			Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah	Kec Baros Kab Serang, Kec Cisoka Kab Tgr	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura			
			Demplot pada Kawasan Budidaya Melon dan Pepaya	Kec Warung Gunung Kab Lebak, Kec Panongan Kab Tngr, Kec Walantaka Kota Serang, Kec Labuan Kab Pandeglang	Dinas Pertanian
			Pengembangan Durian dan Manggis di Pandeglang,Lebak dan Serang	Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Bojong, Kec Gunung Kencana	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demplot Aneka Cabai	Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pabdeglang, Kab Tangerang	Dinas Pertanian
			Demplot Bawang Merah melalui Biji	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu	Dinas Pertanian
			Demplot Bawang Merah melalui Umbi	Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Rajeg Kab Tgr, Sitandu.	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Jamur merang sesuai SOP/GAP	Kec. Baros Kab. Serang, Kec. Cipocok Jaya Kota Serang	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Jamur tiram sesuai SOP/GAP	Kec Gunung Kaler Kab Tgr, Kec Cimanuk Kab Pndglnng	Dinas Pertanian
			Demplot Budidaya Sayuran Daun sesuai SOP/GAP	Kec. Wr. Gunung Kab. Lebak, Sitandu	Dinas Pertanian
		Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura			
			Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
			Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Produksi Bibit Tanaman Durian Secara Vegetatif Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan				
		Pengembangan Komoditas Perkebunan			
			Pengembangan Kawasan Perkebunan	Kec Carita Kab Pndgng, Kec Wansalam, Kec Cigeulis Kab pandgng, Kec Carita Kab pndgng, Kec Munul Kab pndgng, Kec Sobang Kab lebak, Kec Cinoyong Kab Pdngng, Kec Pabuaran Kab serang, Kec Bojong Mnaik Kab lebak, Kec Ciomas Kab Serang	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengembangan Komoditas Potensial Perkebunan	Kec Carita Kab Pndgng,, Kec Padaincang Kab Serang, Kec Cinangka Kab Serang, Kec Ciomas Kab Serang, Kec Mancak Kab Serang, Kec Muncang Kab Lebak, Kec Mandalawangi Kab pdgng	Dinas Pertanian
		Produksi dan Pemasaran Benih Tanaman Perkebunan			
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Aren Pola Kemitraan	Dragong Kec Taktakan	Dinas Pertanian
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kakao Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	Dinas Pertanian
			Pembinaan Penyediaan Bibit Generatif Kelapa Pola Kemitraan	Drangong Kec Taktakan	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan				
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Sereal			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demfarm Intensifikasi Jagung	1. Kab. Serang (Kec.Jawilan) 2. Kab. Pandeglang (Kec.Cikeusik)	Dinas Pertanian
		Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan			
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung	Kec. Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Kawasan SITANDU Kec.Curug dan Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai	Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, Kec.Curug Kota Serang dan Kabupaten Lebak	Dinas Pertanian
			Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi	Kab Serang : Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam	Dinas Pertanian
		Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan)	Kec Muncang, Kec Mandalawangi	Dinas Pertanian
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	1. Kab. Lebak (Kec.Wanasalam)kedelai 2.Kab Tgr (Kec.Balaraja)kedelai 3.Kota Cilegon (Kec.Purwakarta)kedelai 4.Kota Cilegon (Kec.Cibeber(kedelai) 5.KP3B Dinas Pertanian (kedelai) 6.Kab/Lebak (kec.Rangkasbitung) kcng tanah 7.Kota serang (Kec.Taktakan) kcng tanah 8.Kab Pndgln(Kec.Cibaliung) kcng tnh 9.Kab.Tgr (Kec.Solear) kcng tnh 10.Kota Cilegon (Kec.Citangkil) kcng tnh 11.Kab.Tgr (Kec.Cisoka) kedelai 12.Kota Serang (Kec.Curug) kedelai 13.Kab.Pndgln (Kec Cigeulis) kedelai 14.Kab. Lebak (Kec.Leuwidamar)kedelai 15.Kab.Lebak (Kec	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
				(Kec.Cinagka)kedela 17.Kab.Serang (Gunung Sahari)kedelai 18.Kab Serang (Kwc.Waringin Kurung)kedelai 19.Kab Pndgln (Kec.Cibaliung)kedelai	

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kec.Wanasalam(Kab Lebak), Kec.Balaraja(Kab. TGr), Kec.Purwakarta Kota Cilegon, Kec.Cibber Kota Cilegon,KP3B, Kec Rangkasbitung Kab Lebak, Kec Taktakan Kota Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Solear Kab Tgr, Kec Citangkil Kota Cilegon,Kec Cisoka Kab Tgr, Kec Curug Kota Serang, Kec Cigeulis Kab Pdglng, Kec. Leuwidamar Kab Lebak,Kec Malingping Kab Lebak, Kec Cinagka Kab Serang, Kec Gunung Sari Kab Serang, Kec Waringin Kurung Kab Serang, Kec Cibaliung Kab Pandeglang, Kec Cimanggu Kab Pandeglang, Kec Panimbang Kab Pandeglang, Kec Carita Kab pandeglang KP3B,	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Searelia			
			Demfarm Intensifikasi Padi Ladang	1. Kab.Serang (Kec.Pontang) 2. Kab Serang (Kec.Lebakwangi) 3. Kab.Lebak (Kec.Malingping) 4. Kab.Lebak (Kec.Wanasalam) 5. Kab. Lebak (Kec.Cibeber) 6. Kab.Pandeglang (Kec.Panimbang) 7. Kab.Pandeglang (Kec.Sobang) 8. Kab.Pandeglang (Kec.Sukaresmi) 9. Kota Serang (Kec.Walantaka)	Dinas Pertanian
			Demfarm Intensifikasi Padi Sawah	1. Kab.Lebak(Kec. Wanasalam). 2.Kab. Pandeglang (Kec.Cibaliung)	Dinas Pertanian

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Demplot Budidaya Mina Padi	1. Kab. Lebak (Kec.Cipanas) 2. Kab.Pandeglang (Kec.Cipeucang)	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap				
		Pengelolaan Sumber Daya Ikan			
			Identifikasi Lokasi sertifikat hak atas (Sehat) nelayan	1. Kab pandeglang, 2. Kab Lebak, 3. Kab Serang	DKP
			Pembayaran Premi Asuransi Nelayan	Sumur, Wanasalan, Kronjo, Tanahara, Kasemen /Karangantu	DKP
	Program Perlindungan Konsumen Pangan				
		Pembinaan dan Pengembangan Diversifikasi Pangan			
			Pemanfaatan lahan pekarangan (KRPL)	Provinsi Banten	Dinas Ketapang

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Provinsi Banten	Dinas Ketapang
		Pembinaan dan Pengembangan Konsumsi Pangan			
			Pembinaan Kader Pangan B2SA	Provinsi Banten	Dinas Ketapang
PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL					
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti				
		Bimbingan Sosial dan Pelatihan Ketrampilan pada BP2S			
			Jumlah PMKS yang diberikan pelatihan ketrampilan pada BP2S	Kabupaten Lebak	Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
		Penerimaan Peserta Bimbingan Sosial dan Ketrampilan pada BP2S			
			Jumlah PMKS yang telah diterima dan disalurkan dalam bimbingan sosial dan pelatihan ketrampilan pada BP2S	Provinsi Banten	Balai Pemulihan dan Pengembangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Sosial
	Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera				
		Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan			
			Peningkatan kapasitas pengelolaan industri rumahan bagi Perempuan (termasuk hibah alat-alat)	Kota Serang	DP3AKKB
	Program Pemberdayaan Sosial				
		Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat			
			Jumlah Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis (KBSP) yang Mendapat Pemberdayaan Sosial	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Jumlah PSKS yang dibina (Kelembagaan pada Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Penganganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial)	Dinsos Prov. Banten-KP3B, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Kel. Citangkil Kec. Citangkil Kota Cilegon, Kab. Lebak	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Jumlah PSKS yang difungsikan sebagai pendamping	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian				
		Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan			
			Rekrutmen dan Pembekalan Tenaga Kesehatan	8 Kab/Kota	Dinkes
	Program Penangan Fakir Miskin				
		Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Desa Lontar Kec. Tirtayasa Kab. Serang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kab.Pandeglang, Kab.serang Kab. Tangerang	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Ds Mekarsari Kec.Panimbang Kab. Pandeglang, Desa Sukawali Kec. Pakuhaji Kab. Tangerang, Tanjung Jaya Kec. Panimbang Kab. Pandeglang	Dinsos
		Penanganan Fakir Miskin Perdesaan			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Bojong Kec. Bojong Kab. Pandeglang, Desa Mongpok Kec. Cikeusal Kab. Serang, Desa Sukamanah Kec. Rajeg Kab. Tangerang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Desa Sindangmandi Kec. Baros Kab. Serang, Desa Cihanjuang Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang, Desa Tambak Jaya Kec. Cibadak Kab. Lebak, Desa Pasir Kupa Kec. Karanganyer Kab. Lebak, Desa Pangarengan Kec. Rajeg Kab. Tangerang	Dinsos
		Penanganan Fakir Miskin Perkotaan			
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui KUBE	Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	Dinsos
			Pemberdayaan fakir miskin Perdesaan melalui RTLH	Kota Serang, Cilegon, Tangerang dan Tangsel	Dinsos
			Pemberdayaan Fakir Miskin Perdesaan melalui UEP	Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang	Dinsos
	Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah				
		Dukungan penyediaan guru produktif			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengadaan CPNSD Guru Produktif SMK	Provinsi Banten	BKD
	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit				
		Upaya Kesehatan Jiwa			
			Gerakan Banten Bebas Pasung	Provinsi Banten	Dinkes
	Program Pendidikan Menengah				
		Penjaminan Peserta Didik SMA			
			Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMA	Provinsi Banten	Dindikbud
		Penjaminan Peserta Didik SMK			
			Bantuan siswa miskin dan berprestasi SMK	Provinsi Banten	Dindikbud
	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan			
			Dana Program Jamkeskin Provinsi Banten	8 Kabupaten/Kota	Dinkes
	Program Peningkatan Daya Saing Industri				
		Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri			
			Kerjasama Link And Match Industri dan SMK	Provinsi Banten	Dinas Perindag
	Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				
		Penyiapan Pelaksanaan Penetapan UMP			
			Pembahasan Penetapan UMK se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pembahasan Penetapan UMP se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Pembahasan Penetapan UMSK se- Provinsi Banten	Provinsi Banten	Disnakertrans

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penangguhan UMP/UMK	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Peningkatan Kepesertaan BPJS Kesehatan	Provinsi Banten	Disnakertrans
			Penyusunan Struktur dan Skala Upah	Provinsi Banten	Disnakertrans
	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak				
		Perlindungan dan Peningkatan Tumbuh Kembang Anak			
			Evaluasi Pelaksanaan program Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Tingkat Provinsi	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola asrama dan panti asuhan	(blank)	(blank)
			Pelatihan pengasuhan anak bagi pengelola pondok pesantren	Provinsi Banten	DP3AKKB
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Membangun Desa				
		Pembinaan dan Penataan Badan Kerjasama Desa			
			Integrasi BKAD dari daerah kabupaten yang berbeda di Provinsi Banten untuk mendukung 5 Dimensi IPD	Kabupaten Pandeglang, Lebak dan Tangerang	Dinas PMD
			Optimalisasi Badan Kerjasama Antar Desa (BAKD)	118 BKAD di 118 kecamatan	(blank)
		Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pemerintahan Desa/Kelurahan			
			Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Tentatif, berdasarkan Keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait tempat Penyelenggaraan	(blank)
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial				
		Jaminan Sosial Keluarga Miskin			
			Penerima Jaminan Sosial Keluarga Miskin	(blank)	Dinsos
		Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS	Provinsi Banten	Dinsos
		Perlindungan Sosial Korban Bencana			
			Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Alam	8 Kab./ Kota, (TTC) Desa Hambalang, Sentul Kab. Bogor, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Korban Bencana Sosial	Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka Kab. Serang, Desa Cimanis Kec. Sobang Kab. Pandeglang	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Korban Pasca Bencana	Kec. Cinangka Kab. Serang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang, Kec. Sobang Kab. Pandeglang	Dinsos
			Perlindungan Sosial bagi Orang Terlantar	Kec. Ciligrang, Kab. Lebak dan Kec. Grogol, Kota Cilegon	Dinsos
	Program Rehabilitasi Sosial				
		Rehabilitasi Anak Yang Mendapatkan Rehabilitasi Sosial			
			Pendampingan Lanjut Usia	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Rehabilitasi Sosial Anak	Desa Kasunyatan Kec. Kasemen Kota Serang, LP Anak Pria (Kel. Sukaasih Kec. Tangerang Kota Tangerang), Dinsos Prov. Banten-KP3B, 8 Kab./ Kota	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	8 Kab./ Kota, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas				
			Bimbingan Sosial Penyandang Disabilitas Berat	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Tanjungan Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	Desa Inten Jaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Mekarjaya Kec. Cimarga Kab. Lebak, Desa Pasir Haur Kec. Cipanas Kab. Lebak	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Rehabilitasi Sosial ODGJ	Desa Sinar Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Banyuasih Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang, Desa Waringin Jaya Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
		Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang			
			Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang	Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Korban Tindak Kekerasan	LBK Kab. Serang (Kec. Curug Kota Serang)	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Korban Trafficking	8 Kabupaten/Kota dan DKI Jakarta	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Pekerja Migran	Kab. Pandeglang, Kab. Serang	Dinsos
			Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	LBK (Desa Rangkasbitung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak), Desa Belimbing Kec. Kosambi Kab. Tangerang, Kel. Banten Kec. Kasemen Kota Serang, Dinsos Prov. Banten-KP3B	Dinsos

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat				
		Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi			
			Penanganan Stunting	8 Kab./ Kota : Prioritas pada Ds. Inten Jaya Kec.cimarga (Lebak), Ds.Tanjung Jaya Kec.Cikeusik (Pandeglang), Ds.Paku alam Kec.Paku Haji (Kab.Tangerang), Ds. Umbul Tanjung Kec. Cinangka (Kab.Serang)	Dinkes
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH					
	pemanfaatan ketenagalistrikan				
		pengusahaan ketenagalistrikan			
			rekomendasi teknis perijinan pemanfaatan ketenagalistrikan	Provinsi Banten	Dinas ESDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Keciptakarya				
		Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi			
			Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	Provinsi Banten	DPRKP
	Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan				
		Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan			
			Pemasangan unit terpasang pembangkit dan reaktor dari energi terbarukan	Daerah Perbatasan/ Pulau-Pulau Terluar	Dinas ESDM
			Pembangunan Unit Terpasang Pembangkit dan Reaktor Energi Terbarukan	Provinsi Banten	Dinas ESDM
		Pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan			
			Pemasangan instalasi dan sambungan rumah(listrik perdesaan)	Provinsi Banten	Dinas ESDM

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara				
		Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan			
			Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Penumpang regional Panimbang	Provinsi Banten	Dishub
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan				
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Kereta Api			
			Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Stasiun Kereta Api Karangantu	Kota Serang	Dishub
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan				
		Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kawasan Strategis dan Kawasan Lintas Batas Provinsi Banten	Provinsi Banten	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Lebak	Kabupaten Lebak	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Cilegon	Kota Cilegon	DPRKP
			Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kota Serang	Kota Serang	DPRKP
		Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni			
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Provinsi Banten	DPRKP
PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN					
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana			
			Pembinaan ketahanan keluarga dan keluarga sejahtera	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Pengembangan pelayanan KBKR melalui kemitraan	Provinsi Banten	DP3AKKB
			Revitalisasi program KB bagi masyarakat di wilayah miskin perkotaan se-Provinsi Banten	Provinsi Banten	DP3AKKB
	Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum				
		Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum			
			Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	Provinsi Banten	Biro Hukum
	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa				
		Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemanfaatan hasil Karya TTG Tahun 2018	Desa Paku Alam, Kali Baru, Umbul Tanjung, Cikolelet, Ciherang Jaya, Kadu Ronyok, Sarageni, Karya Jaya	DPMD
			Pemberdayaan Desa Inovasi berbasis IT	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pembinaan dan Pengembangan Posyantek dan Posyantek Des/Kel	Kecamatan Pakuhaji, Kec. Cinangka, Kec. Cisata, Kec. Cimarga	DPMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG)	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG	Desa Paku Alam Kec. paku haji, Desa Kali Baru Kec. Paku Haji, Desa Umbul Tanjung Kec. Cinangka, Desa Cikolelet Kec. Cinangka, Desa Ciherang Jaya Kec. Cisata, Desa Kadu Ronyok Kec. Cisata, Desa Sarageni Kec. Cimarga, Desa Karya Jaya Kec. Cimarga	DPMD
			Pengembangan Tekhnologi Tepat Guna (TTG)	8 Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat	DPMD
		Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa melalui Karang Taruna	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD
			Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan para Kepala Dusun pada Desa Tertinggal (Peningkatan Pemahaman Kepala Dusun tentang Perkembangan dan Pembangunan Desa)	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD
			Peningkatan kapasitas manajemen Lembaga Kemasyarakatan Melalui Pelaku Usaha Perdesaan/kelurahan	Ds.Sukaresmi Kec. Sobang, Desa Majasari Kec. Sobang, Inten jaya Kec. Sobang, Parung Kokosan Kec. Cikeusik, Tanjungan Kec. Cikeusik, Cikadongdong Kec. Cikeusik, Siketug Kec. Ciomas, Lebak Kec. Ciomas	DPMD

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Peningkatan Kapasitas masyarakat Desa dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Desa	Kab. Serang, Pandeglang, Lebak dan Tangerang	DPMD
		Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa			
			Pembinaan dan Pengembangan Bumdes	SUKARESMI, MAJASARI, INTEN JAYA, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG	DPMD
			Pengembangan PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan)	Kecamatan Jiput	DPMD
			Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa	SUKARESMI KEC. SOBANG, INTEN JAYA, TANJUNGAN, Kali Baru Kecamatan Paku, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka, Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka, CIKADONGDONG, kec.cikeusik	DPMD
		Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Desa tentang Potensi Ekonomi Desa	SUKARESMI, MAJASARI, PARUNGKOKOS, TANJUNGAN, CIKADONGDONG, LEBAK, SIKETUG	DPMD
			Pembinaan dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Menuju Desa Mandiri	Desa Paku Alam, Kec Pakuhaji, Desa Kali Baru, Kec Pakuhaji, Desa Umbul Tanjung, KEC.Cinangka-serang, Desa Cikolelet, CIHERANG JAYA, Kadu Ronyok, Sarageni	DPMD
		Pendampingan Tenaga Profesional Terhadap Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa			
			Bimbingan Teknis Bagi Tenaga Profesional Terkait Penetapan Penggunaan Dana Desa	Desa Tertinggal dan Berkembang, (70 PLD), Pendamping Lokal Desa	Dinas PMD
			Pembinaan, Evaluasi dan Pengendalian Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	D PMD Prov. Banten - KP3B	Dinas PMD
			Pendampingan kegiatan padat karya di pembangunan perdesaan	Kabupaten Pandeglang	Dinas PMD
	Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan				

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN/SUB. KEGIATAN		LOKASI	OPD
	Rakyat				
			Verifikasi Calon Penerima Bantuan Masyarakat	Provinsi Banten	Biro Kesra

4.3.3.2 Tematik Kedaulatan Pangan

Tabel 4.6
Matrik Tematik Kedaulatan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1	Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	1	Ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Kota Serang	Dinas Ketahanan Pangan
				2	Peningkatan Kapasitas Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Banten	2	Rakor Satgas Pangan		
				3	Pembinaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	3	Penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
			Pengelolaan Ketersediaan Pangan Daerah	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)		
		2	Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Pembinaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Provinsi Banten	
		3	Program Perlindungan Konsumen Pangan	Analisis kebutuhan konsumsi pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
				Pembinaan Kader Pangan B2SA	Dinas Ketahanan Pangan	
		4	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Sistem informasi Harga bahan kebutuhan pokok strategis di Provinsi Banten	Provinsi Banten Dinas Perindustrian dan Perdagangan
					Bazaar/Gelar pasar murah di Provinsi Banten	
					Forum Komunikasi Perpupukan (data dan informasi pupuk bersubsidi)	
		5	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan Akses Distribusi Perdagangan	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi	Kabupaten Serang
					Pembentukan BUMD Agribisnis	Kota Setang
		6	Program Peningkatan Daya Saing Industri	Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Industri	Peningkatan Nilai Tambah Produk	Provinsi Banten

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		7	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia		Demfarm Intensifikasi Padi Sawah	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	Dinas Pertanian
							Demfarm Intensifikasi Padi Ladang	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab.Pandeglang (Cibaliung)	
							Gerakan Tanam dan Panen Padi	Kab. Serang (Pontang)	
							Demfarm Intensifikasi Jagung	Kab. Serang (Jawilan), Kab. Pandeglang (Cikeusik)	
							Gerakan Tanam dan Panen Jagung	Kab. Serang (Jawilan)	
							Demplot Budidaya Mina Padi	Kab. Lebak (Cipanas), Kab. Pandeglang, (Cipeucang)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi		Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis), Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber), Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung)	
					Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan		Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Padi Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
							Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Jagung Pola Kemitraan		
							Produksi Benih Bersertifikat Tanaman Kedelai Pola Kemitraan		
							Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan		
							Evaluasi Mutu Stock Benih		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
				Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan		Penyediaan Benih Sumber Tanaman Padi	1. Desa Kadubale Kec.Banjar, Kab.Pandeglang. 2. Desa Pamengkang Kec Kramatwatu, Desa Linduk Kecam	
						Penyediaan Benih Sumber Tanaman Jagung	1. Kec. Cibaliung,Kabupat en Pandeglang 2. Kawasan SITANDU Kec.Curug 3. dan Kabupaten Lebak	
						Penyediaan Benih Sumber Tanaman Kedelai	1.Kec.Cibaliung Kabupaten Pandeglang, 2.Kec.Curug Kota Serang 3. Kabupaten Lebak	
				Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengawasan Tanaman Pangan		Sertifikasi benih sumber dan sebar tanaman Pangan	Kab lebak, Kab Tangerang, dan kota Serang	
						Inventarisasi Penyebaran Varietas Tanaman Pangan dan Pemetaan Zona Varietas	Kab. Pdg, Kab. Lbk, Kota Serang, Kab. Serang, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab. Trg, Kota Tangsel	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pengawasan Mutu Benih	Kab.Srg, Kota Srg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Cilegon, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel	
							Pengujian Benih Secara Laboratoris	Kota Srg, Kab.Srg, Kota Clg, Kab.Pdg, Kab.Lbk, Kota Tgr, Kab.Tgr, Kota Tangsel	
							Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman	BPSBTPH	
							Pengembangan Plasmanutfah dan Persiapan Pelepasan Varietas	kab.tgr, kota tgr, kota tangsel, kab.lbk, kab.pdg, kota serang, kota clg, kab. Serang	
	8	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura			pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura		Penyediaan Benih Sumber Tanaman Bawang Merah	1. kab pandeglang, 2. kab serang, 3. kab tangerang	
							Penyediaan Benih Sumber Tanaman Tanaman Cabai	1. kab pandeglang, 2. kab serang, 3. kota serang	
							Demplot Aneka Cabai	Kota Serang, Kab Serang, Kab Lebak, Kab Pandeglang, Kab Tangerang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Demplot Bawang Merah Melalui Umbi	Kec. Kramatwatu Kab Serang, Kec. Panimbang Kab. Pdg, Kec. Rajeg Kab. Tng, Sitandu	
							Demplot Bawang Merah Melalui Biji	Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang, Kec. Kramatwatu Kab. Serang, Sitandu	
							Operasional Instalasi Laboratorium Kultur Jaringan		
					Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Hortikultura		Produksi Benih Bersertifikat Bawang Merah Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
							Produksi Benih Bersertifikat Cabai Pola Kemitraan		
		9	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan		Pengembangan Perbibitan Ternak		Pemetaan dan pendataan Potensi wilayah populasi produksi bibit ternak sapi dan kerbau dalam mengukur kinerja pembangunan peternakan	Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Banthani, Palima Curug - Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						Pengawasan Mutu benih, Bibit Ternak Sapi dan Kerbau serta Penerbitan SKLB (Surat Keterangan Layak Bibit)	4 kabupaten : Kabupaten pandeglang, kabupaten Lebak, kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang	
						Pemetaan Penggunaan semen beku	Kawasan Pusat Pemerintahan Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Banthani, Palima Curug - Serang	
						Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock di unit Usaha dan masyarakat	Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis	
						Pengawasan peredaran dan Produksi DOC dan DOD Final Stock diunit Usaha dan masyarakat	Kab Serang (Kopo) Kab. Lebak (Curugbitung, Sajira, Cimarga) dan Kab. Tangerang (Curug, Legok dan Cis	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pengembangan Pakan ternak		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Teknologi Pakan Sederhana di Wilayah Provinsi Banten	SITANDU Kecamatan Curug Kota Serang	
						Asuransi Ternak Ruminansia	Cikulur Kabupaten Lebak		
						Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pengolahan Produk Hewan	Kecamatan Carita		
						Pengembangan Mutu dan Standarisasi Produk Hewan	Kecamatan Rangkasbitung		
					Perbibitan Ternak		Budidaya Ternak Domba/Kambing	UPT Balai Pengembangan Peternakan	
							Budidaya Ternak Sapi		
							Budidaya Ternak Kerbau		
							Budidaya Ternak Ayam Buras		
					Perbibitan Ternak Itik Damiaking				
		10	Program Peningkatan		Penyediaan Prasarana dan		Penyediaan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
			Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		Sarana Pertanian	Pengawasan Peredaran Pupuk Pestisida	KAB PDG, KAB LBK,KOTA SERANG,KAB.SERANG,KOTA TANGSEL,KAB TANGERANG,KOTA TANGERANG	
						Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi	Dinas Pertanian	
						Pengawasan Alat dan Mesin Pertanian	8 KAB/KOTA	
					Optimalisasi Pemanfaatan Lahan dan Air Irigasi	Penataan Prasarana Pertanian Untuk Lahan (Kesuburan Lahan)	Kec.Pandeglang Kab.Pandeglang	
						Penataan Prasarana Pertanian Untuk Irigasi	Kec.Pandeglang, Rangkasbitung, Sepatan	
						Optimasi Lahan (Penyiapan Prakondisi Pemanfaatan Lahan Terlantar)	Kab. Lebak Kec. Cirinten	
		11	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman		Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Serelia	Peningkatan Kapasitas petugas pengumpul data Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)	8 Kabupaten/Kota	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
			Pangan		Produksi dan Pemasaran benih Tanaman Pangan	Penyediaan Cadangan Benih Daerah (CBD) Tanaman Padi Pola Kemitraan	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	
						Evaluasi Mutu Stock Benih	JL. RAYA CILEGON KM. 04 DRANGONG SERANG BANTEN	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu aneka Kacang dan Umbi		Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Kacang melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Kedelai, Kab Lebak (wanasalam, leuwidamar, malingping), Kab Serang (Cinangka, Gunungsari, Waringin Kurung), Kab Pandeglang (Cibaliung, Cimanggu, Panimbang, Carita, Cigeulis), Kota Serang (Curug), Kab Tangerang (Cisoka, Balaraja), Kota Cilegon (Purwakarta, Cibeber), Kacang Tanah, Kab Lebak (Rangkasbitung), Kota Serang (Taktakan), Kab Lebak (Cibaliung), Kab Tangerang (Solear), Kota Cilegon (Citangkil)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Aneka Umbi melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu Spesifik Lokasi	Ubi Jalar, Kab Lebak (Maja, Sajira), Kab Pandeglang (Menes, Mandalawangi), Gembili, Kab Pandeglang (Menes), Talas Beneng, Kab Pandeglang (KarangTanjung)	
					Perlindungan Tanaman Pangan	Pertemuan Teknis Sinkronisasi Pelaporan Serangan OPT Tanaman Pangan	BPTPH Prov. Banten	
						Pembinaan Petugas Pengendali OPT, Lab. PHP di 8 Wilayah Kerja Pengamatan OPT	BPTPH Prov. Banten	
						Sosialisasi Hasil Peramalan OPT Tanaman Pangan	Lebak, Pandeglang, Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						Surveillance OPT WBC dan Penggerek Batang Padi	Jiput, Pagelaran, Panimbang, Sindang Resmi, Kramatwatu, Pontang, Lebakwangi, Malingping, Wanasalam, Kasemen, Kronjo, Mekarbaru	
						Peningkatan Operasional LPPHP untuk OPT Pangan (2 Instalasi LAB)	Lebak, Pandeglang, Serang	
						Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Pangan pada Wilayah Tersebar	Provinsi Banten	
						Pengawasan dan Peredaran Pestisida	Provinsi Banten	
						Penyusunan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Pengendalian OPT Tanaman	Provinsi Banten	
					Perlindungan Tanaman Hortikultura	Terfasilitasinya Lab. LPHP Wilayah Serang dan Lebak	Laboratorium Wilayah I Serang, Laboratorium Wilayah 2 Lebak	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						Terfasilitasinya Sarana Pengendalian OPT Ramah Lingkungan pada Tanaman Hortikultura	Laboratorium Lab. Wilayah 1 Kota Serang	
						Terbinanya SDM Petugas Lapang POPT/PHP	BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang-Lebak	
						Tersusunnya Peramalan dan Terpetakannya OPT Utama Hortikultura	BPTPH Provinsi Banten/Lab. Wil. I Serang dan Lab. Wil. II Pandeglang-Lebak	
					Pengembangan Teknologi dan Pasca panen Tanaman pangan	Penanganan Pasca Panen Hasil Tanaman Pangan (susut Hasil)	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	
						Penerapan Teknologi Pertanian Padi Varietas Baru (Demplot Ramah Lingkungan)	Kab. Lebak (Wanasalam), Kab. Pandeglang, (Cikeusik), Kab. Serang (Pontang)	
					Pengembangan Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura	Penerapan Inovasi Teknologi Prooning (Pangkas Daun) pada Budidaya Komoditas Bawang Merah	Kecamatan Baros, Kabupaten Serang dan Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Penerapan Inovasi Teknologi Budidaya Bawang Merah melalui Semai Biji	Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang dan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang	
							Peningkatan Penerapan Good Handling Practice pada Komoditas : Cabai Merah, Bawang Merah, Manggis, Melon	Kabupaten Pandeglang, Serang, Lebak dan, Kota Cilegon	
		12	Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		Penanggulangan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular		Surveilans Brucellosis	Provinsi Banten	
							Jaminan Kesehatan Hewan		
							Public Awareness Pengendalian dan Penanggulangan Avian Influenza (AI)		
					Pengendalian Kesehatan Masyarakat Veteriner		Pembinaan Unit Usaha Produk Hewan dan Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Provinsi Banten	
							Public Awareness Produk Hewan ASUH	Provinsi Banten	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan		Pengawasan Produk Asal Hewan dan Pertemuan Pengawasan Produk Asal Hewan	Provinsi Banten	
							Profiling data unit usaha obat hewan	Provinsi Banten	
					Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pengendalian Penyakit Hewan Menular		Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Parasiter	Provinsi Banten	
							Penguatan Kapasitas Klinik Hewan	Provinsi Banten	
							Pemeriksaan Ante Mortem Hewan Qurban	Provinsi Banten	
							Pencegahan dan Pengendalian Penyakit AI	Provinsi Banten	
							Pengawasan Lalulintas Hewan dan Produk Hewan	Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Serpong), Perbatasan Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat (Kecamatan Cipanas)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pemeriksaan dan Pencegahan Penyakit Brucellosis	Provinsi Banten	
							Pemeriksaan dan Penanggulangan Penyakit Gangguan Reproduksi	Provinsi Banten	
							Penguatan Kapasitas Laboratorium Kesehatan Hewan	Laboratorium UPT BPPV	
					Peningkatan Penyidikan, Pengujian dan Pelayanan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)		Pengujian Sampel PHM pada lab Kesmavet	Provinsi Banten	
							Pengawasan Keamanan Produk Hewan	Provinsi Banten	
		13	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Tani		Penilaian Kelembagaan Penyuluh dan Kelembagaan Pelaku Utama Berprestasi	Kota Serang	
		14	Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		Pengelolaan Sumber Daya Ikan		Pembuatan Apartemen Ikan	Sumur Pandenglang, Pulo Panjang Serang	Dinas Kelautan Dan Perikanan
							Restocking Ikan	Wanasalam, Sumur Taman Jaya	
							Produktifitas Alat Tangkap	Panimbang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Ikan		
							Rekomendasi Alokasi Usaha Penangkapan Ikan	Sumur, Bayah, Mauk, Puloampel, Pulomerak	
				Pengelolaan Kapal, Alat Penangkap Ikan dan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan			Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Perikanan Tangkap (SIUP, SIPI dan SIKPI) Ukuran 10 - 30 GT	Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel,Kramatwatu	
							Pelayanan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan (BPKP) Ukuran 5-10 GT	PPI Cituis	
							Pengadaan Kapal Ikan Ukuran 5-10 GT		
							Pelayanan Buku Kapal Perikanan Ukuran 5 -30 GT	Wanasalam, Labuan, Panimbang, Sumur, Kasemen, Tirtayasa, Pulo Ampel,Kramatwatu	
							Pelayanan Rekomendasi Teknis Bagi Kapal Penangkapan Ikan	Wanasalam, Sumur, Panimbang, Kronjo, Karangantu	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pelayanan Sertifikasi Awak Kapal Perikanan	STP Karangantu	
							Koordinasi Pengendalian Nelayan Andon	1. Jabar (Bandung) 2. Jateng (Semarang) 3. DKI Jakarta 4. Bandar Lampung	
							Standarisasi Kapal Perikanan dan alat Penangkap Ikan	Dinas Kelautan Perikanan	
					Pembinaan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan		Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Provinsi Banten	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Penyusunan DED (Redesign) Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Revitalisasi Pelabuhan Perikanan	3 Lokasi (PPI Labuan, PPI Binuangeun dan PPI Cituis)	
							Operasional PPI Binuangeun dan PPI Cituis	KAB LEBAK DAN KAB TANGERANG	
					Pengembangan Usaha Pelabuhan		Oprasional Pabrik Es	UPTD BPPP LABUAN	
							Operasional Cold Storage		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							Pelayanan Air Bersih		
					Tata Operasional BPPP Labuan		Pelabuhan Perikanan yang melaksanakan kesyabandaran		
							Kapal yang tambat labuh		
							Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI)		
							Surat Hasil Tangkap Ikan (SHTI)		
							Pengumpulan Data, Pengelolaan, dan Pengembangan Informasi Pelabuhan Perikanan		
					Penanganan Pelanggaran		Penanganan Pelanggaran	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
							Pencegahan konflik nelayan antar daerah	DKI, Lampung, Jabar, Jateng	
							Patroli Laut Terpadu	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
							Pengoperasian kapal pengawas perikanan	PERAIRAN PROVINSI BANTEN	
					Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						Pengawasan Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Panimbang, Cilegon, Kab Tangerang	
						Pengawasan Usaha Perikanan Budidaya	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	
						Pembinaan Pokmaswas	Kronjo, Wanasalam, Sumur, Karangantu	
		15	Program Peningkatan daya saing perikanan		Peningkatan Investasi dan Promosi Produk Perikanan	Bazar Produk Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten / GEMARIKAN	Kab. Serang	
						Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) Bagi Unit Pengolahan Ikan (UPI)	Kab Serang, Kota Serang, Kota Tangerang, Kab Tangerang, Labuan	
						Rekomendasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)	Kab. Pandeglang	
					Peningkatan Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya	Rekomendasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	Kab. Tangerang	
						Penerbitan IUP Budidaya Ikan Lintas Kab/Kota	Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD					
		16	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		Fasilitasi dan Sertifikasi Pelatihan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Panimbang, Tanjung Leseung						
							Pelatihan Pemberdayaan Usaha masyarakat pesisir	Panimbang						
		17	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi		Bina Usaha Koperasi			Provinsi Banten	Dinas Koperasi UKM					
		18	Program Pengembanga n Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil		Bina Usaha Kecil									
												Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil		Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya
														Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT
														Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT
														Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH		Program Pembangunan Sumberdaya Air		Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan, Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya			Provinsi Banten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Utara		Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal-Boru)	Jalan Akses Tol Cikeusal(Cikeusal- Boru)	
							Pembangunan Jalan Provinsi Ruas Jalan Ciruas - Pontang	Ciruas - Pontang	
					Pembangunan dan Peningkatan Jalan Wilayah Selatan		Tanjung Lesung - Sumur	Ruas Jalan Tanjung Lesung - Sumur	
							Mengger - Mandalawangi - Caringin	Ruas Jalan Mengger - Mandalawangi - Caringin	
							Saketi - Malingping - Simpang	Ruas Jalan Saketi - Malingping - Simpang	
							Cipanas - Warung Banten	Ruas Jalan Cipanas - Warung Banten	
							Jalan Raya Labuan (Pandeglang)	Ruas Jalan Raya Labuan (Pandeglang)	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
				Pembangunan Jembatan		Jembatan Cimayan Ruas Picung-Munjul	Jembatan Cimayan Ruas Picung-Munjul	
						Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	Jembatan Sibaya, Kemayungan I dan Sukajaya Ruas Jalan Banten Lama- Pontang	
						Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	Jembatan Linduk Ruas Jalan Banten Lama-Pontang	
						Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama-Pontang	Jembatan Kemayungan II/Ciruang Ruas Banten Lama-Pontang	
		Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan		Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan		Pengembangan Hutan Rakyat (KBD, Demplot Hutan Rakyat, Tanaman Bawah Tegakan)	Kota Serang	Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan
				Konservasi SDA dan Ekosistem		Bintek Budidaya Tanaman di BawahTegakan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
	PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESE HATAN DAN SOSIAL		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian		Pengendalian, Pengawasan Produk dan Distribusi Kefarmasian dan Pangan		Pengembangan SDM Pengawasan Keamanan Pangan di Wilayah Provinsi Banten	Provinsi Banten	Dinas Kesehatan
	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN		PROGRAM PENGEMBAN GAN, PENDAYAGUN AAN, PENINGKATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI		Pengembangan Sarana Aplikasi Informatika		Pembangunan Sistem Informasi	Provinsi Banten	Dinas Komunikasi Informatika
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEREKONOMI AN		Perumusan Kebijakan Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD			Provinsi Banten	Biro Bina Perekonomi an
					Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM				
					Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan				
					Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan				

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/ SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN INFRASTRUKT UR		Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Provinsi Banten	Biro Infrastrukt ur & SDA
					Perumusan Kebijakan Pertanahan				
					Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan				

4.3.3.3 Tematik Pariwisata

Tabel 4.7
Matrik Tematik Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
1	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH	1	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Pengembangan Sarana dan prasarana telematika	1	Penyediaan dan Pengelolaan Jaringan Interkoneksi	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		2	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	1	Penyediaan dan Pembangunan Perumahan	1	Pembangunan Rumah Tidak layak Huni (Kp. Cikadu, Desa Tanjungjaya, Kec. Panimbang)		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		3	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1	Pembangunan Sarana Prasarana Infrastruktur Kawasan Strategis Panimbang, Bayah, Cipanas, Cibaliung, Cigeulis		
		4	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1	Pengembangan dan peningkatan jalan wilayah selatan	1	Pembangunan Jalan Tanjung Lesung - Sumur (16 Km)		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		5	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1	Pembangunan dan Penataan Sarana Prasarana	1	Pembangunan Halte pada ruas jalan Provinsi Banten		Dinas Perhubungan
		6	Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	1	Penyelenggaraan Keselamatan Pelayaran dan Pengendalian Pemantauan Angkutan Laut	1	Pemantauan dan Pengendalian Angkutan Laut		
						2	Pembinaan Keselamatan Angkutan laut Antar Pulau		
				2	Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Laut dan Penyeberangan	1	Pengadaan lahan pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang		
						2	Pemantauan dan Pengendalian Penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan dan ASDP		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						3	DED pembangunan pelabuhan penumpang regional panimbang		
				3	Penyelenggaraan Perhubungan Udara	1	Apraisal Pengadaan lahan Bandar Udara Banten Selatan		
		7	Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	1	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Transportasi	1	Evaluasi Kinerja Ruas Jalan Provinai Banten Wilayah Kerja III		
						2	Kajian Kebutuhan Navigasi Antar Pulau di Provinsi Banten		
		8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1	Penyelenggaraan Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1	Pemasangan Rambu Peringatan Jenis VMS (Variabel Message Sign)		
						2	Inspeksi Keselamatan Jalan Provinsi Banten		
				2	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan	1	Pengadaan Marka Jalan		
						2	Pengadaan guard rail		
						3	Pengadaan Warning Light		
						4	Pengadaan Rambu Standar		
						5	Pengadaan Paku Jalan		
						6	Pengadaan PJU		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				3	Pengendalian dan Penyelenggaraan Lalu lintas Jalan	1	Pengaturan Lalu Lintas Pada Acara Pimpinan Daerah/SKPD/Lembaga/ Organisasi dan Pengaturan Lainnya		
						2	Posko Hari Libur Nasional		
						3	Penertiban Angkutan Barang/Penumpang pada ruas jalan Provinsi dan Jalan Nasional		
2	PENINGKATAN AKSES, MUTU PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN SOSIAL	1	Program Penanganan Fakir Miskin	1	Penanganan Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	1	Bantuan Sosial UEP Fakir Miskin Daerah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Sosial
		2	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	Peningkatan Jumlah Desa Yang Melaksanakan STBM		Dinas Kesehatan
		3	Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Kerjasama Pelayanan Kesehatan	1	Pelaksanaan Kerjasama Pelayanan Kesehatan		
		4	Program Pendidikan Menengah	1	Peningkatan Peserta Didik SMK	1	Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik		Dinas Pendidikan
3	PENINGKATAN EKONOMI DAN KESEMPATAN BERUSAHA	1	Program Pemasaran Produk Pariwisata	1	Promosi Pariwisata Provinsi Banten	1	Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala daerah dan	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
							Nasional	
						2	Gebyar Wisata Banten	
						3	Banten Beach Festival	
						4	Festival Tanjung lesung	
						5	Promosi di Media Cetak ,Elektronik dan Website	
						6	Launcing Kalender Event	
						7	Banten Travel Exchange	
						8	Komunitas Familiar Trip	
						9	Banten Tourism Week	
				2	Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata	1	Pengadaan Materi dan Sarana Promosi Pariwisata Banten	
						2	Pembuatan materi Promosi Audiovisual Pariwisata Banten	
				3	Pengembangan Potensi Pasar Pariwisata	1	Identifikasi segmen pasar Pariwisata	
						2	Pengembangan sistem manajemen Informasi Pariwisata Daerah / SIMPARDA	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						3	Penyusunan / Pembuatan Buku NESPADA Banten		
						4	Pembuatan Buku Pariwisata dalam angka		
		2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	1	Pengelolaan Wisata Alam		
						2	Pengelolaan Minat Khusus / Wisata Buatan		
						3	Penyediaan amenitas kawasan strategis Pariwisata		
				2	Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata Provinsi Banten	1	Pembinaan Tata kelola Destination Management Organization (DMO) di Kawasan Strategis Pariwisata		
						2	Pembinaan managament Homestay / Pondok Wisata		
						3	Gerakan Aksi sadar wisata		
				3	Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi Banten	1	Pengembangan Atraksi Wisata Alam, Budaya dan Buatan		
		3	Program pengembangan SDM pariwisata dan Ekraf	1	Peningkatan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber	1	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Ekonomi Kreatif		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Daya Manusia	2	Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Pariwisata		
				2	Pengembangan SDM Pariwisata Banten	1	Pengembangan SDM Pariwisata di kawasan 10 (sepuluh) Destinasi Unggulan Banten		
						2	Pengembangan SDM Penggerak Pariwisata		
						3	Penganugrahan Pelaku SDM Pariwisata berprestasi		
				3	Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1	Pengembangan SDM Sub Sektor Ekonomi Kreatif Provinsi		
						2	Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif menuju hak kekayaan intelektual		
		4	Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekraf	1	Pembinaan Usaha Industri Pariwisata	1	Peningkatan Produk Industri Pariwisata		
						2	Penghargaan Usaha Akomodasi pariwisata yang berwawasan lingkungan		
						3	Pembuatan Pola Perjalanan Pariwisata Banten 10 destinasi unggulan		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Standarisasi Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Advokasi dan supervisi Standarisasi usaha pariwisata		
						2	Penghargaan Industri Usaha terbaik		
				3	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif	1	Pengembangan potensi usaha ekonomi kreatif melalui pameran produk kreatif dalam dan luar daerah		
		5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	1	Bina Usaha Kecil	1	Peningkatan Promosi Usaha Kecil melalui Pameran tingkat Regional, Nasional dan Internasional		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
						2	Peningkatan Volume usaha kecil		
						3	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis		
						4	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi mendapat akses pasar		
						5	Sentra Pemasaran di Wilayah Provinsi Banten		
				2	Pengembangan Penguatan dan	1	Perluasan akses pembiayaan Usaha Kecil		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
					Perlindungan Usaha Kecil	2	Sentra Produksi di Wilayah Provinsi Banten		
					3	Fasilitasi Produk Unggulan Usaha kecil			
					4	Peningkatan Usaha kecil yang difasilitasi standar produknya			
					5	Produk usaha kecil yang difasilitasi teknologi di PLUT			
					6	Produk usaha kecil orientasi ekspor di PLUT			
					7	Peningkatan usaha kecil yang difasilitasi akses bahan baku			
					3	Peningkatan Kualitas Usaha Kecil SDM	1		
				2			Pengembangan Wirausaha Kecil		
				6	Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	1	Bina Usaha Koperasi		
		2	Penganekaragaman Volume Usaha Koperasi						
		3	Peningkatkan kapasitas						

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
							produksi Koperasi		
						4	Jumlah Akses Pasar koperasi yang terfasilitasi		
						5	Jumlah Kemitraan strategis koperasi dengan badan usaha lainnya		
						6	Implementasi Teknologi Tepat Guna Bagi Koperasi pesantren		
				2	Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi	1	Fasilitasi akses permodalan		
						2	Implementasikan Sistem Teknologi Informasi dan Manajemen Keuangan		
						3	Sosialisasi perpajakan, asuransi dan penjaminan		
						4	peningkatan akses permodalan di PLUT		
				3	Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	1	Peningkatan SDM pada Akses Pasar, Pemasaran, Manajemen dan Keuangan		
		7	Program Peningkatan iklim, promosi dan	1	Penyelenggaraan Promosi dan kerjasama	1	Penyelenggaraan Promosi melalui Media Massa		Dinas Penanaman Modal dan PTSP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
			kerjasama investasi		penanaman modal	
		9	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	1	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat	
		10	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Dinas Kelautan Dan Perikanan
				2	Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
				3	Gerakan Bersih Pantai dan Laut	
		11	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1	Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	DLHK
		12	Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1	Pemeliharaan Lingkungan Hidup	
		13	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-	1	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan Dan Perikanan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
			Pulau Kecil	2	Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi	1	Fasilitasi Pengelolaan Ruang Laut Untuk Masyarakat Lokal dan Tradisional		
						2	Penataan Pengelolaan Ruang Laut Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		
		14	Program Peningkatan Daya Saing Industri	1	Peningkatan dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1	Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		15	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1	Peningkatan Peran Pelaku Usaha Dalam Kerjasama Perdagangan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka	1	Peningkatan Promosi Produk IKM menunjang destinasi Pariwisata		
4	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN	2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	Pembinaan dan Pengembangan dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG). (Tersedianya Alat TTG yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di 1022 Desa Berkembang)	Tanjung Lesung, Kec. Panimbang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN	LOKASI	OPD
						2 Penataan dan Pemanfaatan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) (Terinventarisirnya Alat TTG di 4 Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan dan Penggunaan dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Desa)		
						3 Pengelolaan Potensi Desa melalui TTG (Tersedianya Alat TTG dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam)		
				2	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Desa	1 Peningkatan Kapasitas Manajemen Lembaga Kemasyarakatan melalui Pelaku Usaha Perdesaan (Jumlah Pelaku Usaha Perdesaan yang diberdayakan tentang Manajemen Usaha)		
				3	Penataan dan Pengembangan Pelaku Ekonomi Desa	1 Pembinaan dan Pengembangan Bumdes (Meningkatnya Pengetahuan Pengelola Bumdes di 158 Desa Tertinggal)		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Desa (Tersediaanya Potensi Inovasi Desa terhadap Ekonomi Desa)		
				4	Penataan dan Pengembangan Potensi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1	Pengembangan Potensi Desa (Kearifan Lokal)		
		3	Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	Pengelolaan Teknologi Informasi	1	Pengelolaan domain bantenprov.go.id		Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		4	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Pemeliharaan dan Penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Penertiban Terpadu/Tim Terkoordinasi Pemeliharaan Trantibum, Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penegakan Peraturan Daerah (Non Justisial) di wilayah Provinsi Banten		Satuan Polisi Pamong Praja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		5	Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	1	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Perumusan Kebijakan Penataan Percepatan Progres Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Destinasi Wisata Tanjung Lesung		Biro Perekonomian Bina
		6				2	Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Banten Tahun 2019		
		7	Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	1	Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Perumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Banten		Biro Infrastruktur & SD

4.3.3.4 Tematik Penataan Kawasan Banten Lama

Tabel 4.8

Matrik Rencana Aksi Revitalisasi Kawasan Banten Lama

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
1	Peningkatan Infrastruktur Wilayah	1	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	1	Pembangunan Jalan Wilayah Utara	1	Pembangunan Jalan Lopang - Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPUPR
						2	Pembangunan Jalan Akses Masjid Agung Banten Lama		
						3	Pembangunan Jalan Banten Lama-Tonjong		
						4	Pembangunan Jalan Terate - Banten Lama		
						5	Pembangunan Jalan Kramatwatu - Tonjong		
						6	Pembangunan Jalan Baru (Tonjong - Banten Lama/short cut)		
				2	Pengadaan Lahan Kebinamargaan	1	Pembebasan Lahan Relokasi Jalan Tonjong - Banten Lama (short cut)		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Pengadaan Lahan untuk Pelebaran Jalan Kramat Watu - Tonjong		
						3	Pengadaan Lahan Tonjong - Karangantu		
						4	Pengadaan Lahan Terate - Banten Lama		
		2	Penataan Ruang	1	Penataan Dan Pemanfaatan Ruang	1	Penyusunan Perda Kawasan Strategis Provinsi Banten Lama	Kota Serang	
		3	Pembangunan Sumber Daya Air	1	Operasi Dan Pemeliharaan Fungsi Jaringan Sumber Daya Air Pada Bpsda Ciujung-Cidanau	1	OP / Pembersihan kanal Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

				2	Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air	2	Revitalisasi Kanal Banten Lama (termasuk lahan dan jembatan rantai)		
		4	PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALULINTAS	1	MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS	1	Pengadan Dan Pemasangan Lampu Lpju (Mekanikal Dan Electrical)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISHUB

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	PJU Ruas Jalan Banten Lama – Pontang		
						3	PJU Ruas Jalan Terate - Banten Lama		
						4	PJU Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong		
						5	PJU Ruas Jalan Lopang - Banten Lama		
						6	PJU Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu		
						7	PENGADAAN PERLENGKAPAN JALAN (RPPJ/RPPJ PERINGATAN)		
						8	Ruas Jalan Banten Lama - Pontang (Rambu, Marka, Guadrill)		
						9	Ruas Jalan Terate - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill)		
						10	Ruas Jalan Kramatwatu – Tonjong (Rambu, Marka, Guadrill)		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						11	Ruas Jalan Lopang - Banten Lama (Rambu, Marka, Guadrill)		
						12	Ruas Jalan Akses Pelabuhan Karang Hantu (Rambu, Marka, Guadrill)		
						13	Pengadaan Dan Pemasangan Warning Light Di Ruas Jalan Banten Lama – Pontang		
				2	Pengendalian Dan Penyelenggaraan Lalu Lintas	1	Pengaturan Lalu Lintas Banten Lama		
		5	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN	1	Perencanaan Dan Pengembangan Jaringan Transportasi	1	Pengadaan Lahan shelter Bus dan gerbang akses dari arah barat	Kota Serang	
						2	Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Park and Drive sekitar stasiun KA		
						3	Perencanaan Teknis pembangunan Kereta Gantung		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Keciptakaryaan	1	Peningkatan Kualitas Rtlh	1	Bedah Rumah Tidak Layak Huni	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPRKP
				2	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	2	Pasangan Paving Blok		
				3	Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Bersih	3	Pembangunan Sumur Bor dan MCK		
				4	Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan	4	Normalisasi Drainase Lingkungan		
				5	Pembebasan Lahan Di Banten Lama	5	Pembebasan Lahan Kawasan Pendukung Wisata (KPW)		
				6	Sarana Pendukung Kebersihan	6	Mobil Pembersih Jalan, Kendaraan Roda Tiga	Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		7	Penataan Bangunan Dan Lingkungan	1	Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Provinsi	1	Penataan Kauman, Pembangunan IPAL Komunal, penataan Kaibon, spelwijk, Pembangunan Akses Antar Situs, Penyediaan Sarana Sosial (Perpustakaan, Lapangan, RTH)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Perencanaan Dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman	2	Penyusunan AMDAL kawasan Banten Lama	Kota Serang	
		8	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Perumahan	1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan	1	Pengadaan Lahan Relokasi Rumah	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Penyediaan Dan Pembangunan Perumahan	2	Pembangunan Rumah Khusus pada Kawasan Strategis Provinsi		
				3	Pengelolaan Dan Pengembangan Persampahan	3	Penyediaan Tempat Pembuangan sampah Sementara		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		9	Tata Kelola Pemerintahan	1	Pengadaan Sarana Dan Prasara Kantor	1	Pengadaan Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup	Kota Serang	DLHK
						2	Pengadaan Truk Arm Roll Penganngkut Kontainer Sampah menggunakan Bak Tertutup		
						3	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda Tiga (Motor Pengangkut Sampah)		
				2	Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran	1	Outsourcing Pengemudi Kendaraan Pengelola Sampah		
		10	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	1	Rehabilitasi Lahan Dan Perhutanan Sosial	1	Penghijauan dijalan Akses menuju Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Penanaman Pohon untuk Mendukung RTH pada jalan provinsi akses banten lama		
2	Peningkatan Akses, Mutu Pendidikan, Kesehatan Dan Sosial	1	Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1	Jaminan Sosial Keluarga	2	jumlah penerima jaminan sosial keluarga	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINSOS
		2	Rehabilitasi Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Anak Dan Usia Lanjut	1	jumlah anak yang mendapat rehabilitasi sosial (desa kasunyatan kec. kasemen kota.serang)		
						2	Bimbingan Sosial keluarga dan anak jalanan 50 orang di Banten Lama		
						3	Bimbingan Sosial dan keterampilan anak jalanan 80 orang di Banten Lama		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang	1	jumlah tuna sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial (Bimbingan dan keterampilan bagi pengemis)		
		3	Pemberdayaan Sosial	1	Pemberdayaan Sosial Kelurga Dan Masyarakat	1	jumlah PSKS yng dibina (kelembagaan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial		
		4	Penanganan Fakir Miskin	1	Penanganan Fakir Miskin	1	jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui KUBE Kel. Banten Kec. Kasemen		
				2	Penanganan Fakir Miskin Perkotaan	1	jumlah fakir miskin yang diberdayakan melalui UEP Kel. Banten Kec. Kasemen		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
						2	Bimbingan sosial motivasi bagi penerima KUBE fakir miskin perkotaan tahun 2019, 20 KK di Banten Lama		
						3	Bantuan Sosial KUBE fakir miskin perkotaan 20 KK di Banten Lama		
						4	Bimbingan sosial motivasi bagi penerima UEP fakir miskin perkotaan tahun 2019, 12 KK di Banten Lama		
						5	Bantuan Sosial UEP fakir miskin perkotaan 12 KK di Banten Lama		
		5	PENDIDIKAN MENENGAH	1	PENINGKATAN PESERTA DIDIK SMK	1	Pengembangan Bakat dan Minat Peserta Didik	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINDIKBUD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Pelestarian Kebudayaan	1	Pelestarian, Pengembangan Dan Pemanfaatan Cagar Budaya Dan Permuseuman	1	Pendataan, Pendaftaran, dan Pemeringkatan Cagar Budaya		
						2	Perlindungan dan Revitalisasi Cagar Budaya		
						3	Pembinaan Dan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat terhadap Cagar Budaya Banten		
						4	Pembuatan Film Dokumentasi Cagar Budaya		
		7	Tata Kelola Pemerintahan	1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	1	pengadaan/pembangunan gedung/kantor (Sarana Kesehatan di banten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINKES
		8	Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	1	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	1	pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin Banten Lama		
		9	Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1	kerjasama ormas dan dunia usah dalam mendukung program germas di banten lama		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	1	peningkatan jumlah kab/kota yang melaksanakan kab/kota sehat di banten lama		
						2	peningkatan jumlah desa yang melaksanakan STBM (banten lama)		
		10	Pencegahan Pengendalian Penyakit	1	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Menular	1	penanggulangan penyakit TBC di Banten Lama		
				2	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular	1	skrining deteksi dini penyakit tidak menular di Banten Lama		
				3	Surveilans Imunisasi Dan Kriisi Kesehatan	1	penguatan imunisasi rutin di Banten Lama		
3	Peningkatan Ekonomi Dan Kesempatan Berusaha	1	Pengembangan Sdm Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1	Pengembangan Sdm Pariwisata Banten	1	Pelatihan Guide Wisata Banten Lama.	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISPAR

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		2	Pemasaran Produk Pariwisata	1	Promosi Pariwisata Provinsi Banten	1	Komunitas Familiar Trip (Promosi, Kerjasama dengan Travel Agent) Banten Lama		
				2	Penyiapan Sarana Dan Prasarana Promosi Pariwisata	1	pengadaan materi dan sarana promosi pariwisata (banten lama)		
						2	pembuatan materi promosi visual pariwisata (banten lama)		
						3	sewa bando/bilboard/video tron/reklame/pavilion banten lama		
		3	Pengembangan Destinasi Pariwisata	1	Optimalisasi Pengembangan Daya Tarik Wisata BanteN	1	Pembuatan Atraksi Wisata		
						2	Pengembangan atraksi wisata alam, budaya dan buatan (1 objek wisata budaya/religi di Banten Lama		

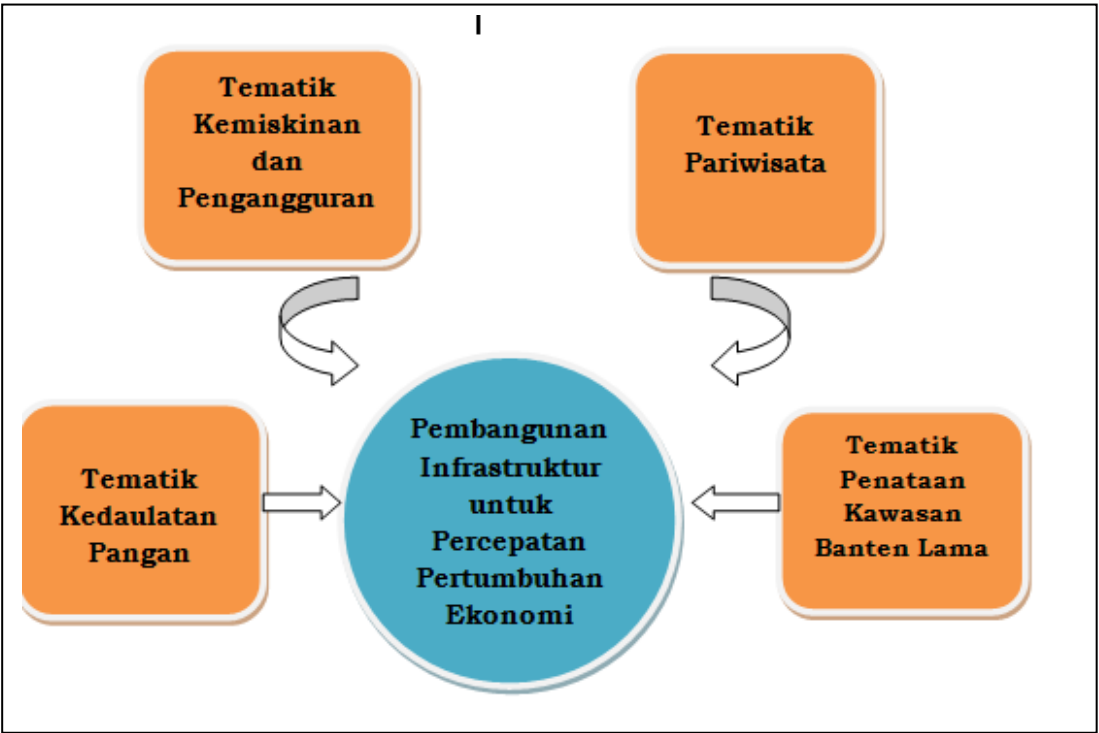
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
				2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Banten	1	Pengelolaan wisata budaya/religi (Pembentukan Badan Pengelola)		
						2	FGD pengembangan kawasan strategis pariwisata (PKS tasikardi)		
						3	Pembuatan Kampung Wisata		
		4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	1	Bina Usaha Kecil Dan Koperasi Dibanten	1	Peningkatan Usaha Kecil yang difasilitasi mendapat kemitraan strategis(Pembinaan UKM)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DINKOPUKM
						2	Sentra pemasaran di provinsi banten (Pelatihan keterampilan kerajinan Khas Banten)		
		5	Peningkatan Daya Saing Industri	1	Peningkatan Dan Pengembangan Industri Kecil Menengah	1	Pengembangan Produk IKM menunjang Destinasi Pariwisata	Kota Serang	DISPERINDAG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		6	Peningkatan Sarana Prasarana	1	Pemanfaatan Lahan Dan Air Irigasi	1	pengadaan lahan Sawah Abadi Banten Lama untuk wisata pertanian	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DISTAN
						2	Penghijauan pekarangan/halaman dengan tanaman pertanian		
4	PENINGKATAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN	1	Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah	1	Perencanaan Penganggaran Dan Pengendalian Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah	1	SK Deliniasi Kawasan Strategis Banten Lama	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	BAPPEDA
						2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Infrastruktur Wilayahh (Perencanaan dan Pengendalian Revitalisasi Banten Lama)		
		2	Peningkatn Akses Dan Kualitas Informasi Publik	1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	1	Publikasi Revitalisasi Banten Lama	Provinsi Banten	DISKOMINFOTIKSAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		3	Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1	Penegakan Dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten	1	operasi penegakan perda/pergub di wilayah provinsi banten (Relokasi PKL, Kios dan Bangunan Lainnya banten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	SATPOL PP
		4	Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1	Kerjasama Peningkatan Ketrentaman Umum Dan Ketertiban Masyarakat	1	patroli kerjasama tribum dan trammas lintas provinsi dan Kabupaten/Kota banten	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	
				2	Pemeliharaan Dan Penanggulangan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	2	Penataan/Penertiban Terpadu Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Wilayah Provinsi Banten	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2019	PROGRAM		KEGIATAN		OUTPUT/SUB.KEGIATAN		LOKASI	OPD
		5	Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	1	Pembinaan Dan Pengembangan Masyarakat Desa	1	peningkatan kapasitas manajemen lembaga kemasyarakatan melalui pelaku usaha perdesaan/kelurahan (pelaku usaha BKM dan KSM dibanten lama)	Kecamatan Kasemen, Kota Serang	DPMD

Gambar 4.2
Internalisasi Tematik Pembangunan Tahun 2019 dengan Tema RKPD
Tahun 2019

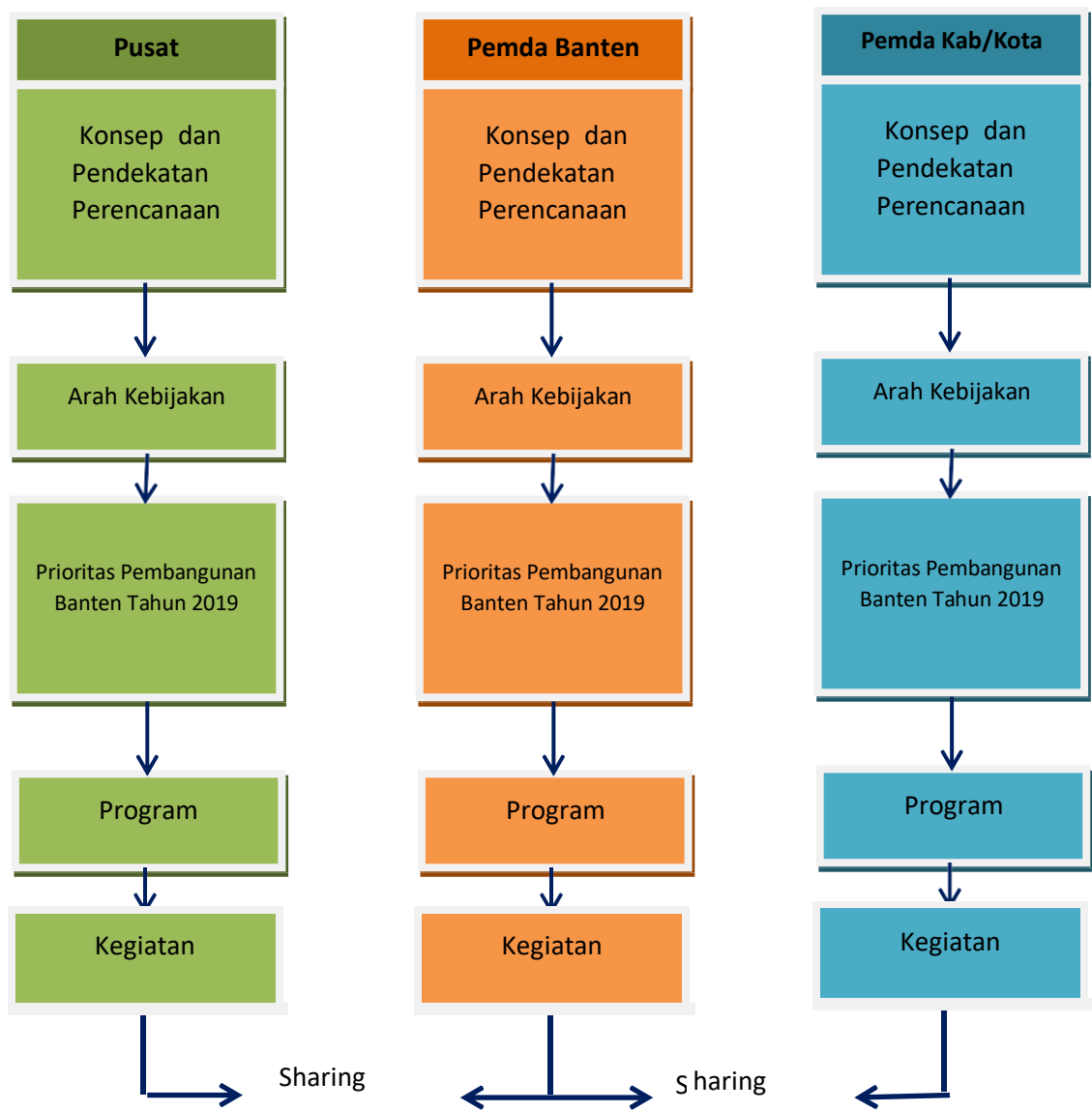


Berdasarkan ke-4 (empat) hal tersebut menjadi bagian integral perencanaan yang akan menjadi warna didalam membangun konsep perencanaan Tahun 2019, serta menjadi dasar perumusan kebijakan baik sektoral maupun kewilayahan.

Integrasi Prioritas pembangunan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Integrasi Perencanaan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota



4.3.4 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019

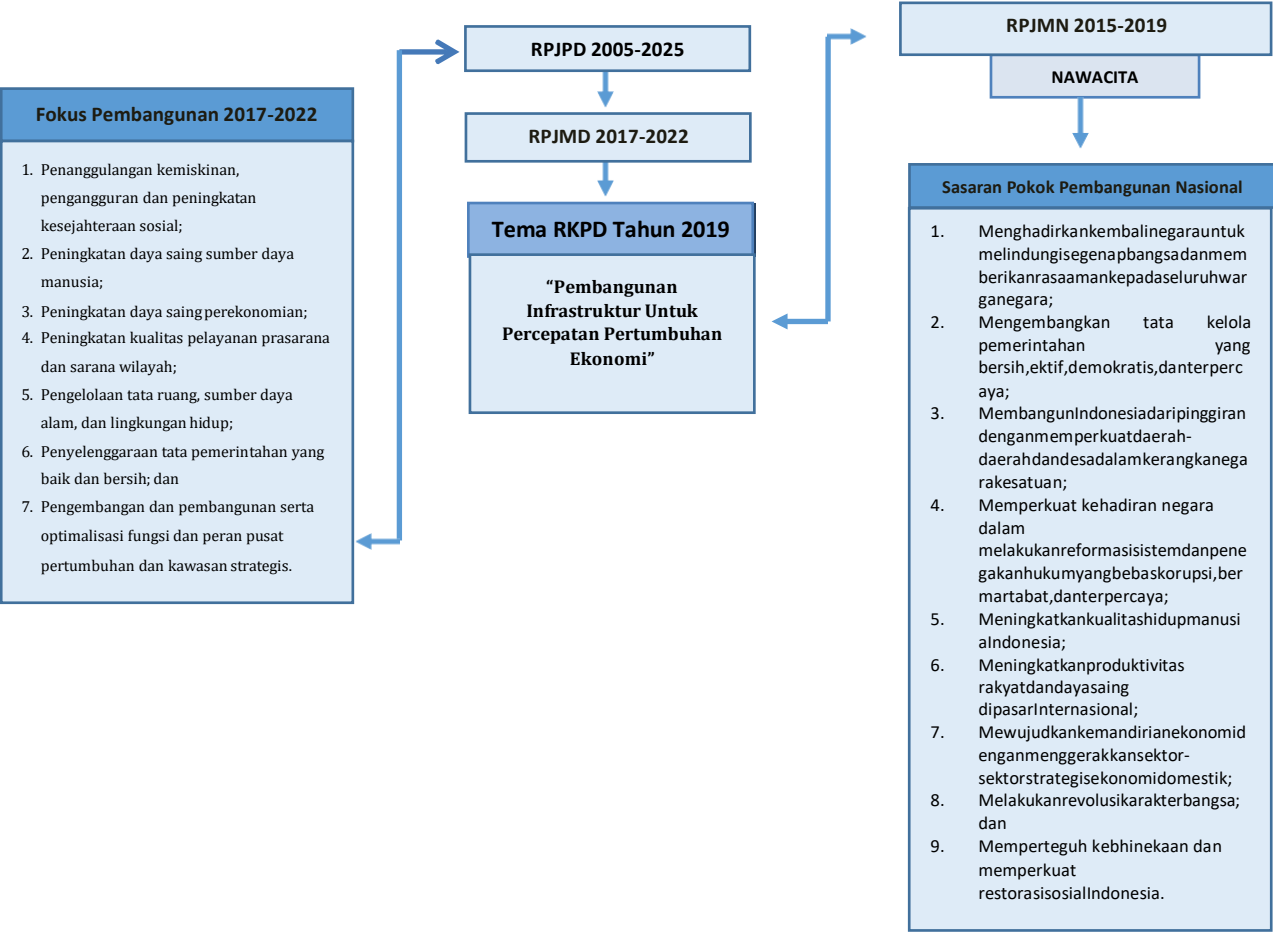
RPJMN 2015-2019 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, dengan visi pembangunan yaitu: *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*. Lebih lanjut, guna mencapai visi tersebut disusun pula misi pembangunan yang terdiri dari:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Didalam konteks keselarasan antara Tema RKPD Tahun 2019 dengan visi dan misi jangka menengah nasional Tahun 2015-2019. Tema RKPD Tahun 2019 adalah menjaga “Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi”. Tema ini sejalan dengan visi dan misi RPJMN 2015-2019 dimana antara visi dan misi nasional sudah memiliki interkoneksi yang jelas, sedangkan hubungan tema tahunan didalam RKPD Tahun 2019 dengan misi jangka menengah nasional dapat dijelaskan, sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur sejalan dengan misi nasional untuk mewujudkan indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional serta akan melahirkan kemandirian ekonomi yang berkualitas dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
2. Percepatan dan Pemerataan sejalan dengan usaha untuk mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis, menciptakan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.

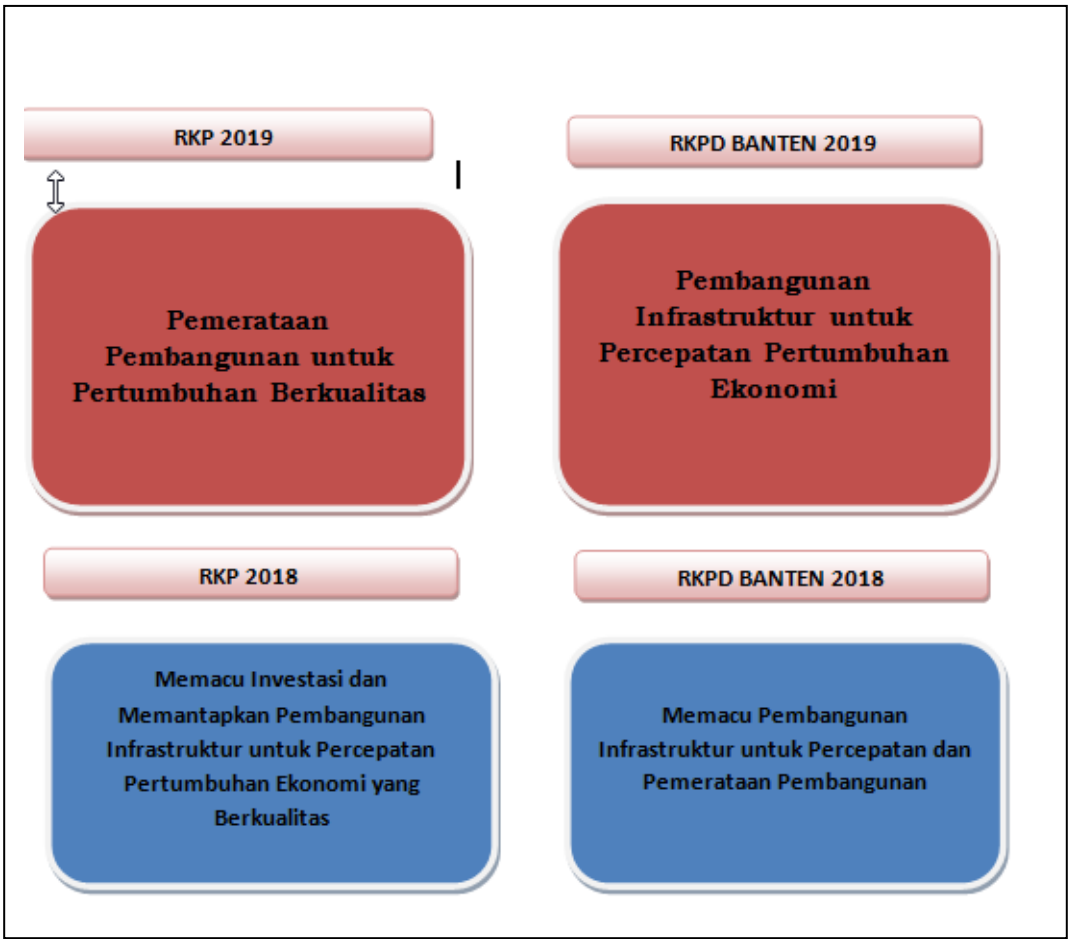
Gambar 4.4
Posisi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional



4.3.5 RKPD Tahun 2019 Sebagai Bagian Integral dari RKP Tahun 2019

Dalam RKP Tahun 2019 pelaksanaan pembangunan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2019 sebagai upaya yang berkelanjutan tahun-tahun sebelumnya. Kata kunci Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi menjadi dimensi penting dalam menopang pembangunan Provinsi Banten.

Gambar 4.5
Integrasi Tema Pembangunan di Provinsi Banten Terhadap Nasional
Tahun 2018 dan 2019



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Banten yang telah dibahas pada Bab IV, dengan merujuk pada hasil evaluasi pembangunan Tahun 2017 dan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Capaian RKPD/APBD Triwulan II Tahun Anggaran 2019, maka disusun Perubahan Rencana kerja tahun 2019 serta pagu indikatifnya.

Dalam menyusun Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam implementasinya harus mempertimbangkan aspek politis dan bottom up yang bersifat lebih aspiratif melalui rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Banten.

Urgensi Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

- Perintah normatif Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya
- Aktualisasi peran dan fungsi representasi politik DPRD
- Bentuk pertanggungjawaban politik anggota DPRD terhadap konstituen
- Penegasan tentang kemitraan kepala daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) sebagai penyelenggara pemerintahan daerah
- Perwujudan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance and clean government)
- Pokok – Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan kemudian dimasukkan kedalam e-planning
- Pokok – Pokok Pikiran DPRD diserahkan ke Bappeda dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat provinsi

Bahan Dasar Pokok-Pokok Pikiran DPRD

- Reses anggota DPRD
- Audiensi dan jaring aspirasi masyarakat
- Forum dialog Pimpinan DPRD
- Rekomendasi fraksi
- Nota dan rekomendasi alat kelengkapan DPRD

- Kolom aspirasi media
- Hasil rapat dan kunjungan kerja akd
- Musrenbang kab/kota
- Dokumen pendukung lainnya (RPJPD, RPJMD)

Isu & Usulan Program Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2019:

BIDANG PEMERINTAHAN (KOMISI I)

- Akselerasi Reformasi Birokrasi
- Penerapan E-Planning, E-Monev dan E-Budgeting
- Penyelenggaraan Pemilu Presiden & Pemilu Legislatif 2019 yang demokratis, aman & kondusif
- Reformasi Tata Kelola Keuangan
- Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas
- Perbaikan hubungan kerja daerah provinsi dengan kabupaten/kota

BIDANG PEREKONOMIAN (KOMISI II)

- Revitalisasi sektor pertanian
- Pengendalian sektor inflasi
- Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin
- Pengembangan kawasan ekonomi yang berbasis ekonomi kreatif & pariwisata
- Penciptaan iklim investasi
- Ketahanan pangan daerah yang terjaga
- Peningkatan pengembangan Sumber Daya Alam yang dimiliki

BIDANG KEUANGAN & ASET (KOMISI III)

- Optimalisasi potensi pendapatan daerah
- Pemberian bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang proporsional, tepat sasaran & bisa dipertanggungjawabkan
- Pemberian dana hibah & bansos yang transparan, akuntabel & tepat sasaran
- Revitalisasi Kawasan Banten Lama
- Peningkatan tata kelola APBD dalam hal distribusi dan alokasi

BIDANG INFRASTRUKTUR (KOMISI IV)

- Pembangunan infrastruktur jalan & jembatan provinsi yang berkualitas
- Akselerasi pembangunan 12 proyek strategis nasional di Provinsi Banten
- Pengendalian dampak lingkungan hidup & pengelolaan sampah
- Penataan kawasan kumuh kampung nelayan, perdesaan/perkotaan
- Akselerasi pembangunan terminal tipe B & pengembangan sistem transportasi massal
- Optimalisasi pelayanan kelistrikan & energi terbarukan

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT (KOMISI V)

- Peningkatan akses & pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
- Peningkatan akses & pemerataan pendidikan berkualitas
- Penanggulangan kemiskinan & pengangguran
- Terwujudnya pemuda wirausahawan baru & olahraga yang berprestasi
- Terwujudnya kelembagaan PUG & PUHA yang berkualitas
- Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang berkualitas

51.1 Program Pembangunan Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2019 beserta pagu indikatifnya disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan tahun 2019, tujuan dan sasaran pembangunan serta target capaian kinerja pembangunan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

Program Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2019 terdiri dari 128 (seratus dua puluh delapan) program untuk melaksanakan urusan wajib, urusan pilihan, dan fungsi Penunjang urusan Pemerintahan sebagaimana Tabel 5.1.

Tabel 5.1
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENANGGUNG
JAWAB TAHUN 2019

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Pendidikan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidikan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Mutu Pembelajaran	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kesehatan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kesehatan
		Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Program Pencegahan Pengendalian Penyakit	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan dan Kefarmasian	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pembangunan Sumberdaya Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Keciaptakaryaan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Tata Kelola Pemerintahan	Satuan Polisi Pamong Praja
			Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Pembinaan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Penanganan Bencana Kebakaran	Satuan Polisi Pamong Praja
		Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosial	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Penanganan Fakir Miskin	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	Dinas Sosial
		Program Pelayanan dan Perlindungan Sosial Dalam Panti	Dinas Sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Ketenaga Kerjaan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Peningkatan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
		Program Pelayanan Pelatihan Tenaga Kerja Industri	Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Pangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Peningkatan Keterjangkauan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Perlindungan Konsumen Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Lingkungan Hidup	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Administrasi Kependudukan dan Capil	Program Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana
	Perhubungan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Penyelenggaraan Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut dan Udara	Dinas Perhubungan
	Komunikasi dan Informatika	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
		Pegkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pengembangan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Peningkatan Kualitas Usaha dan pemberdayaan Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		Program Pelatihan SDM Koperasi dan UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Penanaman Modal	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengendalian Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Kepemudaan dan Olahraga	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pengembangan dan Pemberdayaan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Peningkatan Prestasi Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Program Pengembangan Koleksi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
	Statistik	Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian
			Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Persandian	Program Tata Kelola Persandian	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Kebudayaan	Program Pelestarian Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Kearsipan	Program Pengelolaan Sistem Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Urusan Pilihan	Kelautan dan Perikanan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Daya Saing Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Pariwisata	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Produk Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Pertanian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perkebunan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
		Program Penanganan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	Kehutanan	Program Pengelolaan dan Konservasi Hutan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	Energi dan Sumberdaya Mineral	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Geologi, Air Tanah, Mineral dan Batubara	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Program Pengembangan Pemanfaatan Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Perdagangan	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Perlindungan dan Pengawasan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Perindustrian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Daya Saing Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Pelayanan Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	Administrasi Pemerintahan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Sekretariat DPRD
			Biro Pemerintahan
			Biro Hukum
			Biro Organisasi
			Biro Bina Perekonomian
			Biro Kesejahteraan Rakyat
			Biro Umum
			Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
			Biro Administrasi Pembangunan Daerah
			Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
			Badan Penghubung

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretariat DPRD
		Program Pembangunan Kemitraan	Badan Penghubung
		Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	Biro Organisasi
		Program Perumusan Kebijakan Pemerintahan	Biro Pemerintahan
		Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	Biro Bina Perekonomian
		Program Peningkatan Kualitas Produk dan Pelayanan Hukum	Biro Hukum
		Program Perumusan Kebijakan Infrastruktur	Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Program Perumusan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Program Dukungan Layanan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Program Fasilitasi dan Pelayanan Pimpinan	Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan
		Program Pelayanan Umum	Biro Umum
	Pengawasan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Inspektorat Provinsi
		Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Provinsi
	Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Sosial dan Pemerintahan Kemasyarakatan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Keuangan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pendapatan Daerah
			Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
		Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		Program Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penatausahaan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Kepegawaian	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Penatausahaan Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Badan Kepegawaian Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan	Program Tata Kelola Pemerintahan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Pengembangan SDM Aparatur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Program Penilaian dan Sertifikasi Aparatur	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Selanjutnya berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah tersebut dijabarkan kedalam 173 program dan 1384 kegiatan yang akan dijalankan oleh 42 Perangkat Daerah. Daftar program pembangunan dan pagu belanja langsung menurut urusan, bidang urusan, program dan kegiatan untuk masing-masing PD Provinsi Banten Tahun 2019 terlihat sebagaimana terdapat pada lampiran bab ini.

BAB VI

PENUTUP

Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, momen yang sangat penting bagi perencanaan pembangunan di Provinsi Banten yang akan menentukan keberhasilan serta kesinambungan pelaksanaan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 pada Bab II, Pembangunan di Provinsi Banten menghadapi 4 (empat) masalah pembangunan saat ini yaitu masih terdapat kesenjangan wilayah antar Kabupaten/Kota, perlunya percepatan peningkatan daya saing daerah, masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, serta masih belum optimalnya Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah tersebut telah dituangkan prioritas pembangunan, strategi dan arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan berikut dengan Kebijakan Pendanaan sebagaimana tertuang pada Bab VI, untuk mencapai keberhasilan Pembangunan di Provinsi Banten perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Bagi seluruh komponen baik pada tingkatan pemerintahan dan dunia usaha serta masyarakat berkewajiban untuk mengoptimalkan peran guna melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Bagi Pemerintah Provinsi Banten, Perubahan RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam penyusunan APBD Perubahan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
3. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, RKPD ini merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019, dalam rangka mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor dan lintas kewilayahan;
4. Bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi Banten, pada akhir Tahun Anggaran 2019, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya;

5. Setiap PD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan melalui tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjaga efektifitas pelaksanaan program.

Penyusunan Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sekaligus merupakan yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2019 yang diawali dengan Penyusunan KUA-PPAS Perubahan. Oleh karenanya Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 harus menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2019 dan menjadi landasan dalam penyusunan KUA-PPAS Perubahan untuk menyusun APBD Provinsi Banten Perubahan Tahun 2019.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, seluruh penyelenggara pemerintahan, dengan dukungan masyarakat, perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 agar mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat, menuju masyarakat Banten sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.

GUBERNUR BANTEN

WAHIDIN HALIM